



Katalog BPS: 9502002

NERACA ARUS DANA INDONESIA TAHUNAN

2006-2011



Badan Pusat Statistik - Indonesia

NERACA ARUS DANA INDONESIA

2006 - 2011

<http://www.bps.go.id>

TIM PENYUSUN NAD TAHUNAN INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK, BANK INDONESIA, DAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

**NERACA ARUS DANA INDONESIA
2006 - 2011**

Katalog BPS/ BPS Catalogue : 9502002
Nomor Publikasi/ Publication Number : 07230.1202
I S S N : 0854-6967
Ukuran Buku/ Book Size : 21 cm x 29 cm
Jumlah Halaman/ Total Pages : 144 Halaman/ Pages

Naskah/Manuscript:

Subdit Neraca Modal dan Luar Negeri
Sub Directorate of Foreign and Capital Accounts

Gambar Kulit/Cover Design:

Subdit Neraca Modal dan Luar Negeri
Sub Directorate of Foreign and Capital Accounts

Diterbitkan Oleh/Published by:

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia
BPS - Statistics Indonesia

Dicetak Oleh/Printed by:

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya/

May be cited with reference to the source

Publikasi ini dapat diunduh di : www.bps.go.id/publications/publikasi.php?key=neraca+arus+dana
This publication can be downloaded at
www.bps.go.id/publications/publikasi.php?key=neraca+arus+dana

KATA PENGANTAR

Publikasi Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia 2006-2011 adalah publikasi yang menyajikan gambaran serta informasi mengenai data investasi di Indonesia selama periode 2006 – 2011. Data yang disajikan mencakup informasi mengenai perkembangan investasi finansial dan investasi non finansial tahunan dalam berbagai kategori transaksi finansial yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi (sektor institusi). Sektor institusi dalam publikasi ini terdiri dari: Bank Sentral, Perbankan, Bukan Bank, Rumah Tangga, Pemerintah, Perusahaan Pemerintah & Perusahaan Swasta Non Finansial, serta Luar Negeri. Khusus untuk sektor Bukan Bank yang terdiri dari Pegadaian, Dana Pensiun, Asuransi, dan Perusahaan Pembiayaan, pada publikasi ini juga disajikan tersendiri baik dalam ulasan maupun tabel NAD-nya.

Publikasi NAD Tahunan ini merupakan perwujudan dari hasil kerjasama Tim Penyusunan NAD Indonesia Tahunan yang terdiri dari unsur-unsur di Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI) khususnya Direktorat Statistik Ekonomi Moneter, dan Kementerian Keuangan khususnya di BAPPEPAM-LK.

Publikasi ini adalah terbitan ke 22 (dua puluh dua) serta merupakan kelanjutan dari publikasi-publikasi NAD Tahunan sebelumnya yang disajikan secara rutin oleh Badan Pusat Statistik. Sajian yang ditampilkan pada publikasi ini masih mengikuti format publikasi NAD tahun sebelumnya baik dari segi pembagian sektor institusi maupun kategori transaksi finansialnya. Namun beberapa angka yang disajikan dalam publikasi ini telah mengalami perbaikan dan disesuaikan dengan data pendapatan nasional yang telah direvisi.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi NAD Tahunan baik dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, maupun dari Kementerian Keuangan yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Jakarta, Oktober 2012

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

SURYAMIN

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Sistematika Penulisan	3
BAB II KERANGKA TEORI NERACA ARUS DANA	5
2.1 Penjelasan Umum	5
2.2 Kerangka Teori NAD	6
2.3 Neraca Arus Dana dalam Sistem Neraca Nasional	10
2.4 Hubungan Neraca Arus Dana dengan Neraca Perusahaan	13
2.5 Kegunaan Neraca Arus Dana	15
2.6 Masalah dan Keterbatasan NAD	17
BAB III KERANGKA DASAR DAN CAKUPAN NERACA ARUS DANA	21
3.1 Kerangka NAD Indonesia	21
3.2 Sumber Data	28
3.3 Metode Penyusunan	32
BAB IV KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA BERDASARKAN NERACA ARUS DANA INDONESIA TAHUN 2006-2011	37
4.1 Gambaran Umum Perekonomian Indonesia Tahun 2011	37
4.2 Perkembangan Tabungan Bruto	40
4.3 Perkembangan Investasi	43
4.4 Perkembangan S-I Gap	52
4.5 Tinjauan NAD Sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Tahun 2011	53
4.5 Percepatan Uang Beredar (<i>Velocity of Money</i>) dan Pendalaman Sektor Keuangan (<i>Financial Deepening</i>)	63

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Neraca Arus Dana Sederhana (Triliun Rupiah)	7
Tabel 4.1	Tabungan Bruto Menurut Sektor Tahun 2006-2011 (Triliun Rupiah)	40
Tabel 4.2	Struktur Tabungan Bruto Menurut Sektor Tahun 2006-2011 (Persen)	41
Tabel 4.3	Struktur Tabungan Bruto Menurut Sektor Terhadap PDB Tahun 2006-2011 (Persen)	42
Tabel 4.4	Investasi Non Finansial Menurut Sektor Tahun 2006-2011 (Triliun Rupiah) .	46
Tabel 4.5	Struktur Investasi Non Finansial Menurut Sektor Tahun 2006-2011 (Persen) .	47
Tabel 4.6	Struktur Investasi Non Finansial Menurut Sektor Terhadap PDB Tahun 2006-2011 (Persen)	48
Tabel 4.7	Jenis-jenis Investasi Finansial menurut Instrumen Finansial Tahun 2011 (Triliun rupiah)	49
Tabel 4.8	Komposisi Perubahan Kepemilikan Modal Saham Menurut Sektor, Tahun 2011 (Triliun Rupiah)	50
Tabel 4.9	Investasi Luar Negeri di Pasar Keuangan Domestik Menurut Jenis Investasi, Tahun 2011 (Triliun Rupiah)	51
Tabel 4.10	<i>S-I Gap</i> Menurut Sektor, Tahun 2006 - 2011 (Triliun Rupiah)	52
Tabel 4.11	Perubahan Portofolio Investasi Finansial LKBB, Tahun 2011 (Triliun Rupiah) .	56
Tabel 4.12	Sumber Pembiayaan Investasi Finansial LKBB, Tahun 2011 (Triliun Rupiah) .	57
Tabel 4.13	Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Perusahaan Asuransi, Tahun 2011 (Triliun Rupiah)	58
Tabel 4.14	Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Perusahaan Pembiayaan, Tahun 2011 (Triliun Rupiah)	59
Tabel 4.15	Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Perusahaan Dana Pensiun, Tahun 2011 (Triliun Rupiah)	61
Tabel 4.16	Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Perusahaan Pegadaian, Tahun 2011 (Triliun Rupiah)	63
Tabel 4.17	Uang Beredar dan Produk Domestik Bruto, Tahun 2006 - 2011	66

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Proporsi Investasi Indonesia, Tahun 2010 dan 2011 (Persen)	44
Grafik 4.2	Perkembangan Investasi Indonesia, Tahun 2006-2011 (Triliun Rupiah)	44
Grafik 4.3	Perkembangan Pertumbuhan Investasi Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2006-2011 (Persen)	45
Grafik 4.4	Tabungan Bruto, Investasi Non Finansial, dan Pinjaman Neto LKBB, Tahun 2011 (Triliun Rupiah)	54
Grafik 4.5	Komposisi Tabungan Bruto Menurut Sektor-Sektor LKBB, Tahun 2011 (Persen)	54
Grafik 4.6	Proporsi <i>S – I Gap</i> LKBB Menurut Sektor, Tahun 2011 (Persen)	55
Grafik 4.7	Perbandingan Beberapa Aset Perusahaan Pembiayaan, Tahun 2010 dan 2011 (Triliun Rupiah)	60
Grafik 4.8	Rasio M1 dan M2 Terhadap PDB	67
Grafik 4.9	Velocity of Money	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Definisi Sektor Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia	<i>L1-1-L1-11</i>
Lampiran 2. Definisi Kategori Transaksi Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia	<i>L2-1-L2-9</i>
Lampiran 3. Matrik NAD Indonesia Tahunan, 2006 – 2011 Menurut Kategori Transaksi dan Sektor	<i>L3-1-L3-12</i>
Lampiran 4. Matrik NAD Indonesia Tahunan, 2006 – 2011 Menurut Sektor	<i>L4-1-L4-18</i>

<http://www.bps.go.id>

Ringkasan Eksekutif

Neraca Arus Dana (NAD) merupakan suatu sistem data finansial yang secara lengkap menggambarkan penggunaan **tabungan** dan **sumber dana lainnya** untuk membiayai **investasi yang dilakukan** oleh **sektor-sektor institusi** pada periode waktu tertentu. Neraca Arus Dana (NAD) juga menggambarkan arus transaksi finansial antar berbagai sektor institusi melalui (menggunakan) berbagai jenis instrumen finansial pada periode waktu tertentu.

Tabungan dalam istilah NAD merupakan selisih antara **penerimaan** dengan **pengeluaran** dari kegiatan ekonomi. **Penerimaan** meliputi, surplus usaha dari kegiatan memproduksi barang dan jasa, penerimaan dari balas jasa faktor produksi yang dimiliki (upah/gaji, deviden, bunga, sewa, dsb), dan *current transfer* (subsidi, pajak, bantuan luar negeri, dan pensiun). **Pengeluaran** mencakup pengeluaran untuk konsumsi, *current transfer* (seperti pajak, dll), dan pengeluaran lainnya (selain pengeluaran untuk kegiatan produksi) seperti pembayaran deviden dan bunga. Tabungan dalam konteks ini adalah tabungan bruto, yaitu tabungan (sesuai penjelasan diatas) ditambah dengan penyusutan barang modal.

Tabungan merupakan salah satu sumber untuk melakukan investasi. **Sumber lainnya** untuk berinvestasi adalah penerimaan yang berasal dari transaksi keuangan seperti, penerimaan dari hasil penerbitan saham/obligasi, penerimaan kredit, dan sebagainya. Sedangkan **investasi yang dilakukan** oleh berbagai sektor institusi mencakup **investasi finansial** dan **investasi non finansial (investasi riil)**. **Investasi finansial** adalah transaksi yang dilakukan oleh suatu sektor institusi dengan menggunakan berbagai instrumen finansial seperti saham, Surat Utang Negara (SUN), kredit, Surat Berharga Bank Indonesia (SBI), surat berharga jangka pendek, dan sebagainya. **Investasi non finansial (investasi riil)** mencakup penambahan serta pengurangan barang-barang modal dan inventori (stok) yang dilakukan oleh suatu sektor institusi. **Sektor-sektor institusi** dalam Neraca Arus Dana tahunan dibagi dalam 3 sektor besar yaitu: **sektor Keuangan, sektor Bukan Keuangan, dan sektor Luar Negeri**. Sektor Keuangan terdiri dari sub sektor Bank Sentral, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Sektor Bukan Keuangan meliputi sub sektor Rumah Tangga,

Pemerintahan Umum, Perusahaan Pemerintah, dan Perusahaan Swasta. Sedangkan Luar Negeri merupakan sektor tersendiri yang terpisah dari sektor-sektor lainnya.

NAD disajikan dalam bentuk matrik, yaitu suatu sajian dalam bentuk tabel yang terdiri dari **baris** dan **kolom**. **Baris** pada matrik NAD menunjukkan kategori transaksi, yaitu jenis-jenis transaksi baik transaksi finansial maupun non finansial, seperti pembentukan modal tetap bruto, kredit, saham, surat berharga jangka panjang, dan sebagainya. Sedangkan **kolom** pada matriks NAD menunjukkan pembagian sektor-sektor institusi. Setiap sektor institusi mempunyai dua kolom yaitu **kolom penggunaan** dan **kolom sumber**. **Kolom penggunaan** digunakan untuk mencatat semua perubahan (arus) aset (harta) baik aset finansial maupun aset non finansial, sedangkan **kolom sumber** digunakan untuk mencatat perubahan (arus) kewajiban finansial dan ekuiti.

NAD dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk perencanaan dan perumusan kebijakan khususnya di bidang ekonomi dan moneter. NAD juga dapat dipakai untuk melengkapi penyusunan Sistem Neraca Nasional serta Sistem Neraca Sosial Ekonomi Finansial (SNSEF). NAD merupakan sistem data tertutup yang di dalamnya melibatkan sektor luar negeri. Sebagai suatu sistem data tertutup berlaku bahwa setiap perubahan harta di suatu sektor akan diikuti perubahan kewajiban dalam jumlah yang sama di sektor yang lain. Dengan demikian, untuk masing-masing kategori transaksi berlaku identitas baris yang menunjukkan bahwa jumlah arus penggunaan dana (kenaikan harta) sama besarnya dengan jumlah arus sumber dana (kenaikan kewajiban finansial) untuk ekonomi secara keseluruhan. Pada masing-masing sektor berlaku identitas kolom yang menunjukkan bahwa jumlah perubahan harta akan sama dengan perubahan kewajiban ditambah perubahan ekuiti.

Kondisi perekonomian makro Indonesia, khususnya ekonomi finansial selama tahun 2006 hingga 2011 dapat dideteksi melalui matrik NAD 2006 – 2011. Beberapa indikator utama yang dapat diketahui dari matrik NAD dalam hubungannya dengan gambaran perekonomian makro Indonesia adalah **tabungan bruto, investasi non finansial, S-I gap** dan **investasi finansial**.

Kondisi perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2011 masih dibayang-bayangi ketidakpastian perekonomian global. Namun ditengah situasi perekomian global tersebut, perekonomian Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan keadaan yang kondusif dan belum terimbas oleh situasi perekonomian global tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2011 mencapai 6,46 persen, lebih baik dari tahun 2010 yang

sebesar 6,20 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut terutama tercermin dari tingginya peran ekspor, pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai sumber pertumbuhan.

Dari sisi sektoral, kondisinya juga tidak kalah menggembirakan, ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan sektor industri yang kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,60% (tertinggi dibandingkan sektor lainnya). Sementara itu, sektor *nontradables* juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan yang terutama berasal dari sektor perdagangan, hotel, restoran, dan sektor pengangkutan dan komunikasi yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 1,59%, dan 1,01%.

Gambaran pasar keuangan domestik pada tahun 2011 juga menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah gejolak pasar keuangan global. Industri perbankan nasional selama tahun 2011 menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Pertumbuhan kredit mencapai 24,1%, dimana secara kualitas menunjukkan peningkatan yang cukup berarti sejalan dengan meningkatnya penyaluran kredit kepada sektor produktif. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit investasi yang mencapai 33,2% pada tahun 2011, lebih tinggi dari pertumbuhan kredit konsumsi 24,1%. Sementara *Loan to Deposit Ratio* (LDR) meningkat dari 75,5% pada akhir tahun 2010 menjadi 79,0% pada Desember 2011. Disamping itu rasio kredit bermasalah (*Non-performing Loan - NPL*) secara bruto hanya sebesar 2,2%, (jauh di bawah ambang batas indikatif sebesar 5%). Sementara itu rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio - CAR*) juga cukup tinggi yaitu mencapai 16,1%. Selain itu, ketersediaan likuiditas perbankan juga cukup memadai. Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2011 tumbuh sebesar 19,0%, sedangkan rasio Alat Likuid terhadap *Non-Core Deposits* tetap terjaga pada level di atas 100%, yaitu sebesar 133,4%.

Kinerja pasar keuangan Indonesia secara umum juga menunjukkan kinerja yang membaik. Di tengah memburuknya kinerja pasar saham dunia, kinerja pasar saham Indonesia (yang tercermin dalam IHSG) selama 2011 menguat sebesar 3,2% (*y on y*) dan ditutup pada level 3.822 diakhir Desember 2011. Pencapaian tersebut menempatkan pasar saham Indonesia sebagai bursa dengan kinerja terbaik di negara kawasan. Namun nilai tukar rupiah pada akhir tahun ditutup pada level Rp 9.068 per dolar AS, melemah 0,6% secara *point to point* dibandingkan dengan Rp 8.991 per dolar AS pada akhir tahun 2010.

Di pasar obligasi, kinerja pasar SBN dan obligasi korporasi juga menunjukkan daya tahan dan kinerja yang positif. Sepanjang tahun 2011, pergerakan imbal hasil SBN dan obligasi korporasi masing-masing turun sebesar 87bps dan 15bps. Di sisi eksternal, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2011 mencatat surplus yang relatif besar, yaitu sebesar 11,9 miliar dolar AS. Hal tersebut tercermin dari surplus neraca perdagangan dan derasnya transaksi investasi langsung asing di Indonesia (FDI). Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa pada akhir 2011 mencapai 110,1 miliar dolar AS atau setara dengan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

Tabungan bruto selama periode 2006-2011 memperlihatkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan rata-rata setahun sebesar 23,47 persen. Pada tahun 2011 tabungan bruto mengalami peningkatan sebesar Rp2.433,86 triliun atau meningkat 16,09 persen (*year on year*). Secara sektoral, sektor perusahaan (swasta dan perusahaan pemerintah) mengalami peningkatan tabungan bruto yang tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Kontribusi sektor ini dalam pembentukan tabungan bruto rata-rata mencapai 59,71 persen. Hal tersebut menunjukkan besarnya peran yang dimainkan oleh sektor ini dalam kontribusinya terhadap pembentukan tabungan bruto secara nasional. Sedangkan sektor Keuangan dan Luar Negeri mempunyai tabungan bruto yang cukup rendah dibandingkan sektor lainnya. Selama periode tersebut, kontribusi sektor keuangan secara rata-rata hanya sebesar 4,31 persen/tahun. Walaupun kontribusinya terhadap pembentukan tabungan bruto secara nasional tidak signifikan, namun perannya sebagai lembaga intermediasi antara sektor surplus dan defisit, sangat menentukan terhadap penyediaan dana investasi dan konsumsi yang dibutuhkan dalam meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian nasional. Sektor Rumah Tangga dan Pemerintah masing-masing memberikan kontribusinya terhadap pembentukan tabungan bruto nasional sebesar 22,59 persen/tahun dan 12,81 persen/tahun.

Berkaitan dengan perkembangan investasi (investasi non finansial dan investasi finansial), pada umumnya peran investasi finansial lebih dominan dibandingkan dengan investasi non finansial. Tahun 2010 kontribusi yang diberikan investasi finansial terhadap total investasi mencapai 61,3 persen. Namun pada tahun 2011 kontribusinya sedikit turun menjadi 56,2 persen. Penurunan tersebut disebabkan adanya peningkatan kontribusi investasi non finansial yaitu dari 38,7 persen di tahun 2010 menjadi 43,8 persen di tahun 2011. Disamping itu investasi finansial pada tahun 2011 juga mengalami perlambatan pada beberapa instrumen, yaitu: cadangan valas pemerintah, klaim dalam valas lainnya,

modal saham dan penyertaan, dan rekening antar bank. Selama periode 2006-2011 nilai investasi Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat, walaupun sempat mengalami penurunan akibat krisis perekonomian yang melanda tahun 2008.

Pada investasi non finansial (INF) selama tahun 2006 – 2011, secara sektoral, sektor perusahaan (swasta dan perusahaan pemerintah) mengambil peran yang sangat dominan dalam melakukan INF. Hal ini terlihat jelas dari besarnya dana untuk investasi ini yang mencapai Rp 1.873,84 triliun pada tahun 2011 (76,99 persen dari nilai INF yang dilakukan oleh seluruh sektor). Besarnya nilai INF yang dikeluarkan oleh sektor ini merupakan salah satu ciri khas dari sektor ini, dimana untuk menjamin kegiatan ekonominya dapat berjalan dengan baik, biasanya diperlukan investasi yang cukup besar dalam bentuk investasi non finansial (berupa barang modal dan stok).

Hal sebaliknya terjadi pada sektor keuangan (bank dan bukan bank), dimana INF yang dilakukan sangat tidak berarti. Hal ini disebabkan investasi yang dominan dilakukan di sektor ini sebagian besar dalam bentuk investasi finansial, seperti giro, deposito, surat berharga (saham dan obligasi) swasta, surat utang negara, dan sebagainya.

Selama tahun 2011 investasi finansial mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2010. Investasi finansial yang tercipta pada tahun 2011 sebesar Rp4.022,98 triliun atau turun 5,8 persen dibandingkan tahun 2010. Perubahan ini terkait dengan kondisi perekonomian global yang tengah melanda hampir seluruh daratan Eropa serta Amerika Serikat. Hal ini berakibat secara langsung terhadap kinerja pasar keuangan domestik. Selama tahun 2011 saham masih menjadi instrumen yang paling menarik untuk berinvestasi, dimana kontribusinya terhadap investasi finansial adalah paling besar yaitu 30,52 persen atau senilai Rp. 1.227,72 triliun. Kemudian diikuti kredit serta uang dan simpanan masing-masing dengan kontribusi 17,34 persen dan 12,90 persen.

Berkaitan dengan kepemilikan investasi, menarik untuk disimak bagaimana pola kegiatan investasi dari investor asing di pasar keuangan domestik. Investor asing selama tahun 2011 telah menguasai beberapa instrumen finansial, diantaranya dalam surat berharga lainnya (obligasi swasta), penyertaan, kredit dalam valas, dan surat berharga pemerintah. Bahkan dalam surat berharga lainnya, sektor ini juga menampung kepemilikan sektor lain yang dilepas (selain menambah surat berharga dari sektor yang menerbitkannya). Sehingga kepemilikan investor asing untuk instrumen ini mencapai 113,95 persen.

S-I Gap (Saving Investment Gap) dapat menggambarkan kemampuan suatu sektor untuk memberikan pinjaman bagi sektor lain (*net lending*) atau memperoleh hutang dari sektor lain (*net borrowing*) dalam membiayai investasi non finansialnya. Selama tahun 2006 – 2011, sektor Perusahaan senantiasa mengalami *net borrowing*. Kekurangan dana tersebut dapat disediakan oleh sektor domestik lainnya, terutama sektor Rumah Tangga. Jika sektor domestik lainnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dana tersebut, maka akan dipenuhi dari sektor LN. Kondisi tersebut dapat terlihat pada tahun 2007, 2009, 2010, dan 2011. Namun pada tahun 2006 dan 2008, sektor domestik mengalami *net lending*, sedangkan sektor LN mengalami *net borrowing*. Hal ini berarti pada tahun 2006 misalnya, sektor domestik mampu memberi pinjaman kepada sektor LN sebesar Rp38,46 triliun. Berbeda dengan sektor Perusahaan yang merupakan sektor defisit, sektor Rumah Tangga dan Keuangan adalah sektor surplus. Sektor-sektor ini memiliki kemampuan untuk memberi pinjaman kepada sektor lain yang kekurangan dana, bahkan ke sektor LN sekalipun. Selama tahun 2006 – 2011 rata-rata surplus sektor Rumah Tangga mencapai Rp169,15 pertahun, dan rata-rata surplus sektor Keuangan hanya sebesar Rp55,61 triliun pertahun. Sedangkan rata-rata defisit pada sektor Perusahaan adalah sebesar Rp260,71 triliun pertahun. Sehingga selama periode tersebut masih diperlukan tambahan dana dari sektor LN untuk menutupi kekurangan dana pada sektor perusahaan.

Peran intermediasi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam LKBB (Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Dana Pensiun, dan Perusahaan Pegadaian) cukup strategis dan berpotensi besar dalam mempengaruhi terjadinya transaksi investasi secara keseluruhan.

Selama tahun 2011, tabungan bruto yang tercipta oleh LKBB bertambah sebesar Rp15,41 triliun¹ atau 0,63 persen dari total tabungan bruto. Penambahan tabungan bruto tersebut masih dibawah penambahan tabungan bruto pada tahun sebelumnya yang meningkat sebesar Rp 22,56 triliun. Tabungan bruto LKBB sebagian besar berasal dari sektor Asuransi yang porsinya mencapai 50,28 persen dari total tabungan bruto LKBB. Pada saat yang sama investasi non finansialnya selama tahun 2011 justru berkurang sebesar Rp4,28 triliun, jauh dibawah tahun sebelumnya yang meningkat sebesar Rp13,58 triliun. Akibatnya pinjaman neto (*S-I gap*) sektor LKBB selama tahun 2011 meningkat sebesar Rp19,69 triliun. Namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, *S-I gap* ini turun sebesar 119,25 persen. *S-I gap* yang terjadi pada LKBB di tahun 2011 ini lebih

1 turun 31,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

banyak disebabkan oleh kenaikan *S-I gap* pada sektor Perusahaan Pembiayaan (PP) sebesar Rp9,50 triliun atau 48,25 persen dari *S-I gap* LKBB.

Hampir sebagian besar aset yang dimiliki LKBB adalah dalam bentuk aset finansial. Selama tahun 2011 LKBB menambah investasi finansialnya dalam berbagai instrumen sebesar Rp174,59 triliun. Selain menambah investasi finansialnya, sektor ini juga mengurangi investasi finansialnya di beberapa instrumen sebesar Rp13,36 triliun. Sehingga secara neto masih terjadi penambahan investasi finansial sebesar Rp161,23 triliun atau meningkat sebesar 7,82 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari segi pembiayaan investasi, sektor-sektor LKBB menggunakan berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Sumber pembiayaan internal yang terjadi (berupa dari *S-I gap*) selama tahun 2011 sebesar Rp19,69 triliun. Sedangkan selama tahun 2011, LKBB mampu mendapatkan sumber dana eksternal (berasal dari transaksi di pasar keuangan) sebesar Rp141,71 triliun. Sebagian besar sumber dana eksternal tersebut berupa cadangan asuransi dan pensiun yang bertambah sebesar Rp44,04 triliun. Peningkatan yang terjadi pada instrumen tersebut disebabkan meningkatnya kewajiban tersebut di Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Dana Pensiun masing-masing sebesar Rp33,22 triliun, dan Rp10,82 triliun.

Uang beredar luas (M2) yang terdiri dari uang beredar sempit (M1), uang kuasi, dan surat berharga selain saham, posisinya pada suatu periode sangat dipengaruhi oleh posisi dari uang kuasi. Selama periode 2006-2011 kontribusi uang kuasi terhadap pembentukan M2 rata-rata sebesar 74,70 persen. Sedangkan rata-rata kontribusi M1 terhadap M2 sebesar 25,03 persen. Sisanya sebesar 0,27 persen berasal dari surat berharga selain saham. Akan tetapi pertumbuhan M1 meningkat lebih pesat dibandingkan pertumbuhan uang kuasi. Selama periode 2006 – 2011 M1 tumbuh rata-rata sebesar 18,15 persen sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan uang kuasi yang rata-rata tumbuh sebesar 14,95 persen. Hal ini mencerminkan bahwa M1 lebih diminati untuk dimiliki oleh masyarakat dibandingkan uang kuasi².

Velocity of Money (V) merupakan suatu ukuran yang biasanya digunakan untuk melihat kecepatan perputaran uang beredar. Jika *V* rendah artinya perputaran uang yang beredar lambat atau dengan kata lain masyarakat memegang uang lebih lama sebelum uang itu akhirnya digunakan untuk transaksi. Sebaliknya, jika *V* tinggi berarti terjadi perputaran uang yang sangat cepat atau masyarakat tidak berlama-lama untuk

2 yang terdiri dari simpanan berjangka, tabungan, dan simpanan giro valas

menggunakan uang dalam melakukan transaksi. Secara umum *Velocity of Money* diukur dengan menghitung rasio PDB terhadap M1.

Kondisi *velocity of money* di Indonesia selama periode 2006 – 2011 menunjukkan angka yang relatif rendah hanya berada di kisaran angka 9,20 – 11,39. Perlambatan perputaran uang beredar yang terjadi disebabkan pertumbuhan pada kedua variabel tersebut sangat berfluktuasi serta tidak sejalan antara satu dengan lainnya. Pertumbuhan PDB atas dasar harga berlaku cenderung mengalami kontraksi. Sedangkan pertumbuhan M1 cenderung mengalami kenaikan sebelum terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 2008.

Disisi lain, pendalaman sektor Keuangan (*financial deepening*) merupakan salah satu langkah penting dalam upaya mengembangkan pasar keuangan suatu negara. Memperdalam pasar keuangan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menarik eksekus likuiditas di perekonomian dan memperkecil risiko gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan yang berasal dari gejolak nilai tukar maupun fluktuasi di pasar saham atau obligasi. Indikator untuk melihat kedalaman sektor keuangan adalah rasio M2/PDB,

Financial deepening Indonesia selama periode 2006 – 2011 menunjukkan sektor Keuangan Indonesia masih dangkal (*shallow*) dibanding beberapa negara utama di kawasan Asia. *Financial deepening* terus menunjukkan penurunan sejak krisis 1997/1998. Krisis keuangan global pada tahun 2008 terlihat semakin menurunkan rasio tersebut. Pada akhir tahun 2008 dan 2009, rasio M2/PDB Indonesia mencapai titik terendah selama periode 2006 – 2011 yaitu sebesar 38,31 persen dan 38,20. Namun seiring dengan berbagai kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah, rasio tersebut sedikit demi sedikit mengalami peningkatan.

Pada sisi lain, kondisi sektor Keuangan yang dangkal memungkinkan Indonesia dapat meminimalisir dampak krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 dan 2011. Sektor Keuangan Indonesia yang dangkal menjadikan sistem keuangan Indonesia sedikit terisolasi dari tekanan depresiasi atas beragamnya aset finansial yang berasal dari luar negeri, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap dampak krisis keuangan global.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan investasi sangat dirasakan oleh semua sektor produksi guna memperbesar penciptaan nilai tambah dan memacu laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan investasi tersebut, berbagai dana diperlukan guna membiayainya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti pinjaman dan hibah.

Proses pembiayaan investasi dalam pelaksanaannya memerlukan peran lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan lainnya, sebagai perantara yang menghubungkan penyedia dana (selanjutnya disebut sebagai sektor surplus) dengan sektor yang membutuhkan dana (sektor defisit)¹. Peranan lembaga keuangan ini pada masa lalu kurang begitu menonjol. Sedangkan di lain pihak penyedia dana hanya melakukan investasi finansialnya pada instrumen-instrumen yang masih terbatas seperti tabungan dan deposito. Akibatnya belum semua dana digunakan secara optimal untuk pembiayaan investasi. Sementara itu sektor produksi (investor) masih mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber dananya.

Melihat kenyataan tersebut, pemerintah sejak permulaan dasawarsa 1980 mulai melakukan reformasi ekonomi khususnya di bidang perbankan, misalnya penentuan tingkat suku bunga. Dengan demikian, pemilik dana dapat melakukan investasi finansial dengan pilihan yang lebih luas dan menarik. Di samping itu, dengan meningkatnya kegiatan pasar modal yang ditunjukkan oleh makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang "*go-public*", menyebabkan para pemilik dana mempunyai alternatif tambahan dalam berinvestasi finansial yang bersifat langsung yaitu dengan cara membeli saham dan sertifikat di pasar modal. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi sekarang ini, arus finansial dari sektor surplus ke sektor defisit melalui instrumen-instrumen yang ada menjadi tidak sederhana lagi. Perubahan-perubahan yang begitu cepat dalam sektor finansial ini perlu dicatat dan dipantau secara berkala dalam satu sistem data yang lengkap, komprehensif dan konsisten sehingga berguna sebagai masukan dalam

¹ Dalam kaitan neraca arus dana, sektor surplus merupakan sektor yang memiliki tabungan lebih besar dari kebutuhan investasi realnya, sebaliknya disebut sektor defisit. Selanjutnya investasi riil merupakan besarnya pembentukan modal yang dilakukan oleh masing-masing sektor.

menentukan arah kebijakan ekonomi dan moneter secara lebih tepat. Sistem data tersebut selanjutnya disebut Neraca Arus Dana (NAD).

Selama ini sistem data mengenai statistik produksi dan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian nasional (sektor riil) telah disajikan secara berkala baik dalam Statistik Pendapatan Nasional, Tabel Input-Output Indonesia, maupun dalam bentuk neraca-neraca lainnya.² Sebagian besar neraca-neraca ini hanya menggambarkan besarnya produksi, nilai tambah, pengeluaran konsumsi dan pembentukan modal yang terjadi di masing-masing sektor. Gambaran mengenai bagaimana sektor-sektor ini memperoleh dan memanfaatkan tabungannya, baik untuk membiayai investasi riil maupun untuk investasi finansial belum tercakup di dalam sistem tersebut. Demikian pula sektor-sektor yang terpaksa melakukan pinjaman untuk membiayai investasi riil karena tabungannya tidak memadai, serta jenis-jenis instrumen finansial apa yang digunakan untuk melakukan pinjaman tersebut belum tergambarkan dalam neraca-neraca di atas. Neraca Arus Dana mencoba mencatat seluruh transaksi ini dari sisi finansialnya, sehingga arus finansial yang terjadi dari sektor surplus ke sektor defisit dapat tergambarkan. Arus finansial tersebut akan merefleksikan perubahan harta dan kewajiban finansial melalui perubahan instrumen-instrumen seperti tabungan, pembelian saham, perubahan uang kas, hutang, piutang dan sebagainya.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan di atas, Badan Pusat Statistik pada tahun 1987 telah membuat suatu studi mengenai *Neraca Arus Dana Indonesia* untuk tahun 1980. Walaupun data yang digunakan masih sangat terbatas, namun usaha ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan NAD yang sebenarnya.

Pada tahun 1991, untuk pertama kalinya telah berhasil disusun NAD Indonesia 1984-1988, yang merupakan hasil kerja Tim Teknis yang terdiri dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Untuk menghasilkan publikasi tersebut, Tim Teknis telah bekerja selama lebih kurang dua tahun dengan dukungan biaya dan konsultan dari Bank Dunia/IBRD.

Berdasarkan pengalaman penyusunan tersebut, kini Tim Teknis telah dapat menyusun secara berkala NAD Indonesia. Publikasi NAD ke-22 ini mencakup periode

² Keseluruhan neraca tersebut dibuat berdasarkan Sistem Neraca Nasional (SNA), yang disarankan oleh PBB, United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No. 2, New York 1968.

2006-2011, yang merupakan kelanjutan dari publikasi sebelumnya. Pada masa mendatang usaha untuk memperbaiki sistem NAD baik dari segi mutu maupun analisisnya terus dikembangkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana telah disebutkan bahwa publikasi Neraca Arus Dana Indonesia 2006-2011 merupakan publikasi kedua puluh yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, sebagai realisasi dari hasil kerja Tim Penyusun NAD Indonesia. Penerbitan publikasi ini mempunyai tujuan antara lain:

- a. Memperkenalkan wawasan penggunaan sistem data makro, yang berkaitan dengan arus penyediaan dan penggunaan dana antar sektor.
- b. Melengkapi sistem data neraca nasional yang selama ini terus dikembangkan dan disempurnakan oleh Badan Pusat Statistik.
- c. Menyebarkan data dan informasi yang terdapat di dalam neraca arus dana sebagai bahan referensi bagi para pengguna data khususnya di bidang ekonomi moneter.
- d. Menyajikan analisis deskriptif yang berkaitan dengan neraca pembiayaan sektoral, keterkaitan finansial antar sektor, *velocity of income*, dan penyebab “*financial deepening*” berdasarkan data NAD 2006-2011.
- e. Dasar untuk bahan perbaikan dan penyempurnaan penyusunan NAD Indonesia pada tahun-tahun yang akan datang.

1.3 Sistematika Penulisan

Penulisan NAD tahunan ini disusun berdasarkan sistematika berikut:

- Bab I: Pendahuluan, menguraikan permasalahan yang melatarbelakangi tulisan ini, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- Bab II: Kerangka Teori Neraca Arus Dana, menguraikan mengenai definisi dan kerangka teori NAD. Selain itu dijelaskan pula hubungan NAD dengan sistem neraca nasional. Kegunaan dan keterbatasan NAD akan dijelaskan pula di akhir bab ini.
- Bab III: Neraca Arus Dana Indonesia, membahas mengenai kerangka NAD Indonesia, sumber data, dan metode penyusunan.

Bab IV: Analisis Deskriptif Neraca Arus Dana Indonesia, menguraikan secara deskriptif mengenai Gambaran Umum Perekonomian Indonesia Tahun 2011, Perkembangan Tabungan Bruto, Perkembangan Investasi, Tinjauan NAD Sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 2011, Percepatan Uang Beredar (*Velocity of Money*) dan Pendalaman Sektor Keuangan (*Financial Deepening*).

<http://www.bps.go.id>

BAB II KERANGKA TEORI NERACA ARUS DANA

2.1 Penjelasan Umum

Neraca Arus Dana (NAD) merupakan suatu sistem data yang dirancang untuk memperlihatkan transaksi finansial³ antar berbagai sektor ekonomi, misalnya: pemerintah, perusahaan pemerintah, asuransi, bank umum, perusahaan swasta non finansial, dan sebagainya. Setiap sektor dalam NAD memiliki seperangkat sumber dan penggunaan dana yang dibentuk oleh adanya pembelian dan penjualan berbagai jenis instrumen finansial, seperti: deposito, obligasi, pinjaman, dan sebagainya. Instrumen finansial ini merupakan komponen harta atau kewajiban finansial dari masing-masing sektor. Karena memasukkan sektor luar negeri sebagai salah satu sektornya, maka disebut juga sebagai sistem yang terbuka untuk setiap transaksi. Dengan kata lain, setiap pembelian instrumen finansial pada suatu sektor akan menjadi penjualan di sektor lain. NAD juga dapat dilihat sebagai suatu perangkat data yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana tabungan dihubungkan dengan sektor-sektor surplus dan defisit.

NAD merupakan salah satu bagian dari sistem neraca nasional. Sistem ini mencakup semua neraca yang menggambarkan seluruh aspek kegiatan ekonomi dalam bentuk terpadu (*integrated accounts*). Termasuk dalam sistem ini adalah neraca pendapatan nasional, neraca pembayaran, tabel input-output, dan neraca sosial ekonomi. Seluruh neraca-neraca itu menggambarkan berbagai ragam aspek kegiatan ekonomi. Neraca pendapatan nasional dan tabel input-output menggambarkan kegiatan produksi atau pembelian dan penjualan barang dan jasa sehingga dikenal juga dengan sebutan neraca riil. Sedangkan NAD sebagai neraca modal dalam neraca pembayaran menunjukkan neraca keuangan yang memungkinkan terjadinya kegiatan di sektor riil.

Bab ini menjelaskan secara umum kerangka teori dan cara penyusunan NAD. Selain itu akan diuraikan pula kedudukan NAD dalam sistem neraca nasional. Bagi para pengguna NAD, diberikan pula uraian tentang kegunaan NAD untuk perencanaan dan analisis ekonomi makro. Sedangkan pada akhir bab ini diuraikan beberapa masalah dan keterbatasan NAD.

³ Transaksi finansial adalah transaksi yang dicerminkan oleh instrumen-instrumen finansial dalam neraca akhir tahun.

2.2 Kerangka Teori NAD

Secara sederhana, NAD menggambarkan bagaimana tabungan dalam perekonomian digunakan untuk membiayai investasi. Dalam ekonomi makro ada satu persamaan yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan tabungan sama dengan investasi, tetapi persamaan ini tidak berlaku untuk masing-masing sektor ekonomi secara terpisah. Untuk ekonomi secara keseluruhan, pendapatan (Y) sama dengan konsumsi (C) ditambah investasi (I) atau $Y = C + I$. Jika tabungan (S) didefinisikan sebagai $S = Y - C$, maka $S = I$.

Umumnya pendapatan sektor Rumah Tangga secara makro selalu lebih besar dari pengeluaran, sebaliknya sektor Swasta Non Finansial selalu defisit. Dengan demikian, sektor Swasta Non Finansial harus meminjam dari sektor Rumah Tangga. Sektor lainnya, misalnya Bank, merupakan perantara keuangan yang menghimpun dana dari beberapa sektor dan menyalurkannya ke sektor lain. NAD menyediakan data keuangan secara rinci mengenai pinjam-meminjam tersebut melalui berbagai instrumen finansial.

Data NAD biasanya disajikan dalam bentuk matriks. Kolomnya menggambarkan sektor dan barisnya menggambarkan berbagai jenis instrumen finansial. Setiap sektor mempunyai dua kolom, yaitu kolom pertama menunjukkan perubahan harta (penggunaan dana) dan kolom kedua menyatakan perubahan kewajiban (sumber dana). Kenaikan jumlah harta maupun kewajiban suatu sektor dicerminkan oleh arus finansial positif, sebaliknya penurunan harta atau kewajiban ditunjukkan oleh arus finansial negatif. Arus tersebut menunjukkan konsep "*net*" dalam pengertian bahwa suatu sektor dapat mempunyai arus yang berasal dari transaksi bulanan, harian dan mungkin untuk instrumen finansial tertentu dapat terjadi setiap saat. Padahal NAD hanya mencatat perubahan dalam setahun. Konsep net semacam ini, secara sederhana diperoleh dengan cara mengurangkan neraca akhir dan awal tahun, dengan mengabaikan masalah revaluasi.

Tabel 2.1 menggambarkan contoh NAD yang disederhanakan. Dalam contoh ini ada lima sektor yang ditampilkan yaitu sektor Keuangan, Rumah Tangga, Pemerintah, Bisnis dan Luar Negeri. Sektor Luar Negeri memperlihatkan transaksi antara bukan penduduk dan penduduk Indonesia. Selain itu, dalam contoh ini hanya mencantumkan beberapa jenis kategori transaksi.

**TABEL 2.1 NERACA ARUS DANA SEDERHANA
(Triliun Rupiah)**

TRANSAKSI	KEUANGAN		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH		BISNIS		LUAR NEGERI		TOTAL	
	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
0100 Tabungan Bruto		1		19		6		15		3		44
0200 Perolehan Barang Modal	1		9		8		26		0		44	
0300 Pinjaman Neto	0		10		-2		-11		3		0	
0400 Selisih Statistik	0		2		-1		0		-1		0	
0500 Inv. Finansial Neto	0		8		-1		-11		4		0	
0600 Jumlah Penggunaan Finansial	14		12		5		13		16		60	
0700 Jumlah Sumber Finansial		14		4		6		24		12		60
0800 Cadangan Valas		1							1		1	1
1000 Deposito		6	3		3		1		-1		6	6
1100 Surat Berharga (Jangka Pendek)	1	3			1		1				3	3
1200 Pinjaman	13			4		4		6	11	10	24	24
1300 Modal dan Penyertaan			2		1			4	1		4	4
1400 Surat Berharga (Jangka Panjang)						-1			-1		-1	-1
1500 Cadangan Asuransi dan Pensiun		2	2								2	2
1800 Kredit Dagang							11	10	1	2	12	12
9000 Rupa-rupa		2	5			3		4	4		9	9

Keterangan : P = Penggunaan, dan S = Sumber

Pemahaman data pada tabel 2.1 dapat dilakukan secara sederhana. Sektor Rumah Tangga mempunyai kelebihan pendapatan atas pengeluarannya, sehingga menghasilkan tabungan bruto sebesar 19 triliun rupiah, sedangkan tabungan bruto sektor Pemerintah hanya sebesar 6 triliun rupiah. Sektor Rumah Tangga, melakukan investasi atau pengeluaran untuk pembentukan modal sebesar 9 triliun rupiah, sisanya dipinjamkan kepada sektor lain yang tercermin pada kewajiban di sektor-sektor lain. Penambahan harta finansial di sektor Rumah Tangga berupa Deposito, Modal dan Penyertaan, Cadangan Asuransi dan Pensiun, serta Rupa-rupa masing-masing sebesar 3, 2, 2, dan 5 triliun rupiah. Keseluruhan tambahan harta di sektor Rumah Tangga atau jumlah penggunaan finansial mencapai jumlah 12 triliun rupiah. Pada saat yang bersamaan rumah tangga menambah kewajiban finansialnya berupa pinjaman sebesar 4 triliun rupiah. Berdasarkan persamaan akuntansi, Pinjaman Neto harus sama dengan Investasi Finansial Neto, karena Pinjaman merupakan tagihan pada sektor lain. Adanya selisih

statistik disebabkan karena kedua kategori tersebut diestimasi dari sumber data yang berbeda. Pinjaman Neto diperoleh dari neraca riil, sedangkan Investasi Finansial Neto dari neraca finansial. Pada tabel 2.1 untuk sektor Rumah Tangga tampak bahwa Pinjaman Neto sebesar 10 triliun rupiah dan Investasi Finansial neto 8 triliun rupiah, atau terdapat selisih statistik sebesar 2 triliun rupiah. Perilaku sektor Bisnis berbeda dengan Rumah Tangga. Sektor ini memperoleh dana dari hasil operasinya berupa laba ditahan dan penyusutan, yang menghasilkan Tabungan Bruto sebesar 15 triliun rupiah. Pembentukan Modal sektor Bisnis sebesar 26 triliun rupiah melebihi dana yang diperoleh dari tabungannya. Akibatnya sektor ini harus menutupi kekurangan sumber dana finansialnya sebesar 11 triliun rupiah. Kenyataan ini dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah kewajiban finansial sebesar 24 triliun rupiah. Sebagian dari dana tersebut (13 triliun rupiah) digunakan untuk membeli harta finansial dan sisanya sebesar 11 triliun rupiah merupakan pinjaman neto. Pada tabel 2.1 tampak bahwa untuk sektor Bisnis, Pinjaman Neto sama dengan Investasi Finansial Neto, sehingga selisih statistiknya sama dengan nol.

Sektor Keuangan biasanya tidak banyak menghasilkan dana sendiri dalam melakukan kegiatan usahanya, tetapi peranan sektor ini sangat besar bagi kegiatan pasar finansial, khususnya bertindak sebagai perantara dalam menyalurkan dana dari sektor surplus ke sektor defisit. Dalam tabel 2.1 terlihat bahwa sektor ini hanya menghasilkan dana dari kegiatannya berupa Tabungan Bruto sebanyak 1 triliun rupiah, sama dengan penggunaan untuk pembentukan modal, sehingga pinjaman netonya sama dengan nol. Namun jumlah penambahan harta finansial sektor Keuangan cukup besar, yaitu sebesar 14 triliun rupiah yang berasal dari surat berharga jangka pendek sebesar 1 triliun rupiah dan pinjaman sebesar 13 triliun rupiah. Sumber dana atau penambahan jumlah kewajibannya juga sebesar 14 triliun rupiah yang merupakan pertambahan kewajiban Deposito sebesar 6 triliun rupiah dan sisanya 8 triliun rupiah merupakan gabungan dari jenis kewajiban lainnya. Perbedaan antara penambahan harta dan kewajiban sama dengan nol, begitu pula Pinjaman Neto dan selisih statistiknya.

Pemerintah menjalankan kegiatannya dengan surplus berjalan sebesar 6 triliun rupiah, tetapi melakukan investasi harta nonfinansial (pembentukan modal) sejumlah 8 triliun rupiah, sehingga pemerintah membutuhkan pinjaman sebesar 2 triliun rupiah. Dari sisi kewajiban (sumber), sektor ini menambah pinjamannya sebesar 4 triliun rupiah dan

3 triliun rupiah berupa kewajiban lainnya. Di samping itu, terjadi pula penerimaan kembali Obligasi Pemerintah yang menyebabkan penurunan kewajiban sebesar 1 triliun rupiah. Dengan demikian jumlah seluruh penambahan kewajiban sektor Pemerintah menjadi 6 triliun rupiah. Kalau dilihat dari sisi harta (penggunaan), jumlah penggunaan finansialnya sebesar 5 triliun rupiah yang terdiri penambahan Deposito, Surat Berharga Jangka Pendek, dan Penyertaan Modal. Perbedaan antara jumlah penggunaan dan sumber finansial adalah $5 \text{ triliun rupiah} - 6 \text{ triliun rupiah} = \text{minus} 1 \text{ triliun rupiah}$. Pada hal Pinjaman Netonya minus 2 triliun rupiah, sehingga menimbulkan selisih statistik minus 1 triliun rupiah.

Sektor Luar Negeri sebenarnya memperlihatkan beberapa bagian dari neraca pembayaran Indonesia yang sudah ditransformasikan ke dalam bentuk NAD. Defisit neraca berjalan Indonesia dengan luar negeri sebesar 3 triliun rupiah (lihat Tabel 2.1). Angka ini menunjukkan surplus sebesar 3 triliun rupiah dari sudut pandang luar negeri dan besaran ini dimasukkan pula ke dalam kategori Tabungan Bruto, karena dalam NAD, sektor ini tidak mempunyai investasi riil. Dalam NAD, sektor Luar Negeri mempunyai klaim finansial atas modal fisik, tidak dalam pembentukan modal secara langsung, sehingga nilainya sama dengan nol. Pada sisi penggunaan, sektor ini meningkatkan jumlah harta finansialnya sebesar 16 triliun rupiah, dengan komponen terbesar berbentuk pinjaman sejumlah 11 triliun rupiah. Sebaliknya jumlah sumber finansialnya atau penambahan kewajiban terhadap Indonesia sejumlah 12 triliun rupiah. Dengan demikian investasi finansial netonya $16 - 12 = 4 \text{ triliun rupiah}$ tidak sama dengan Pinjaman Netonya (3 triliun rupiah), sehingga terjadi selisih statistik sejumlah 1 triliun rupiah.

Dua kolom terakhir memperlihatkan jumlah masing-masing kategori transaksi. Jika dibaca menurut baris menunjukkan jumlah transaksi masing-masing jenis instrumen finansial dalam periode bersangkutan. Satu instrumen finansial dicatat dua kali, satu sebagai harta dan satu lagi sebagai kewajiban. Dengan kata lain, setiap harta finansial suatu sektor merupakan kewajiban finansial sektor lainnya. Sebagai contoh jumlah seluruh harta berupa pinjaman yang diberikan sama dengan jumlah seluruh pinjaman yang diterima (kewajiban) oleh seluruh sektor, yaitu sebesar 24 triliun rupiah (ditunjukkan dalam Tabel 2.1 pada dua kolom terakhir untuk baris pinjaman). Hal yang sama dapat pula dilihat untuk kategori transaksi lainnya. Dua kolom terakhir ini juga menunjukkan bahwa jumlah tabungan bruto sama dengan jumlah perolehan harta non finansial atau investasi riil sebesar 44 triliun rupiah.

Dari uraian di atas tampak adanya keterkaitan antar sektor yang disajikan dalam matriks NAD. Misalnya Deposito, yang merupakan kewajiban sektor keuangan meningkat sebesar 6 triliun rupiah. Peningkatan kewajiban sektor ini harus diimbangi dengan peningkatan pemilikan harta pada instrumen yang sama oleh sektor-sektor lainnya. Pada tabel 2.1, jika dibaca sepanjang baris deposito, tampak bahwa sektor Rumah Tangga dan Pemerintah menambah hartanya masing-masing sebesar 3 triliun rupiah, sektor Bisnis menambah 1 triliun rupiah, sedangkan sektor Luar Negeri menurunkan hartanya sebanyak 1 triliun rupiah.

Berdasarkan kerangka NAD dalam beberapa kasus memungkinkan untuk melihat keterkaitan sektor pada dua sisi transaksinya. Misalnya (tidak tampak dalam Tabel 2.1), Ccadangan Aasuransi Jjiwa hanya boleh menjadi kewajiban (sisi sumber) sektor Asuransi dan sebaliknya merupakan harta (sisi penggunaan) bagi sektor Rumah Tangga. Ternyata hubungan semacam ini tidak seluruhnya dapat ditangkap dalam penyajian NAD.⁴

Jika tabel 2.1 diperhatikan kembali, kenaikan harta berupa modal pada sektor Rumah Tangga sebesar 2 triliun rupiah mungkin berasal dari Modal Saham tahun yang lalu dan Modal yang disimpan oleh sektor Keuangan atau benar-benar dari saham perusahaan yang baru dikeluarkan atau mungkin juga kombinasi dari keduanya.

2.3 Neraca Arus Dana dalam Sistem Neraca Nasional

Pada sistem neraca nasional (*integrated system of national accounts*) setidaknya menyajikan 4 (empat) neraca pokok yaitu: neraca produksi, neraca pendapatan dan pengeluaran, neraca modal dan neraca luar negeri. Neraca produksi memperlihatkan bagaimana nilai tambah diciptakan oleh ekonomi, baik menurut lapangan usaha maupun menurut komponen penggunaannya. Neraca pendapatan dan pengeluaran memperlihatkan besarnya tabungan yang merupakan selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya neraca modal memperlihatkan berapa besar kemampuan tabungan dalam membiayai pembentukan modal dan berapa pinjaman neto yang harus dilakukan. Sedangkan neraca luar negeri memperlihatkan transaksi dengan Luar Negeri, baik dalam bentuk barang dan jasa (ekspor dan impor) maupun dalam bentuk pinjaman dan transfer modal.

⁴ Sebenarnya NAD dapat disajikan dalam dua cara. Pertama, menyajikan data mengenai sumber dan penggunaan dana menurut instrumen finansial dan sektor. Kelemahan penyajian menurut cara ini adalah tidak dapat diketahui secara langsung hubungan antar sektor atau dari siapa kepada siapa suatu instrumen finansial itu diperjual-belikan. Untuk mengatasi kelemahan ini dibuat cara penyajian kedua, yang menyajikan NAD antar sektor. Contoh penggunaannya diberikan dalam Bab IV.

Bila sistem neraca nasional dikaitkan dengan sistem neraca arus dana, maka ada dua neraca yang mempunyai hubungan erat, yaitu neraca pendapatan dan pengeluaran dengan neraca modal. Dari neraca pendapatan dan pengeluaran dapat diturunkan Tabungan Bruto, sedangkan dari neraca modal dapat diturunkan Pembentukan Modal Tetap dan Pinjaman Neto. Dalam NAD, pinjaman neto ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk perubahan instrumen-instrumen baik di sisi penggunaan maupun sumber.

Neraca Pendapatan dan Pengeluaran (*Income and Outlay Accounts*) pada intinya merupakan gabungan dari neraca Pendapatan dan Pengeluaran sektoral, yang dalam beberapa hal dapat disetarakan dengan laporan rugi laba perusahaan. Pada sistem neraca ini juga berlaku suatu persamaan yang menunjukkan bahwa pengeluaran suatu sektor merupakan pendapatan di sektor lainnya. Selisih antara pendapatan dan pengeluaran sama dengan tabungan (bisa positif maupun negatif). Istilah pengeluaran yang digunakan di sini tidak termasuk pengeluaran untuk harta finansial maupun non finansial (disebut *current expenditure*). Angka tabungan yang berasal dari Neraca Pendapatan dan Pengeluaran selanjutnya dicatat pada Neraca Modal (*Capital Finance Accounts*) yang mencatat sumber dan penggunaan dana menurut rincian transaksi modal. Neraca terakhir ini mencatat Tabungan Bruto dan Pembentukan Modal Bruto atau harta riil yang terdiri dari Pembentukan Modal Tetap Bruto ditambah Perubahan Inventori. NAD juga mencatat pembelian neto barang tak berwujud, seperti: Hak Paten dan Nama Baik (*Goodwill*), walaupun data semacam itu tidak lengkap atau belum tersedia saat ini.

Jumlah sektor dalam Neraca Pendapatan dan Pengeluaran, dan Neraca Modal lebih sedikit dibandingkan jumlah sektor dalam NAD, bahkan untuk beberapa negara yang sudah menyusunnya, beberapa sektor NAD hanya diwakili oleh satu sektor saja. NAD juga mempunyai kaitan dengan sistem neraca pembayaran. Dalam NAD, surplus/defisit pada neraca pembayaran adalah negatif/positif pada tabungan di sektor Luar Negeri. Bagian Neraca Modal dalam Neraca Pembayaran mencatat transaksi luar negeri menurut instrumen finansial. NAD juga mencatat hal yang serupa tetapi mungkin berbeda dalam kategori dan rinciannya.

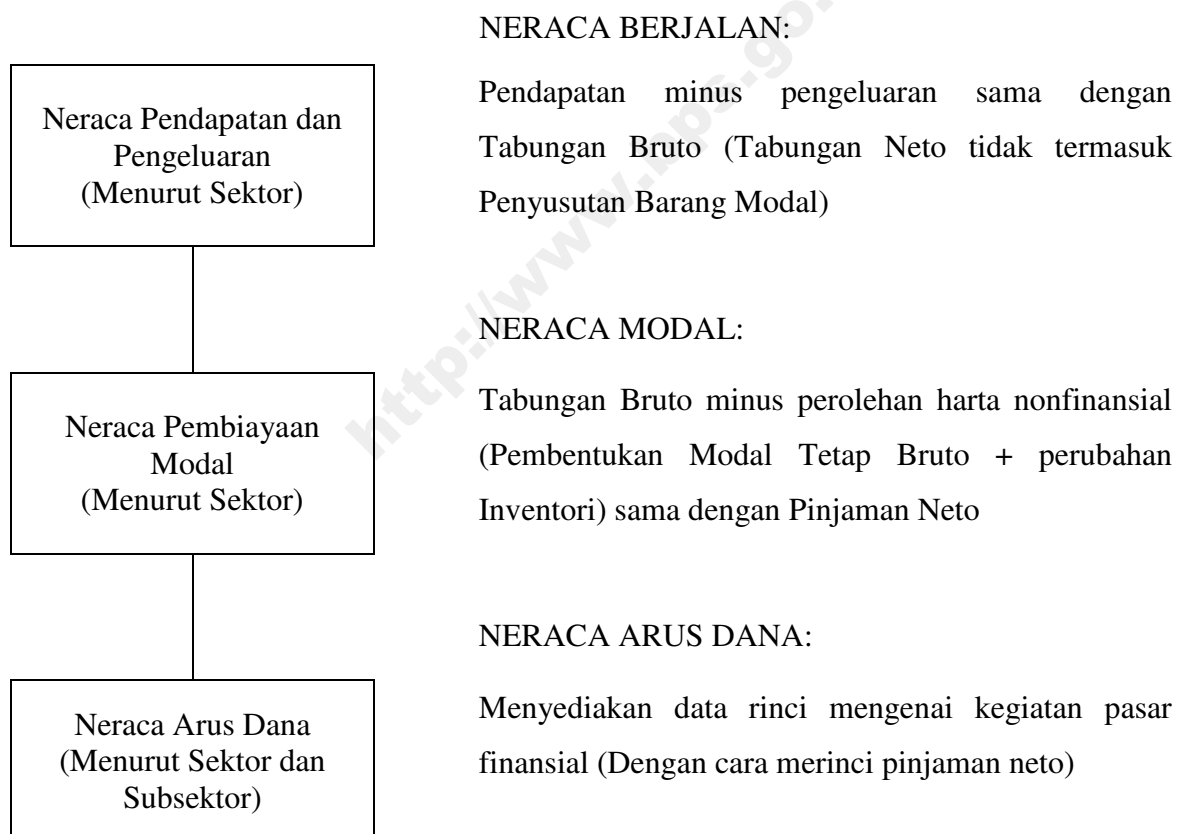
Tujuan penyusunan NAD adalah menyediakan data rinci mengenai kegiatan pinjam-meminjam yang terjadi dari beberapa sektor surplus ke beberapa sektor defisit lainnya dalam pasar finansial. Dalam terminologi ekonomi, NAD didefinisikan sebagai suatu sistem data keuangan yang menyajikan data keuangan yang rinci sekaligus konsisten dengan data dari neraca riil (tabungan dan investasi) yang berasal dari neraca

pendapatan nasional. Kegiatan pasar finansial sebagian ditentukan oleh variabel-variabel dari sektor riil melalui keputusan atas besarnya tabungan dan investasi, dan sebagian lagi ditentukan oleh variabel-variabel finansial seperti tingkat suku bunga dan penawaran berbagai jenis instrumen finansial. NAD menyediakan data yang penting untuk melakukan analisis secara empiris, misalnya untuk melihat interaksi antara tabungan dan investasi, hutang dan piutang, perilaku perantara finansial, dan penentuan tingkat suku bunga.

Penjelasan lebih lanjut mengenai keterkaitan antara Neraca Pendapatan dan Pengeluaran, serta Neraca Modal dengan Neraca Arus Dana dapat digambarkan dalam bagan 1 berikut ini.

BAGAN 1

Kaitan antara Neraca Arus Dana dan Sistem Neraca Nasional



Berdasarkan Bagan 1, dapat ditelusuri neraca berjalan yang menyajikan data mengenai rincian pendapatan dan pengeluaran masing-masing sektor. Selisih pendapatan dan pengeluaran ini menghasilkan Tabungan Bruto, karena di dalamnya masih termasuk komponen penyusutan barang modal. Dalam Neraca Modal digambarkan bagaimana

barang modal dibiayai dari berbagai sumber pembiayaan. Selisih antara Tabungan Bruto yang berasal dari Neraca Pendapatan dan Pengeluaran dengan jumlah Pembentukan Barang Modal merupakan Pinjaman Neto. Nilainya bisa positif atau negatif. Selanjutnya Pinjaman Neto tersebut dalam NAD dirinci lagi ke dalam berbagai jenis instrumen finansial dan sektor pelakunya.

2.4 Hubungan Neraca Arus Dana dengan Neraca Perusahaan

Pada umumnya perusahaan mempunyai paling sedikit dua jenis laporan keuangan yaitu laporan rugi-laba dan neraca. Dalam laporan rugi-laba dicatat pendapatan dan pengeluaran berjalan selama periode tertentu, biasanya satu tahun atau satu triwulan. Sedangkan dari neraca diperoleh data mengenai harta, hutang dan modal perusahaan pada satu waktu tertentu, biasanya keadaan akhir tahun atau akhir triwulan. NAD disusun berdasarkan data neraca, tetapi arusnya dihitung sebagai perubahan posisi finansial selama periode tertentu.

Berdasarkan persamaan akuntansi berlaku hubungan yang menyatakan bahwa jumlah harta (sisi aktiva) sama dengan jumlah kewajiban (sisi pasiva) atau kalau ditulis dalam bentuk persamaan akuntansi menjadi

$$\mathbf{HARTA = KEWAJIBAN}$$

Sisi kewajiban biasanya terdiri dari dua bagian, Hutang dan Modal. Bagian pertama merupakan kewajiban terhadap pihak ketiga dan bagian yang terakhir merupakan kewajiban terhadap pemilik modal. Dengan demikian persamaan di atas dapat diubah menjadi

$$\mathbf{HARTA = HUTANG + MODAL}$$

Dalam terminologi NAD harta selalu diklasifikasikan menjadi harta riil dan harta finansial. Harta riil mencakup semua barang modal seperti gedung, bangunan, mesin dan peralatan yang umumnya berumur lebih dari satu tahun. Untuk menjamin kelangsungan kegiatan perusahaan, maka disisihkan sebagian dana untuk mengganti barang modal tersebut di masa datang, atau penyusutan barang modal. Angka ini dicatat dengan tanda negatif di sisi harta. Dengan demikian persamaannya menjadi

$$\mathbf{HARTA RIIL + HARTA FINANSIAL - PENYUSUTAN = HUTANG + MODAL}$$

atau

$$\mathbf{HARTA RIIL (HR) + HARTA FINANSIAL (HF) = HUTANG (U) + MODAL DAN PENYUSUTAN (MP)}$$

Dengan menambahkan subskrip t dan t-1 untuk menyatakan dua tahun neraca yang berurutan ke dalam persamaan di atas diperoleh dua persamaan berikut:

$$\mathbf{HR_t + HF_t = U_t + MP_t, \quad \dots\dots\dots(1)}$$

dan

$$\mathbf{HR_{t-1} + HF_{t-1} = U_{t-1} + MP_{t-1} \dots\dots\dots (2)}$$

Jika persamaan (1) dikurangkan dengan persamaan (2) maka akan diperoleh besaran yang menunjukkan selisih dua level neraca atau arus yang terjadi pada tahun t dan diberi simbol

$$\mathbf{\Delta HR_t + \Delta HF_t = \Delta U_t + \Delta MP_t}$$

Dengan mengganti MP_t dengan TB_t (tabungan bruto), persamaan di atas dapat disusun kembali menjadi

$$\mathbf{\Delta HF_t - \Delta U_t = \Delta TB_t - \Delta HR_t \dots\dots\dots (3)}$$

Berdasarkan persamaan (3) dapat dikatakan bahwa jika perusahaan membelanjakan lebih banyak dananya untuk barang modal melebihi tabungan brutonya, maka perusahaan ini disebut sebagai peminjam (sektor defisit). Sebagai peminjam tidak berarti menghalanginya untuk membeli berbagai harta finansial atau membayar hutang. Kegiatan finansial sebenarnya merupakan kombinasi pembelian harta finansial dan pembayaran hutang untuk memenuhi tingkat pinjaman neto yang telah ditentukan. Persamaan ini dapat ditulis kembali menjadi

$$\mathbf{\Delta TB_t + \Delta U_t = \Delta HR_t + \Delta HF_t \dots\dots\dots(4)}$$

Persamaan (4) memperlihatkan jumlah sumber dana baik yang berasal dari dana yang dihasilkan sendiri (tabungan bruto) maupun dana yang diperoleh dari luar (hutang) sama dengan jumlah penggunaan dana (penambahan harta riil dan harta finansial). Persamaan (4) di atas dapat dipakai sebagai pendekatan untuk menyusun NAD masing-masing sektor, selama sektor bersangkutan mempunyai neraca. Karena dalam matriks NAD

sektor pelaku ekonomi disajikan menurut kolom, maka identitas ini disebut "identitas kolom."

Seperti dijelaskan di atas bahwa jumlah sumber dana setiap sektor dalam NAD harus sama dengan jumlah penggunaan dananya. Karena NAD secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang tertutup, maka setiap transaksi finansial yang terjadi harus melibatkan dua pelaku, yaitu pembeli dan penjual. Dengan demikian jumlah pembelian untuk setiap instrumen finansial sama dengan jumlah penjualannya, atau dengan kata lain jumlah perubahan suatu harta sama dengan jumlah perubahan kewajiban untuk kategori finansial yang sama. Karena dalam matriks NAD kategori instrumen finansial disajikan menurut baris, maka identitas ini disebut "identitas baris."

2.5 Kegunaan Neraca Arus Dana

Salah satu manfaat dalam penyusunan NAD adalah tersedianya suatu perangkat data keuangan makro dalam bentuk yang lengkap dan konsisten. Lengkap dalam pengertian bahwa NAD melibatkan seluruh instrumen finansial dan pelakunya. Sementara konsisten berarti bahwa data keuangan yang disajikan harus mengikuti aturan tertentu. Misalnya, jumlah sumber dan penggunaan setiap instrumen finansial untuk keseluruhan ekonomi harus sama besarnya. Begitu pula jumlah seluruh sumber dan penggunaan untuk setiap sektor harus sama besarnya. Dengan demikian NAD dapat digunakan sebagai dasar analisis ekonomi makro, khususnya dalam bidang moneter.

2.5.1 Pangkalan Data

NAD merupakan suatu pangkalan data (*data base*), yang menyediakan catatan-catatan transaksi keuangan secara lengkap dan konsisten. Berdasarkan informasi ini dapat dibuat analisis deskriptif mengenai kegiatan menyeluruh pasar uang dan modal.

2.5.2 Alat Analisis

NAD banyak dipakai oleh para pengguna data sebagai alat analisis. Para pengamat ekonomi makro yang tertarik untuk menganalisis kaitan antara sektor finansial dan riil dapat menggunakan informasi tabungan dan investasi riil.

Pengamat lain yang tertarik untuk melihat secara lebih tajam perilaku keuangan sektor tertentu, misalnya sektor Swasta Non Finansial, dapat menggunakan data deret berkala untuk menghitung berbagai jenis rasio, seperti rasio dana yang berasal dari hutang-hutang terhadap modal saham, dan dari pinjaman jangka pendek terhadap pinjaman jangka panjang. Terlebih lagi jika data yang tersedia tidak hanya dalam bentuk

arus tetapi juga dalam bentuk level, maka pengamat dapat menggunakan keduanya secara bersamaan. Sektor rumah tangga merupakan sektor yang sering diminati para pengamat ekonomi. Jumlah perubahan harta dan kewajiban lancar seperti deposito dan kredit konsumen dapat digunakan untuk melihat hubungan antara tabungan dan pengeluaran rumah tangga.

2.5.3 Penerapan Teori Portfolio

Berdasarkan teori portfolio, pelaku ekonomi baik sebagai individu maupun perusahaan melakukan investasinya ke berbagai jenis instrumen finansial sesuai dengan hubungan antara hasil dan risiko yang ditawarkan oleh pasar. Jika biaya transaksi masing-masing jenis portfolio diabaikan, maka para pelaku ekonomi akan merubah perilaku investasinya sesuai dengan perubahan rasio keuntungan masing-masing portfolio. Dalam konteks keseimbangan umum, perubahan relatif dari penawaran suatu aset hanya akan diterima pelaku ekonomi jika keuntungan relatif atas aset tersebut juga meningkat atau harganya lebih rendah.

Dalam model portfolio yang lengkap, biaya transaksi juga diperhitungkan sehingga memberikan gambaran yang lebih realistis. Teori portfolio ini dapat diterapkan secara sederhana dengan menggunakan kerangka NAD.

2.5.4 Arus Penawaran dan Permintaan untuk Menentukan Suku Bunga

Pengamat ekonomi yang tertarik untuk meramalkan tingkat suku bunga dapat memanfaatkan arus finansial sebagai alatnya. Prosedur sederhana yang dapat dilakukan adalah memperkirakan jumlah permintaan satu atau lebih instrumen finansial melalui tingkat pertumbuhan portfolio sektor-sektor yang biasanya memegang instrumen tersebut seperti bank dan perusahaan asuransi jiwa. Kemudian secara terpisah diperkirakan penawaran instrumen tersebut. Adanya kelebihan permintaan dibanding penawaran terhadap satu atau lebih instrumen, pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan penawaran hingga mencapai titik keseimbangan umum. Melalui proses iterasi dan penyesuaian untuk mencapai titik keseimbangan tersebut akan dapat diperkirakan tingkat suku bunga dan arus finansial yang terjadi.

2.5.5 Penerapan untuk Perencanaan dan Proyeksi

Sistem data NAD dapat digunakan untuk memperkirakan arus finansial, tabungan, dan investasi sektoral sebagai masukan bagi perencanaan sektoral dan nasional. Salah satu metode yang digunakan untuk memperkirakan variabel-variabel tersebut adalah

menggunakan rasio tetap masing-masing sektor. Prosedur sederhana ini harus dimodifikasi supaya mendapatkan hasil yang lebih mendekati kenyataan. Hal ini dilakukan karena dua hal yaitu : pertama, arus finansial biasanya berfluktuasi cukup besar dari tahun ke tahun. Untuk melakukan modifikasi dapat digunakan rasio rata-rata tiga sampai lima tahunan. Kedua, hendaknya dibuat secara iteratif dan disesuaikan dengan memperhatikan konsistensi angka-angka dalam kerangka NAD baik secara sektoral maupun keseluruhan. Kadang-kadang, dalam proses penyesuaian ini didapatkan pula beberapa informasi tidak langsung.

Dalam konteks menyusun perencanaan, dapat dimulai dengan memperkirakan investasi riil untuk masing-masing sektor, kemudian diikuti dengan memperkirakan besarnya tabungan yang dapat diciptakan masing-masing sektor dengan menggunakan rasio NAD. Berdasarkan perkiraan tersebut dapat diperkirakan nilai dari pinjaman neto dan variabel-variabel terkait lainnya.

2.6 Masalah dan Keterbatasan NAD

Masalah utama yang biasanya dihadapi dalam penyusunan NAD adalah keterbatasan data yang tersedia. Untuk itu beberapa alternatif pendekatan dan penggunaan metode sampling tidak dapat dihindarkan. Selain kelemahan sumber data, terdapat beberapa keterbatasan NAD lainnya yang berkaitan dengan pendekatan yang digunakan. Sebagai contoh, pendekatan dengan menggunakan neraca sebagai sumber data akan membawa implikasi terhadap pengukuran arus finansial, konsolidasi neraca, dan arus sebenarnya (*true flows*). Berikut ini akan dijelaskan lebih mendalam mengenai keterbatasan NAD berkaitan dengan penyusunannya.

2.6.1 Pengukuran Arus Finansial

Paling tidak terdapat dua kelemahan jika arus finansial disusun berdasarkan neraca akhir tahun. Pertama, NAD hanya mencatat perubahan dari pos-pos neraca untuk periode satu tahun. Padahal selama periode ini banyak terjadi perubahan yang cukup berarti, terutama untuk harta lancar seperti kas dan deposito. Kedua, pengertian sumber atau penggunaan dana tidak sama dengan sumber atau penggunaan kas. Penurunan dalam kas dapat berarti penurunan kas sebenarnya atau juga penurunan dana. Akan tetapi penurunan dana (misalnya penurunan piutang dagang), belum tentu berarti penurunan kas.

2.6.2 *Konsolidasi dan Gabungan Neraca*

Agar dapat menyusun neraca finansial untuk sektor secara keseluruhan, neraca-neraca individu yang merupakan anggota sektor tersebut harus dikelompokkan. Pengelompokan ini dapat dilakukan dengan cara konsolidasi atau gabungan. Jika dilakukan konsolidasi dari masing-masing neraca dalam sektor tertentu, maka terjadi penghapusan beberapa pos yang saling menghilangkan, tetapi masih tercatat baik sebagai harta maupun sebagai kewajiban.

Untuk menyusun NAD suatu sektor berdasarkan metode konsolidasi harus tersedia secara rinci data mengenai dari dan untuk siapa harta dan kewajiban sektor tersebut. Tetapi dalam praktek data semacam ini sangat jarang diperoleh, terkecuali untuk sektor luar negeri. Oleh karena itu NAD umumnya disusun dengan metode gabungan.

2.6.3 *"Arus Sebenarnya" Lawan "Perubahan Level dalam Neraca"*

Secara umum, arus keuangan dihitung dari perbedaan dua neraca akhir tahun yang berurutan. Angka ini biasanya sama dengan transaksi yang sebenarnya (*true flows*) selama periode tersebut. Walaupun begitu, ada beberapa pos neraca yang transaksinya tidak menggambarkan nilai sebenarnya, yaitu transaksi yang diakibatkan karena hal-hal berikut ini :

(1) Keuntungan atau Kerugian Akibat Perubahan Kurs

Nilai ekuivalen rupiah terhadap harta atau kewajiban dalam mata uang asing dapat berubah atau lebih tinggi dari tahun ke tahun sebagai akibat dari perubahan kurs yang terjadi. Dengan demikian, perubahan dalam level (yang dinyatakan dalam rupiah) dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam penggunaan kurs.

Idealnya, nilai "*true flow*" dalam rupiah seharusnya dihitung dari data setiap transaksi yang dinyatakan dalam mata uang asing baik untuk harta maupun kewajiban, dengan menggunakan nilai tukar yang sebenarnya bagi transaksi tersebut. Akan tetapi, data yang sifatnya transaksi individu jumlahnya sangat besar dan datanya sulit diperoleh. Dalam NAD, arus mata uang asing dapat dihitung dengan pendekatan sebagai berikut. Pos-pos neraca yang menggunakan mata uang asing tetapi dilaporkan dalam ekuivalen rupiah (menggunakan kurs pada akhir periode) harus dikonversikan kembali ke dalam mata uang asing menggunakan kurs yang sama. Demikian pula untuk periode sebelumnya dilakukan dengan menggunakan kurs yang sesuai. Dari sini dapat dihitung arus finansial dalam mata uang asing. Langkah berikutnya adalah mencari kurs yang sesuai untuk

mendapatkan arus pos neraca tersebut dalam nilai rupiah. Kurs yang baik adalah menggunakan rata-rata kurs bulanan yang ditimbang dengan jumlah nilai transaksi masing-masing bulan. Jika prosedur semacam ini dilakukan, hasilnya akan mendekati arus sebenarnya.

(2) *Capital Gains and Losses* serta Revaluasi

Perusahaan atau pemerintah dapat saja menyesuaikan nilai hartanya seperti: tanah, gedung dan peralatan, serta penyertaan dalam bentuk saham di perusahaan lain sesuai dengan harga pasar. Setiap kenaikan/penurunan nilai harta akibat penyesuaian harga harus diikuti dengan kenaikan/penurunan modal. Kenaikan/penurunan modal ini dapat disamakan dengan laba/rugi yang diakibatkan *capital gains/losses* yang tercermin dalam laporan rugi/laba.

Meskipun begitu, sistem neraca nasional tidak memperlakukan *capital gains/losses* sebagai pendapatan, karena data ini tidak mengukur nilai produksi sebenarnya. Karena data yang tersedia untuk penyusunan NAD sebagian besar diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, maka harus dilakukan penilaian kembali, apakah menaikkan atau menurunkan harta atau penambahan/pengurangan tabungan dianggap sebagai arus dalam NAD. Kasus ini merupakan salah satu ilustrasi perbedaan antara nilai arus sebenarnya dengan perbedaan dua level neraca.

(3) Perubahan Klasifikasi Sektor

Jika perusahaan atau pelaku ekonomi lainnya melakukan perubahan terhadap kepemilikan, anggaran dasar atau bidang usahanya kemungkinan akan terjadi perubahan klasifikasi perusahaan atau pelaku ekonomi tersebut ke dalam sektor NAD. Perubahan klasifikasi perusahaan ini dapat menyebabkan penurunan level neraca suatu sektor, tetapi sebaliknya akan menaikkan level sektor NAD yang lain. Penurunan dan kenaikan tidak berpengaruh pada nilai arus sebenarnya, karena kenyataannya tidak ada arus dana yang berhubungan dengan perubahan klasifikasi itu sendiri. Walaupun begitu, laporan sumber dan penggunaan dana untuk perusahaan tersebut tetap dicatat dalam NAD berdasarkan klasifikasi baru.

(4) Perubahan dalam Prosedur Akuntansi dan Laporan Keuangan

Banyak kasus menunjukkan bahwa perubahan prosedur akuntansi yang dilakukan perusahaan dapat menyebabkan perubahan beberapa pos neraca, yang pada akhirnya merubah level neraca keseluruhan. Sebagai contoh, penilaian pada akhir

tahun akan berbeda bila menggunakan sistem "*last in first out*" (LIFO) atau "*first in first out*" (FIFO). Perubahan ini seharusnya tidak berpengaruh pada perhitungan sebenarnya, tetapi tetap tercakup pada NAD karena berdasarkan pada data yang ada. Perubahan sistem pelaporan juga dapat mengganggu sistem penyusunan NAD. Misalnya, sebelumnya diperoleh laporan keuangan terpisah antara induk dan cabang dari suatu perusahaan yang sama. Tetapi karena sistem pelaporan perusahaan tersebut yang sekarang hanya dapat memberikan neraca konsolidasi, sehingga seolah-olah terjadi penurunan level neracanya. Hal ini disebabkan karena transaksi antara induk dan cabang tidak diperhitungkan.

(5) Perkiraan Berdasarkan Sampel

Karena keterbatasan data yang dapat dikumpulkan, NAD untuk beberapa sektor seperti perusahaan nonfinansial, hanya didasarkan pada sampel sejumlah neraca perusahaan. Di samping itu jumlah sampel yang digunakan sebagai dasar estimasi mungkin berubah-ubah dari tahun ke tahun. Akibatnya perubahan level neraca gabungan sangat tergantung dari jumlah sampel yang tersedia, dan pada gilirannya dapat menghasilkan arus yang keliru dalam NAD tanpa mengetahui seberapa besar tingkat kesalahannya. Masalah ini dapat diatasi dengan cara menghitung arus dana masing-masing tahun berdasarkan jumlah sampel tertentu yang konsisten, atau dengan memperlihatkan adanya penambahan atau pengurangan sampel untuk masing-masing individu.

BAB III

KERANGKA DASAR DAN CAKUPAN NERACA ARUS DANA

3.1 Kerangka NAD Indonesia

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa NAD adalah suatu sistem pencatatan statistik finansial yang menggambarkan transaksi pinjam-meminjam antar berbagai sektor di dalam suatu perekonomian. Berdasarkan hal itu paling tidak ada dua hal yang harus dijelaskan lebih lanjut, yaitu melalui instrumen finansial apa proses pinjam-meminjam itu dilakukan dan sektor-sektor perekonomian mana saja yang menjadi pelakunya. Untuk menggambarkan arus finansial antar sektor melalui instrumen finansial tertentu, lazimnya digunakan matriks yang barisnya menggambarkan instrumen finansial dan kolomnya menunjukkan sektor (pelaku ekonomi). Bagaimana menentukan pembagian sektor dan instrumen finansial yang sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian di Indonesia akan dijelaskan secara lebih rinci, berikut ini.

3.1.1 Pembagian Sektor

Dalam penyusunan statistik, khususnya untuk keperluan analisis tertentu lazim dilakukan penggolongan unit-unit analisis ke dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Penggolongan ini sangat berguna untuk melihat secara lebih tajam ciri khas kelompok dan perbandingan antar kelompok. Dalam statistik produksi misalnya, unit-unit analisis dikelompokkan menurut kegiatan ekonominya, seperti sektor pertanian, industri dan sebagainya.⁵ Berbeda dengan itu, NAD membagi perekonomian menurut kelompok institusi.⁶ Alasan pembagian tersebut adalah transaksi finansial dan keputusan investasi yang dilakukan dalam suatu sistem perekonomian lebih ditentukan oleh pelaku ekonomi, seperti Rumah Tangga, Pemerintah, dan sebagainya.

Salah satu tujuan penyusunan NAD adalah untuk mengetahui perilaku pinjam meminjam berbagai pelaku ekonomi melalui penggunaan instrumen-instrumen finansial. Untuk menunjang maksud tersebut, perekonomian harus dibagi menjadi sektor sektor tertentu, sehingga lebih mudah dianalisis. Unit-unit ekonomi yang mempunyai motivasi

⁵ Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) lazim dipakai untuk keperluan penyusunan statistik produksi. KLUI merupakan hasil modifikasi dari *International Standard Industrial Classification* (ISIC).

serupa terhadap keputusan finansial dikelompokkan ke dalam satu sektor. Dengan demikian, paling sedikit perekonomian harus dibagi ke dalam lima sektor, yaitu Rumah Tangga, Pemerintah, Perusahaan, Lembaga Keuangan, dan Luar Negeri; karena kelima sektor tersebut mempunyai perilaku yang sangat berbeda. Pemerintah misalnya, merupakan suatu lembaga yang mempunyai tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat dan seringkali melakukan investasi dalam jumlah besar. Lembaga Keuangan (khususnya Bank) berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada investor. Sedangkan motivasi Perusahaan adalah mencari keuntungan dari investasi yang ditanam. Dalam prakteknya, sektor-sektor tersebut (kecuali Luar Negeri) perlu dipecah lagi sesuai dengan kebutuhan.

Dalam publikasi ini, sektor-sektor di atas (kecuali Luar Negeri), dikelompokkan menurut sektor Keuangan dan Bukan Keuangan. Dengan demikian dalam analisis Neraca Arus Dana (NAD), sektor-sektor tersebut dibagi ke dalam tiga sektor utama, yaitu sektor Keuangan, Bukan Keuangan dan Luar Negeri. Sektor Keuangan adalah sektor-sektor yang tidak menghasilkan barang dan berfungsi sebagai penghubung atau perantara (*intermediaries institution*) antara sektor yang surplus dengan sektor yang membutuhkan dana atau sektor defisit. Sedangkan sektor Luar Negeri merupakan konsekuensi logis dari dianutnya sistem perekonomian terbuka, sehingga terjadi transaksi antara residen dengan nonresiden.

Dalam sektor Keuangan, paling tidak harus mencakup sektor Bukan Bank (Lembaga Keuangan Lainnya) dan sektor Bank. Hal itu perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa hanya sektor Bank saja yang dapat menciptakan uang baik uang kartal maupun uang giral, sedangkan sektor Bukan Bank tidak diizinkan melakukannya (*nonintermediaries institution*). Dengan pembagian semacam ini, selanjutnya dapat ditelusuri arus finansial dari lembaga pencipta uang (uang kartal maupun uang giral) ke sektor-sektor lainnya.

Selain itu dapat pula diketahui sektor mana yang mempunyai kelebihan dana (surplus) dan sebaliknya (defisit). Dalam publikasi ini sektor Keuangan dirinci ke dalam sektor Otoritas Moneter, sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Otoritas Moneter dibentuk sebagai sektor tersendiri karena mempunyai fungsi khusus yaitu menciptakan uang kartal. Lembaga ini diwakili oleh Bank Indonesia. Sektor Perbankan terdiri dari

⁶ Dalam publikasi ini istilah sektor dan institusi digunakan untuk maksud yang sama.

Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional, dan BPR Syariah. Khusus Bank Umum Konvensional secara spesifik dapat dibedakan menjadi Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa, BUSN Non Devisa, Bank Pembangunan Daerah (BPD), bank campuran, dan bank asing. Walaupun sistem pendataan statistik keuangan untuk sektor Keuangan (bukan bank) tidak sebaik yang dimiliki sektor Perbankan, tetapi dalam NAD tetap diusahakan membagi sektor ini secara rinci. Cukup banyak sektor yang termasuk dalam kelompok sektor non bank atau lembaga keuangan lainnya yaitu Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Asuransi, Pegadaian dan Dana Pensiun.

Berdasarkan pengalaman negara maju dan juga perkembangan lembaga keuangan di Indonesia, sektor Asuransi memiliki volume usaha yang semakin besar. Sejalan dengan kemajuan pembangunan di Indonesia, peranan sektor ini juga akan semakin meningkat. Berdasarkan UU. No.2 tahun 1992, ada 2 (dua) jenis usaha peransuransian yaitu usaha asuransi (usaha asuransi kerugian, usaha asuransi jiwa, program asuransi sosial, usaha reasuransi), dan usaha penunjang usaha asuransi (usaha pialang asuransi, usaha pialang reasuransi, usaha penilai kerugian, usaga konsultan aktuarial, usaha agen asuransi).

Program asuransi sosial meliputi program asuransi sosial yang hanya boleh diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT (Pesero) Jasa Raharja, PT (Pesero) Taspen, PT (Pesero) JAMSOSTEK, dan PT (Pesero) ASABRI. Program asuransi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) lainnya terdiri dari Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian, dan Dana Pensiun. Perusahaan Pembiayaan sebagai salah satu LKBB mencakup juga jenis pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan anjak piutang, pembiayaan konsumen dan pembiayaan kartu kredit. Walaupun peranan LKBB tidak sebesar sektor Bank tetapi keberadaannya cukup berarti. Lain halnya dengan sektor Keuangan, sektor Bukan Keuangan adalah sektor-sektor yang bergerak di sektor riil, yaitu sektor-sektor yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam perekonomian Indonesia ada lima sokoguru yang menggerakkan roda perekonomian, yakni sektor Pemerintah, Perusahaan Pemerintah (BUMN dan BUMD), Perusahaan Swasta, Koperasi dan Rumah Tangga. Kelima komponen ini juga dimunculkan secara tersendiri dalam NAD. Sektor terakhir sebagai pelengkap sistem NAD adalah sektor Luar Negeri. Sektor ini secara

eksplisit dapat menggambarkan karakteristik hutang-piutang penduduk Indonesia dengan luar negeri.

Berdasarkan latar belakang pembagian sektor seperti diuraikan di atas, seharusnya terdapat 30 sektor yang dicakup dalam NAD Indonesia. Dari 30 sektor tersebut, 20 sektor diantaranya merupakan sektor Keuangan, dan hanya 9 sektor adalah sektor Bukan Keuangan serta satu sektor Luar Negeri. Tetapi karena keterbatasan data, dalam publikasi ini hanya disajikan sektor-sektor agregat sebanyak 8 sektor, yaitu : Bank Sentral, Perbankan, Lembaga Keuangan lainnya (Perusahaan Pembiayaan, Asuransi, Dana pensiun dan Pegadaian), Pemerintah, Perusahaan Pemerintah (BUMN dan BUMD) Non Finansial, Bisnis (Perusahaan Swasta) Non Finansial, Rumah Tangga dan Luar Negeri.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai gambaran umum kerangka sektor NAD Indonesia, berikut ini dibuat skematis pembagian sektornya.

SEKTOR KEUANGAN

1. *Bank Sentral*
2. *Perbankan*
 - Bank Umum Konvensional
 - Bank Umum Syariah
 - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional
 - BPR Syariah
3. *Lembaga Keuangan Lainnya*
 - Perusahaan Pembiayaan (Pembiayaan Sewa Guna Usaha, Pembiayaan Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan Pembiayaan Kartu Kredit)
 - Peransuransian (Usaha Asuransi, Usaha Penunjang Asuransi dan Program Asuransi Sosial)
 - Dana Pensiun
 - Pegadaian

SEKTOR BUKAN KEUANGAN

1. *Rumah Tangga*
2. *Pemerintah (Pusat dan Daerah)*
3. *Perusahaan Pemerintah (BUMN, dan BUMD) Non Finansial*
4. *Bisnis (Perusahaan Swasta Nonfinansial)*

SEKTOR LUAR NEGERI

Secara lengkap definisi masing-masing sektor di atas diberikan pada Lampiran 1, dalam publikasi ini.

3.1.2 Pembagian Kategori Transaksi

Baris-baris NAD pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian atas (*above the line*) dan bagian bawah (*below the the line*). Bagian atas berisi Tabungan Bruto dan Perolehan Aset (harta) Non Finansial yang dalam istilah lain disebut investasi riil. Tabungan Bruto dibagi menjadi dua yaitu Penyusutan Barang Modal dan Tabungan Neto. Sedangkan Perolehan Aset Nonfinansial terdiri dari Aset yang dapat diproduksi (*produced assets*) dan aset yang tidak dapat diproduksi (*non produced assets*). *Produced assets* terdiri dari aset tetap (*fixed assets*) atau barang modal, perubahan stok, dan perolehan barang berharga. Sedangkan contoh dari *non produced assets* adalah tanah. Semua rincian tersebut berasal dari sektor riil yang biasanya dituangkan dalam neraca modal nasional, dan merupakan jembatan menuju ke bagian bawah NAD atau juga bagian finansial.

Sebelum masuk ke bagian finansial untuk kepentingan pengecekan konsistensi, diperkenalkan beberapa baris pembantu. Pertama, pinjaman neto yang merupakan selisih antara tabungan bruto dan investasi bruto. Akan tetapi karena matriks NAD disajikan menurut sektor, maka selalu terjadi perbedaan antara tabungan dan investasi real. Jika angka baris ini positif berarti sektor yang bersangkutan mengalami kelebihan dana (sektor surplus), sebaliknya jika negatif disebut sektor yang kekurangan dana (sektor defisit). Matriks NAD dapat digunakan untuk menelusuri aliran dana dari sektor surplus ke sektor defisit melalui berbagai instrumen finansial yang nantinya digambarkan pada bagian bawah.

Nilai pinjaman neto dapat pula dihitung berdasarkan selisih jumlah penggunaan finansial dengan sumber finansial. Logikanya, per definisi pinjaman neto adalah bagian investasi finansial. Begitu pula selisih jumlah penggunaan dan sumber juga akan merupakan investasi finansial, tetapi diperoleh dari mutasi/transaksi finansial. Apabila angka ini negatif berarti jumlah sumber finansial lebih besar dari jumlah penggunaannya. Sebaliknya jika selisih tersebut positif menunjukkan jumlah penggunaan lebih besar dari sumber. Perbedaan kedua pendekatan ini dimunculkan pada baris selisih statistik. Dengan demikian terdapat lima baris penunjang, yaitu pinjaman neto, selisih statistik, investasi finansial neto, jumlah penggunaan finansial, dan jumlah sumber finansial. Di bawah baris

penunjang ini selanjutnya merupakan bagian NAD yang berisi berbagai instrumen finansial.

NAD idealnya menampung seluruh jenis instrumen finansial yang dipakai oleh masing-masing sektor dalam perekonomian Indonesia. Kalau pendekatan ini ditempuh maka daftar instrumen akan menjadi sangat panjang, sehingga sulit untuk memahami dan mengambil kesimpulan dari daftar ini. Untuk itu dilakukan penggolongan jenis instrumen yang sejenis atau mempunyai sifat hampir sama, dengan mempertimbangkan instrumen-instrumen khas yang dimiliki oleh sektor tertentu. Misalnya, Cadangan Asuransi dan Dana Pensiun dimunculkan sebagai konsekuensi logis dari keberadaan sektor Asuransi dan Dana Pensiun. Begitu pula transaksi kategori pajak yang hanya menggambarkan hubungan hutang dan piutang pajak antara sektor Pemerintah dengan sektor-sektor wajib pajak.

Jika dasar penggolongan itu diikuti, maka secara garis besar kategori transaksi NAD Indonesia dapat dibagi menjadi (a) Cadangan Valuta Asing Pemerintah, (b) Klaim Dalam Valuta Asing Lainnya, (c) Uang dan Simpanan, (d) Surat Berharga Jangka Pendek, (e) Pinjaman, (f) Modal (*Equity*), (g) Surat Berharga Jangka Panjang dan (h) Lainnya. Di bawah ini dijelaskan rincian masing-masing kategori transaksi dalam kelompok besar di atas. Cadangan Valuta Asing Pemerintah menggambarkan hubungan antara sektor Otoritas Moneter dengan sektor Luar Negeri. Kategori ini akan mencakup transaksi Emas Moneter, *Special Drawing Right (SDR)*, Posisi Cadangan IMF, Cadangan Valuta Asing, dan lainnya. Dalam sistem keuangan Indonesia, di samping Otoritas Moneter, sektor lainnya dapat pula secara langsung melakukan hubungan dengan sektor Luar Negeri. Oleh karena itu, untuk menampung transaksi yang demikian, dimunculkan kategori Klaim Dalam Valuta Asing Lainnya.

Pada kategori Uang dan Simpanan, dirinci semua instrumen yang sebagian besar berkaitan dengan hutang bank terhadap sektor lainnya. Karena uang dan simpanan sektor lainnya pada sektor bank dapat berbentuk valuta asing dan rupiah, maka dimunculkan kategori Uang dan Simpanan Dalam Valuta Asing dan Rupiah secara terpisah. Masing-masing kategori ini dirinci lagi ke dalam Uang Kertas dan Logam, Giro, Tabungan dan Deposito Berjangka. Di samping jenis tabungan tersebut, dimunculkan pula jenis tabungan lainnya, yang mencakup Tabungan Giro Pos dan Koperasi, berturut-turut untuk menampung simpanan yang dilakukan di Kantor Pos dan Koperasi. Surat berharga jangka pendek umumnya diberikan oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jenis

instrumen ini sebenarnya merupakan satu alternatif lain dalam investasi finansial. Di lain pihak, Otoritas Moneter kadang-kadang menggunakan instrumen ini dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk melaksanakan kebijaksanaan moneternya. Selanjutnya pinjaman merupakan hutang pada bank dan institusi lain.

Pada prakteknya terdapat kecenderungan bahwa sektor keuangan non bank juga ikut mengambil alih sebagian peranan bank dalam pemberian pinjaman. Semua kredit atau pinjaman yang diberikan ini dapat berbentuk rupiah ataupun valuta asing. Oleh sebab itu dalam NAD, di bawah kategori ini dimunculkan pula instrumen Kredit Bank Dalam Rupiah, Pinjaman Institusi Lain Dalam Rupiah, serta Pinjaman Dalam Valuta Asing. Karena sifat kredit yang diberikan ini mempunyai fungsi yang berlainan, maka kredit (yang berasal dari bank maupun institusi lainnya) dipecah menjadi Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit Konsumsi. Sedangkan semua kredit yang diberikan dalam valuta asing baik oleh bank maupun institusi lainnya, dimasukkan dalam satu kategori Pinjaman Dalam Valuta Asing.

Setiap sektor dalam menjalankan kegiatannya tentu mempunyai Modal atau *Equity*. Untuk kegiatan yang sudah berjalan dan masih memungkinkan untuk melakukan penambahan modal, maka ada berbagai cara untuk mendapatkannya. Bisa dengan cara dipenuhi sendiri seperti perusahaan perorangan bekerja sama dengan orang atau dengan menjual saham (tanda ikut memiliki). Alternatif lainnya bisa dilakukan dengan cara melakukan penawaran sahamnya (*go public*) di pasar modal khususnya untuk perusahaan-perusahaan kategori sedang dan besar yang memiliki prospek bagus. Bagi perusahaan (emiten), cara seperti itu merupakan cara memperoleh sumber dana di luar kredit perbankan. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kelebihan dana, cara seperti itu merupakan suatu alternatif melakukan investasi di luar kebiasaan menyimpannya dalam bentuk simpanan di bank dan surat berharga jangka pendek. Untuk menangkap aktivitas tersebut, maka dalam NAD, kategori modal dirinci lagi jenisnya menjadi kategori transaksi Modal Saham dan Penyertaan (swasta) dan Penyertaan Modal Pemerintah, yang dalam beberapa perusahaan pemerintah seringkali berubah menjadi dana donasi bagi perusahaan yang menerimanya.

Surat Berharga Jangka Panjang (Obligasi) umumnya diterbitkan oleh sektor Pemerintah, Lembaga Keuangan dan sektor lain yang memerlukan dana investasi jangka panjang. Pada kategori ini, untuk saat sekarang baru dapat dimunculkan berupa obligasi

pemerintah dan obligasi lainnya (obligasi perusahaan swasta dan perusahaan pemerintah) tanpa rincian lebih lanjut, baik dalam rupiah maupun valuta asing.

Khusus obligasi negara, saat ini untuk obligasi pemerintah selain berorientasi ke pasar luar negeri juga telah menerbitkan obligasi untuk dalam negeri. Obligasi pemerintah dalam negeri ini merupakan bagian dari Surat Berharga Negara (SBN) dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) rupiah dan valuta asing berjangka panjang baik *tradable* dan *non tradable* maupun *fixed* dan *variable*. Contoh dari obligasi ini adalah ORI, FR/VR Bond, Global Bond untuk yang *tradable*, dan SRBI untuk BLBI, serta Surat Utang ke BI untuk penyehatan dan restrukturisasi Perbankan untuk yang *non tradable*. Selain dalam bentuk SUN, obligasi pemerintah juga berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara jangka panjang baik dalam rupiah maupun valuta asing. Contoh dari obligasi ini adalah Ijarah Fixed Rate (IFR), Global Sukuk, dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).

Seperti telah disebutkan sebelumnya, kelompok kategori yang terakhir merupakan kategori khas untuk sektor-sektor tertentu. Seperti Cadangan Asuransi dan Pensiun, untuk sektor Asuransi dan Dana Pensiun, dan Dana Perwalian yang direncanakan untuk menampung investasi yang dilakukan masyarakat ke dalam "*trust company*". Nampaknya investasi ke perusahaan semacam ini masih belum berkembang di Indonesia. Kemudian untuk menampung hutang-hutang dagang yang sering terjadi di dunia usaha dimunculkan kategori Kredit Dagang. Kategori Klaim Antar Bank dibuat khusus untuk transaksi yang terjadi antar bank, baik antara Perbankan dan Bank Indonesia, maupun transaksi antar Perbankan.

Selain kategori transaksi di atas, dibuat pula suatu kategori Rupa-Rupa yang menampung semua transaksi yang tidak tercakup dalam kategori yang telah disebut terdahulu. Definisi kategori transaksi diberikan secara lengkap di Lampiran 2. Namun demikian, berkaitan dengan data NAD yang disajikan dalam publikasi ini, hanya kategori transaksi yang penting dan strategis saja yang ditampilkan tersendiri, sedangkan untuk kategori transaksi lain hanya ditampilkan agregasinya.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan NAD Indonesia umumnya merupakan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Sesuai dengan pembagian sektor dalam NAD, data ini sangat beragam baik tingkatan maupun sumbernya. Data untuk sektor perbankan sudah merupakan neraca konsolidasi yang dilengkapi dengan

kode-kode transaksi NAD, sebaliknya sektor Keuangan Bukan Bank dan sektor Bukan Keuangan sebagian besar masih merupakan neraca individu perusahaan yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Sektor Rumah Tangga dan Luar Negeri karena karakteristik data yang digunakan berbeda, tidak dapat diperoleh dari neraca akhir tahun. Untuk lebih jelasnya, sumber data masing-masing sektor yang digunakan dalam penyusunan NAD diuraikan berikut ini.

3.2.1 Sektor Otoritas Moneter

Data untuk sektor ini bersumber dari Bank Indonesia yang merupakan hasil pengolahan khusus. Sumber data sektor ini berbentuk neraca yang sangat rinci sehingga memudahkan pemberian kode transaksi NAD. Selain itu, data tersebut dilengkapi pula dengan perkiraan alokasinya (*counterpart accounts*) ke sektor-sektor lain. Dengan demikian data itu sangat membantu konsistensi dan kelengkapan data di sektor bersangkutan.

3.2.2 Sektor Bank

Data untuk sektor ini juga bersumber dari Bank Indonesia dalam bentuk neraca konsolidasi, masing-masing untuk Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Campuran, dan Bank Asing. Seperti Neraca Otoritas Moneter, rincian dari neraca konsolidasi ini juga sangat memadai sehingga memungkinkan untuk membuat perkiraan alokasinya ke sektor-sektor lain.

3.2.3 Lembaga Keuangan Lainnya

Sumber data untuk sektor ini cukup luas dan beragam sesuai dengan banyaknya jenis kegiatan yang dicakup di dalamnya. Data Perusahaan Pembiayaan diperoleh dari Bappepam-LK (Kementerian Keuangan), dan survei khusus ke perusahaan-perusahaan bersangkutan. Data Perusahaan Dana Pensiun juga diperoleh dari Bappepam LK (Kementerian Keuangan) dan dari survei khusus. Survei khusus yang dilakukan untuk mengumpulkan data perusahaan pembiayaan dan dana pensiun adalah Survei Khusus Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan (SKDPP). Data untuk sektor Asuransi (yang meliputi tiga jenis usaha peransuransian yaitu usaha asuransi, usaha jasa penunjang asuransi, dan program asuransi sosial) diperoleh dari Bappepam-LK (Kementerian Keuangan) berupa neraca konsolidasi untuk masing-masing jenis usaha asuransi. Sedangkan data untuk sektor Pegadaian diperoleh langsung dari PT (Pesero) Pegadaian.

3.2.4 *Sektor Pemerintah*

Sektor Pemerintah terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berbeda dengan sektor-sektor sebelumnya, sektor ini tidak memiliki informasi keuangan dalam bentuk neraca. Penyusunan NAD untuk sektor ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai informasi yang relevan dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menjadi suatu bentuk "Neraca Pemerintah Pusat". Sedangkan untuk Pemerintah Daerah, karena keterbatasan data hal yang serupa tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, sektor terakhir ini hanya mengandalkan data sektor-sektor lainnya terutama yang bersumber dari Bank Indonesia dan perusahaan-perusahaan pemerintah. Khusus mengenai tabungan dan pembentukan modal pemerintah, datanya diperoleh langsung dari hasil penyusunan statistik Pendapatan Nasional Indonesia.

3.2.5 *Perusahaan Pemerintah Non Finansial*

Perusahaan Pemerintah Non Finansial terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Non Finansial. Perusahaan Pemerintah di bidang keuangan (finansial) baik perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank termasuk dalam kelompok sektor keuangan.

Data untuk sektor BUMN diperoleh langsung dari Kementerian Negara BUMN berupa neraca individu perusahaan sehingga memerlukan pengolahan lebih lanjut. Data yang diperoleh sudah mencakup seluruh BUMN yang ada, yaitu sekitar 141 BUMN. Sedangkan data untuk BUMD diperoleh dari hasil Survei Statistik Keuangan yang dilakukan Sub Direktorat Statistik Keuangan, BPS, dengan cakupan kurang lebih 695 BUMD di seluruh Indonesia. Penaksiran untuk memperoleh cakupan yang lebih baik juga dilakukan secara tidak langsung melalui alokasi (*counterpart accounts*) sektor-sektor lain.

3.2.6 *Perusahaan Swasta Non Finansial*

Sektor ini mencakup perusahaan-perusahaan di luar BUMN, BUMD dan lembaga keuangan (finansial). Perusahaan Swasta di bidang keuangan (finansial) termasuk dalam kelompok sektor keuangan. Sistem pengolahan data untuk perusahaan swasta ini belum dikembangkan di Indonesia. Artinya belum ada satupun instansi atau lembaga yang mengumpulkan dan menyajikan data statistik keuangan sektor ini. Oleh karena itu, keberadaan sektor ini dalam NAD Indonesia masih memiliki kelemahan data yang cukup berarti.

Sumber data keuangan untuk sektor ini diperoleh dari Survei Khusus Perusahaan Swasta (SKPS) NonFinansial yang dilakukan oleh BPS, serta dari data laporan keuangan

perusahaan-perusahaan *go-public* yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Data lainnya berasal dari Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan, yang mengumpulkan laporan keuangan dalam rangka pemungutan pajak. Namun demikian, karena cakupan sektor ini belum diketahui secara pasti, maka data dari perusahaan-perusahaan tersebut belum dapat diperkirakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, beberapa informasi mengenai sektor ini diambil dari perkiraan-perkiraan lawan (*counterpart accounts*) yang tersedia di sektor lain (khususnya sektor bank), sedangkan data perusahaan tersebut hanya dimanfaatkan untuk memperoleh gambaran struktur finansialnya.

3.2.7 Rumah Tangga

Sektor Rumah Tangga merupakan sektor yang hampir tidak mungkin dapat disusun neraca akhir tahunnya. Hal ini disebabkan belum terlihat pentingnya rumah tangga memiliki suatu laporan keuangan. Pendekatan yang dipakai untuk memperoleh data keuangan rumah tangga adalah melakukan estimasi hasil Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga (SKTIR) yang dilakukan BPS dengan mengambil sampel kurang lebih sebanyak 10.000 rumah tangga.

Hasil pengolahan SKTIR ini hanya dapat dimanfaatkan untuk memperoleh rasio tabungan terhadap pendapatan (*saving ratio*) dan struktur perubahan harta dan kewajiban finansial rumah tangga. Sedangkan arus masing-masing instrumen finansialnya seperti: Uang, Giro, Deposito, Kredit Bank dan sebagainya tetap mempertimbangkan data alokasi (*counterpart accounts*) yang diberikan oleh sektor Bank. Data tabungan dan pembentukan modal diperoleh dari hasil perhitungan angka-angka Statistik Pendapatan Nasional Indonesia.

3.2.8 Luar Negeri

Dalam penyusunan NAD Indonesia, data untuk sektor Luar Negeri diperoleh dari Bank Indonesia. Data tersebut diturunkan dari transaksi luar negeri yang ada pada Neraca Pembayaran (*Balance of Payment*) dan Posisi Investasi Internasional (*International Investment Position/IIP*). Tabungan untuk sektor ini dihitung dari angka Statistik Pendapatan Nasional Indonesia, yaitu Ekspor barang jasa dikurang Impor barang jasa dan ditambah lagi dengan Pendapatan Neto terhadap Luar Negeri atas Faktor Produksi (*Net Factor Income from abroad*).

3.3 Metode Penyusunan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sumber data utama yang digunakan dalam penyusunan NAD Indonesia adalah neraca perusahaan, terkecuali untuk sektor Rumah Tangga dan Luar Negeri. Neraca-neraca perusahaan tersebut dapat berupa: (a) neraca konsolidasi, seperti neraca perbankan yang disiapkan oleh Bank Indonesia dan neraca asuransi yang dikerjakan oleh Kementerian Keuangan, dan (b) neraca individu perusahaan yang diterima langsung dari perusahaan bersangkutan ataupun sebagai data sekunder dari instansi terkait.

Prosedur penyusunan NAD Indonesia berdasarkan sumber data di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.3.1 Penyusunan Bagan Transaksi (*Chart of Accounts*) Sektoral

Bagan transaksi adalah suatu media antara yang secara teknis digunakan untuk mentransformasikan neraca akhir tahun menjadi bentuk neraca lain yang menggunakan kategori transaksi NAD. Bagan transaksi ini dapat disusun berdasarkan neraca baik dalam bentuk konsolidasi maupun individual. Transformasi dari pos-pos neraca yang ada pada setiap neraca akhir tahun ke dalam kategori transaksi NAD dapat dilakukan dengan mengidentifikasi setiap pos neraca bersangkutan. Bahkan sering dilakukan dengan membuat terlebih dahulu daftar konversi pos-pos neraca ke kategori transaksi NAD untuk setiap neraca. Secara teknis, langkah-langkah penyusunan bagan transaksi adalah sebagai berikut.

- i. Setiap pos neraca setelah diidentifikasi diberi kode kategori transaksi NAD yang sesuai. Pengkodean tersebut berpedoman pada klasifikasi kategori transaksi baku yang digunakan dalam NAD Indonesia. Neraca perusahaan dan neraca konsolidasi yang masing-masing pos neracanya sudah menggunakan kode transaksi NAD disebut Bagan Transaksi Perusahaan. Selanjutnya bagan transaksi ini dapat disederhanakan dengan menggabungkan nilai transaksi dari pos-pos neraca yang mempunyai kode kategori transaksi sama.
- ii. Bagan Transaksi Sektoral diperoleh dengan cara menggabungkan Bagan Transaksi Perusahaan, yaitu menjumlahkan nilai transaksi dari kategori NAD yang berkode sama. Selanjutnya, hasil penggabungan ini merupakan neraca yang siap dipakai untuk menyusun NAD.

3.3.2 Penghitungan Arus Finansial

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, NAD menggambarkan arus finansial yang terjadi antar sektor ekonomi selama satu periode tertentu (satu tahun). Dalam praktek, arus finansial ini disusun dengan cara menghitung selisih nilai dari masing-masing kategori transaksi dari dua neraca (bagan transaksi) pada tahun yang berurutan. Oleh karena itu arus finansial untuk suatu tahun tertentu bisa negatif atau positif. Dalam NAD, arus finansial dikelompokkan menjadi dua kolom, yaitu sumber dan penggunaan. Arus finansial sebagai sumber (*sources*) berasal dari semua kategori transaksi yang ada di sisi pasiva bagan transaksi. Sebaliknya arus finansial sebagai penggunaan (*uses*) berasal dari semua kategori transaksi di sisi aktiva.

3.3.3 Rekonsiliasi NAD

NAD Indonesia disusun berdasarkan neraca finansial yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, konsistensi data dari berbagai sumber tersebut harus dijaga melalui suatu tahap yang disebut rekonsiliasi. Bank Indonesia di samping menyediakan data untuk Otoritas Moneter dan Bank Pencipta Uang Giral, mampu pula menunjukkan alokasinya (*counterpart accounts*) pada sektor-sektor terkait. Misalnya untuk arus uang dan rekening giro sebagai sumber di Perbankan, dapat diketahui sektor apa saja pemiliknya dan berapa besarnya. Di lain pihak transaksi yang sama juga dapat diketahui dari sektor yang bersangkutan, tetapi nilainya belum tentu sama. Pada dasarnya rekonsiliasi NAD bertujuan untuk menciptakan kelayakan dan konsistensi isian NAD baik ditinjau dari sektor maupun dari jenis instrumen finansial yang digunakan. Apabila dilihat menurut sektor, selisih antara jumlah penggunaan finansial dan sumber finansial harus sama dengan pinjaman neto. Sedangkan dari segi kategori transaksi, jumlah sumber harus sama dengan jumlah penggunaan.

Secara operasional, rekonsiliasi NAD dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Isian kolom (sumber dan penggunaan) pada masing-masing sektor harus memenuhi persamaan yang berlaku untuk NAD.
 - Pinjaman Neto (0300) = Tabungan Bruto (0100) - Pembentukan Modal Tetap atau Perolehan Harta Nonfinansial (0200).
 - Investasi Finansial Neto (0500) = Jumlah Penggunaan Finansial (0600) - Jumlah Sumber Finansial (0700).

- Selisih Statistik (0400) = Pinjaman Neto (0300) - Investasi Finansial Neto (0500). Tetapi karena dalam NAD Indonesia ada beberapa sektor yang datanya sangat lemah atau bahkan tidak tersedia sama sekali maka Selisih Statistik ditiadakan, sehingga Pinjaman Neto = Investasi Finansial Neto.
 - Jumlah Penggunaan Finansial (0600) merupakan jumlah seluruh penggunaan dana dari berbagai instrumen finansial di kolom penggunaan.
 - Jumlah Sumber Finansial (0700) merupakan jumlah seluruh sumber dana dari berbagai instrumen finansial di kolom sumber.
- ii. Konsistensi data dari berbagai sumber terutama pada tingkat makro juga harus dijaga. Secara nasional, data Penyusutan Barang Modal, Tabungan Neto, Pembentukan Modal Tetap dan Perubahan Stok yang diperoleh dari hasil perhitungan NAD sedikit berbeda dengan hasil perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu seluruh angka makro tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan angka-angka PDB. Dalam praktek, penyesuaian dilakukan dengan mengalokasikan perbedaan nilai dari kedua perhitungan di atas ke sektor-sektor yang tingkat ketelitian dan cakupan datanya masih lemah. Sebaliknya hasil perhitungan dari sektor-sektor yang tingkat ketelitiannya tinggi tetap dipertahankan.
- ii. Perilaku setiap jenis instrumen finansial di dalam NAD juga harus mendapat perhatian. Instrumen finansial seperti Uang, Giro, Deposito, Kredit Dagang, dan Kredit Bank mempunyai karakteristik yang berbeda. Terdapat beberapa instrumen yang hanya dapat ditransaksikan oleh sektor-sektor tertentu. Sebagai contoh Giro (1022), di sisi sumber hanya boleh diisikan di sektor Keuangan. Di dalam rekonsiliasi, seluruh data untuk kategori transaksi yang bersumber dari Bank Indonesia tidak mengalami penyesuaian. Sedangkan sektor-sektor yang terkena alokasi berdasarkan data Bank Indonesia tersebut, isian aslinya mungkin saja diubah untuk menjaga keseimbangan dan kelayakan masing-masing instrumen finansial.

3.3.4 Masalah dalam Proses Penyusunan

Seperti telah dijelaskan, data yang digunakan untuk penyusunan NAD diperoleh dari sumber yang sangat beragam. Data tersebut umumnya diperoleh dalam bentuk neraca akhir tahun baik yang sudah dikonsolidasikan maupun yang masih berbentuk neraca

individu perusahaan. Masalah utama yang dihadapi dalam proses penyusunan adalah pada saat mengidentifikasi pos-pos neraca ke dalam kode transaksi NAD. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kandungan dan makna dari setiap pos neraca tersebut. Begitu pula penggunaan istilah dan kekhususan dari setiap pos neraca yang dapat berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Proses untuk mempelajari dan memahami setiap neraca individu ini cukup memakan waktu.

Masalah kedua adalah seringkali terjadi pos-pos dalam neraca ini kurang didukung oleh keterangan yang memadai, bahkan disajikan dalam bentuk kelompok besarnya saja (tidak rinci). Kondisi ini sangat menyulitkan proses transformasi dari pos-pos neraca ke kode transaksi NAD serta dapat menyebabkan kekeliruan pemberian kode.

Masalah lainnya adalah belum dibangunnya sistem pengadaan data NAD yang baku dan konsisten pada instansi-instansi terkait, sehingga sering dibutuhkan pengolahan ulang yang bersifat khusus untuk kepentingan penyusunan NAD. Jika sistem ini dapat berjalan maka proses penyusunan dan penyajian NAD dapat lebih dipercepat.

BAB IV

KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA BERDASARKAN NAD INDONESIA TAHUN 2006-2011

4.1. GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 2011

Sepanjang tahun 2011 kondisi perekonomian Indonesia berada ditengah kondisi meningkatnya ketidakpastian perekonomian global. Kondisi tersebut ditandai dengan adanya peningkatan ketidakpastian akibat penyelesaian krisis utang yang berlarut-larut serta kekhawatiran terhadap prospek pemulihan ekonomi di negara maju. Contoh paling nyata adalah proses pemulihan ekonomi di sejumlah negara maju seperti AS dan Eropa yang tidak sekuat yang diperkirakan. Penanganan krisis utang di negara-negara Eropa yang berlarut-larut, semakin memperburuk kondisi sektor keuangan dan pemulihan ekonomi di kawasan itu. Meningkatnya ketidakpastian di dua kawasan negara maju tersebut serta ditambah dengan bencana alam yang terjadi di daratan Jepang pada 11 Maret 2011 dan krisis geopolitik di kawasan Timur Tengah (yang berdampak pada melambungnya harga minyak dan harga komoditas lainnya) telah memicu gejolak di pasar keuangan global, meningkatkan tekanan inflasi di berbagai negara, serta memperlemah proses pemulihan ekonomi global selama tahun 2011.

Ditengah situasi perekomian global tersebut, perekonomian Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan keadaan yang kondusif dan belum terimbas oleh situasi perekonomian global tersebut. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama tahun 2011 mencapai 6,46 persen, lebih baik dari tahun 2010 yang sebesar 6,20 persen. Pertumbuhan ekonomi sebesar itu menempatkan Indonesia pada negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dibandingkan dengan negara-negara kawasan (ASEAN dan negara-negara *emerging markets*) yang justru mengalami penurunan pertumbuhan.

Peningkatan kinerja tersebut disertai dengan perbaikan kualitas pertumbuhan yang tercermin dari tingginya peran ekspor, pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai sumber pertumbuhan. Ekspor (barang dan jasa) memberikan kontribusi sebesar 6,30% terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan PMTB memberikan kontribusi masing-masing sebesar 2,66% dan 2,11%.

Kuatnya pertumbuhan konsumsi juga didukung oleh kuatnya daya beli terkait dengan meningkatnya pendapatan, struktur demografi yang sebagian besar berada dalam usia produktif, serta tingginya tingkat keyakinan konsumen. Hal ini tercermin pula dari Indeks Tendensi Konsumen (ITK) pada triwulan IV/2011 yang lebih tinggi dari 100 tepatnya sebesar 108,44. Relatif tingginya ITK pada triwulan tersebut terutama didorong oleh peningkatan pendapatan rumah tangga (indeks 108,69), rendahnya pengaruh inflasi terhadap konsumsi makanan sehari-hari dan peningkatan konsumsi makanan dan bukan makanan. Sejalan dengan harapan kondisi bisnis yang lebih baik pada triwulan I/2012, ITK pada triwulan I/2012 juga diperkirakan lebih baik (yaitu: 108,08). ITK yang lebih baik ini terutama disebabkan karena perkiraan pendapatan konsumen yang lebih baik pada triwulan I/2012 (indeks: 109,34).

Dari sisi sektoral, sektor *tradables* memperlihatkan kondisi yang menggembirakan. Hal ini terutama ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan sektor industri yang kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,60% (tertinggi dibandingkan sektor lainnya). Sementara itu, sektor *nontradables* juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan seiring dengan kuatnya aktivitas domestik. Peningkatan kinerja sektor *nontradables* terutama berasal dari sektor perdagangan, hotel, restoran, dan sektor pengangkutan dan komunikasi yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 1,59%, dan 1,01%.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga telah membuka lapangan kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 6,6% pada tahun 2011 dari 7,1% pada tahun 2010. Sejalan dengan itu, persentase penduduk miskin juga turun dari 13,33% pada tahun 2010 menjadi 12,36% pada tahun 2011. Penurunan itu didukung oleh tingkat inflasi yang menurun, upah minimum yang naik, dan nilai tukar petani yang membaik.

Secara umum, tingginya pertumbuhan ekonomi ini (yang didukung oleh terjaganya stabilitas makroekonomi, serta stabilnya kondisi politik dan keamanan dalam negeri) relatif tidak banyak terpengaruh oleh gejolak perekonomian global serta dapat berkinerja dengan lebih baik. Berlanjutnya perbaikan kinerja perekonomian dan rendahnya risiko utang luar negeri, telah menempatkan peringkat investasi Indonesia naik dari BB+ menjadi BBB- yang berarti termasuk kategori negara layak investasi (*Investment Grade*). Hal ini menyebabkan Investasi di Indonesia makin menarik di tengah krisis keuangan di Amerika Serikat dan Eropa.

Gambaran peringkat investasi tersebut juga terlihat pada kinerja sistem keuangan domestik. Pasar keuangan domestik pada tahun 2011 menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah gejolak pasar keuangan global. Daya tahan tersebut antara lain ditunjukkan oleh kinerja industri perbankan yang tetap solid serta kinerja pasar keuangan yang mampu memberikan imbal hasil yang menarik dan relatif stabil.

Industri perbankan nasional selama tahun 2011 menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Fungsi intermediasi perbankan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pertumbuhan kredit mencapai 24,1%, dimana secara kualitas menunjukkan peningkatan yang cukup berarti sejalan dengan meningkatnya penyaluran kredit kepada sektor produktif. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit investasi yang mencapai 33,2% pada tahun 2011, lebih tinggi dari pertumbuhan kredit konsumsi 24,1 %. Sementara *Loan to Deposit Ratio* (LDR) meningkat dari 75,5% pada akhir tahun 2010 menjadi 79,0% pada Desember 2011.

Kondisi membaiknya fungsi intermediasi perbankan juga tercermin dari rasio kredit bermasalah (*Non-performing Loan - NPL*) yang secara bruto hanya sebesar 2,2%, (jauh di bawah ambang batas indikatif sebesar 5%). Sementara itu rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio - CAR*) juga cukup tinggi yaitu mencapai 16,1%. Selain itu, ketersediaan likuiditas perbankan juga cukup memadai. Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2011 tumbuh sebesar 19,0%, sedangkan rasio Alat Likuid terhadap *Non-Core Deposits* tetap terjaga pada level di atas 100%, yaitu sebesar 133,4%.

Sejalan dengan industri perbankan, kinerja pasar keuangan Indonesia secara umum juga menunjukkan kinerja yang membaik. Di tengah memburuknya kinerja pasar saham dunia, kinerja pasar saham Indonesia (yang tercermin dalam IHSG) menguat sebesar 3,2% dibandingkan tahun 2010. Namun dampak memburuknya perekonomian global tersebut sempat berpengaruh juga terhadap pasar saham Indonesia yang tercermin pada penurunan IHSG di bulan September 2011 menjadi 3.549, setelah sempat mencapai level tertinggi sepanjang sejarah bursa, yaitu sebesar 4.193 pada Agustus 2011. IHSG akhirnya ditutup pada level 3.822 diakhir Desember 2011.

Di pasar keuangan sempat terjadi penarikan modal luar negeri oleh sebagian investor pada semester II tahun 2011. Hal ini cukup memberi tekanan pada nilai tukar rupiah, imbal hasil obligasi Pemerintah, dan harga saham. Nilai tukar rupiah mulai melemah pada triwulan III. Pada akhir tahun, nilai tukar rupiah ditutup pada level Rp 9.068 per dolar AS, melemah 0,6% secara point to point dibandingkan dengan Rp 8.991

per dolar AS pada akhir tahun 2010. Namun didukung oleh kuatnya fundamental sektor keuangan dan terjaganya stabilitas makroekonomi, pemulihan indeks menjadi lebih cepat dibandingkan dengan negara kawasan. Pencapaian tersebut menempatkan pasar saham Indonesia sebagai bursa dengan kinerja terbaik di negara kawasan.

Di sisi eksternal, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2011 mencatat surplus yang relatif besar, yaitu sebesar 11,9 miliar dolar AS. Hal tersebut tercermin dari surplus neraca perdagangan dan derasnya transaksi investasi langsung asing di Indonesia (FDI). Di tengah melambatnya volume perdagangan dan menurunnya harga komoditas global, kinerja ekspor Indonesia masih mencatat pertumbuhan yang tinggi sehingga mendukung peningkatan surplus neraca perdagangan khususnya komoditas non-migas. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa mencatat peningkatan dimana pada akhir 2011 nilai tersebut mencapai 110,1 miliar dolar AS atau setara dengan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

4.2. PERKEMBANGAN TABUNGAN BRUTO

**Tabel 4.1 Tabungan Bruto Menurut Sektor,
Tahun 2006-2011 (Triliun Rupiah)**

SEKTOR	2006	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
A. BUKAN KEUANGAN	832,94	953,15	1.458,13	1.579,04	1.992,21	2.267,46
1. Pemerintah	181,08	168,66	229,47	115,97	173,70	201,26
2. Perusahaan	471,60	543,14	889,53	1.064,26	1.364,81	1.514,34
- Pemerintah	3,71	40,59	64,48	52,35	7,79	98,84
- Swasta +)	467,89	502,55	825,06	1.011,91	1.357,02	1.415,50
3. Rumah Tangga	180,26	241,34	339,13	398,81	453,70	551,86
B. KEUANGAN	53,68	28,64	87,38	119,15	31,45	59,60
4. Bank ++)	44,87	9,26	68,77	78,45	8,89	44,19
5. Bukan Bank	8,82	19,39	18,61	40,69	22,57	15,41
C. LUAR NEGERI	(38,46)	2,78	(36,68)	38,90	72,92	106,81
6. Luar Negeri	(38,46)	2,78	(36,68)	38,90	72,92	106,81
JUMLAH	848,17	984,57	1.508,83	1.737,09	2.096,57	2.433,86

*) angka sementara

***) angka sangat sementara

+) terdiri dari perusahaan swasta non finansial

++) termasuk Bank Sentral

Definisi dari tabungan bruto dan tabungan neto disajikan secara rinci pada lampiran 2 di halaman belakang buku ini. Perkembangan tabungan bruto menurut sektor

selama tahun 2006–2011 disajikan pada tabel 4.1. Selama kurun waktu 2006-2011, tabungan bruto memperlihatkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan rata-rata setahun sebesar 23,47 persen. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 53,25 persen. Terakhir pada tahun 2011 tabungan bruto mengalami peningkatan sebesar Rp2.433,86 triliun (lihat tabel 4.1), atau meningkat 16,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara sektoral, dibandingkan sektor-sektor lainnya selama periode tersebut sektor perusahaan (swasta dan perusahaan pemerintah) mengalami peningkatan tabungan bruto yang tertinggi. Sedangkan sektor Keuangan dan Luar Negeri mempunyai tabungan bruto yang paling rendah.

**Tabel 4.2 Struktur Tabungan Bruto Menurut Sektor
Tahun 2006-2011 (persen)**

SEKTOR	2006	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
A. BUKAN KEUANGAN	98,21	96,81	96,64	90,90	95,02	93,16
1. Pemerintah	21,35	17,13	15,21	6,68	8,28	8,27
2. Perusahaan	55,60	55,17	58,96	61,27	65,10	62,22
- Pemerintah	0,44	4,12	4,27	3,01	0,37	4,06
- Swasta +)	55,17	51,04	54,68	58,25	64,73	58,16
3. Rumah Tangga	21,25	24,51	22,48	22,96	21,64	22,67
B. KEUANGAN	6,33	2,91	5,79	6,86	1,50	2,45
4. Bank ++)	5,29	0,94	4,56	4,52	0,42	1,82
5. Bukan Bank	1,04	1,97	1,23	2,34	1,08	0,63
C. LUAR NEGERI	(4,53)	0,28	(2,43)	2,24	3,48	4,39
6. Luar Negeri	(4,53)	0,28	(2,43)	2,24	3,48	4,39
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) angka sementara

+) terdiri dari perusahaan swasta non finansial

***) angka sangat sementara

++) termasuk Bank Sentral

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, terlihat bahwa selama periode 2006-2011 sektor perusahaan (swasta dan perusahaan pemerintah) memiliki peranan yang paling dominan dalam pembentukan tabungan bruto secara keseluruhan. Kontribusi sektor ini dalam pembentukan tabungan bruto rata-rata mencapai 59,71 persen. Kontribusi tertinggi dari sektor ini terhadap total tabungan bruto selama periode tersebut terjadi di tahun 2010 sebesar 65,10 persen dan kontribusi terendah terjadi di tahun 2007 sebesar 55,17 persen.

Hal tersebut menunjukkan besarnya peran yang dimainkan oleh sektor ini dalam kontribusinya terhadap pembentukan tabungan bruto secara nasional. Tabungan tersebut nantinya akan digunakan untuk kegiatan investasi baik investasi fisik maupun investasi finansial.

Sedangkan pada sektor Keuangan, walaupun kontribusinya terhadap pembentukan tabungan bruto secara nasional tidak signifikan, namun perannya sebagai lembaga intermediasi antara sektor surplus dan defisit, sangat menentukan terhadap jalannya roda perekonomian nasional. Peran tersebut terutama terlihat dalam penyediaan dana investasi dan konsumsi yang dibutuhkan dalam meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian nasional. Selama periode tersebut, kontribusi sektor keuangan secara rata-rata hanya sebesar 4,31 persen/tahun. Kontribusi tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi sektor lainnya yaitu sektor Rumah Tangga dan Pemerintah yang kontribusinya masing-masing sebesar 22,59 persen/tahun dan 12,81 persen/tahun (terhadap pembentukan tabungan bruto nasional).

TABEL 4.3 Struktur Tabungan Bruto Menurut Sektor Terhadap PDB Tahun 2006-2011 (persen)

SEKTOR	2006	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
A. BUKAN KEUANGAN	24,94	24,12	29,47	28,17	30,95	30,53
1. Pemerintah	5,42	4,27	4,64	2,07	2,70	2,71
2. Perusahaan	14,12	13,75	17,98	18,98	21,21	20,39
- Pemerintah	0,11	1,03	1,30	0,93	0,12	1,33
- Swasta +)	14,01	12,72	16,67	18,05	21,08	19,06
3. Rumah Tangga	5,40	6,11	6,85	7,11	7,05	7,43
B. KEUANGAN	1,61	0,73	1,77	2,13	0,49	0,80
4. Bank ++)	1,34	0,23	1,39	1,40	0,14	0,60
5. Bukan Bank	0,26	0,49	0,38	0,73	0,35	0,21
C. LUAR NEGERI	(1,15)	0,07	(0,74)	0,69	1,13	1,44
6. Luar Negeri	(1,15)	0,07	(0,74)	0,69	1,13	1,44
JUMLAH	25,40	24,92	30,49	30,99	32,57	32,77
PDB (Triliun Rp)	3.339,22	3.950,89	4.948,69	5.606,20	6.436,27	7.427,09

*) angka sementara

***) angka sangat sementara

+) terdiri dari perusahaan swasta non finansial

++) termasuk Bank Sentral

Tabel 4.3 memperlihatkan persentase struktur tabungan bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari masing-masing sektor, dimana secara umum persentase seluruh sektor cenderung berfluktuatif. Selama periode 2006 – 2011 persentase terbesar

dari struktur¹ ini masih pada sektor bukan keuangan. Sektor pemerintah yang merupakan bagian dari sektor Bukan Keuangan merupakan sektor dengan struktur yang cukup berfluktuatif. Persentase terkecil pada sektor pemerintah ini terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 2,07 persen, sedangkan persentase terbesar terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 5,40 persen. Pada sektor bukan Keuangan ini, kontribusi terbesar dari struktur ini ada pada sektor Perusahaan terutama sektor Perusahaan Swasta. Persentase struktur dari sektor Perusahaan selama periode tersebut berkisar antara 13,75 persen (tahun 2007) hingga 20,38 persen (tahun 2011). Sedangkan satu sektor lagi dalam sektor Bukan Keuangan yaitu sektor Rumah Tangga persentasenya selama periode 2006-2011 cenderung meningkat dari tahun ke tahun, yaitu berada pada kisaran 5,40 persen (tahun 2006) hingga 7,44 persen (tahun 2011). Namun hanya pada tahun 2010 peranannya mengalami sedikit perlambatan yaitu sebesar 7,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 7,11 persen.

Pada sektor Keuangan, peranan struktur ini selama periode 2006-2011 berada pada kisaran 0,49 persen (tahun 2010) hingga 2,13 persen (tahun 2009) dan cenderung berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pada sektor ini, persentase sektor Bank relatif lebih besar dibandingkan sektor Bukan Bank. Pada sektor Bank, persentase terbesar ada di tahun 2008 sebesar 1,39 persen, sedangkan persentase terkecil hanya sebesar 0,14 (tahun 2010). Sementara pada sektor Bukan Bank persentasenya hanya berkisar 0,21 persen (tahun 2011) hingga 0,73 (tahun 2009).

Disamping sektor Keuangan dan sektor Perusahaan Pemerintah, struktur dari sektor Luar Negeri juga relatif kecil dan juga berfluktuasi. Bahkan pada beberapa tahun kontribusinya negatif, yaitu pada tahun 2006 dan 2008 masing-masing sebesar -1,15 dan -0,74.

4.3. PERKEMBANGAN INVESTASI

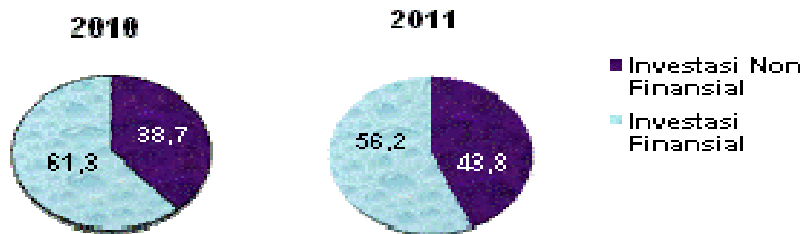
4.3.1. Gambaran Umum Investasi Indonesia 2006 - 2011

Perkembangan investasi dalam konteks ini adalah investasi non finansial dan investasi finansial. Investasi non finansial terjadi akibat adanya proses perubahan (penambahan maupun pengurangan) aset non finansial berupa barang modal dan persediaan (inventori). Sedangkan investasi finansial terjadi karena adanya transaksi

¹ Untuk mempersingkat, yang dimaksud struktur di sini adalah struktur tabungan bruto terhadap PDB

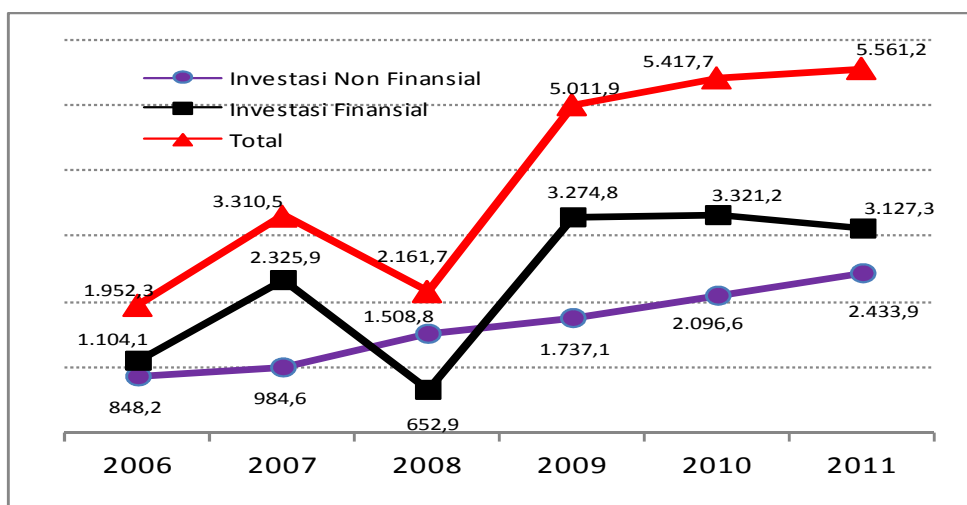
finansial oleh para pelaku ekonomi di pasar keuangan melalui berbagai macam instrumen finansial, seperti saham, obligasi, SBI, kredit, valas, dan sebagainya.

Grafik 4.1 Proporsi Investasi Indonesia, Tahun 2010 dan 2011 (Persen)



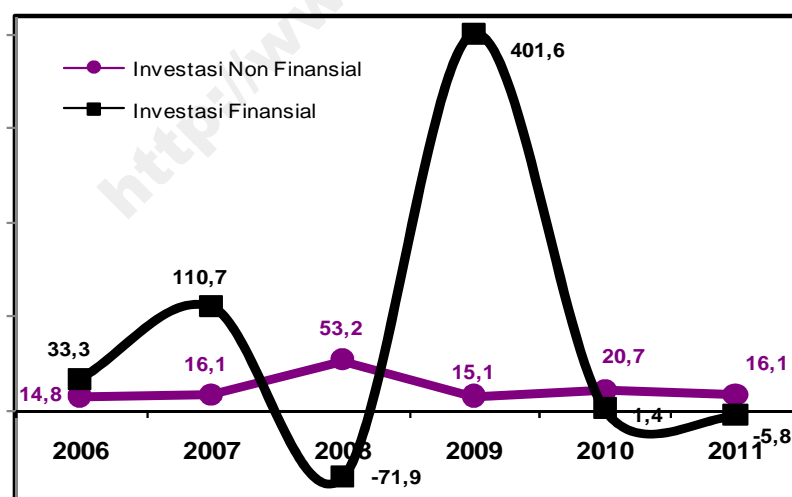
Pada umumnya peran investasi finansial lebih dominan dibandingkan dengan investasi non finansial. Pada tahun 2010 kontribusi yang diberikan investasi finansial terhadap total investasi mencapai 61,3 persen. Namun pada tahun 2011 kontribusinya sedikit turun menjadi 56,2 persen. Penurunan kontribusi investasi ini pada tahun 2011 disebabkan terjadi peningkatan pada kontribusi investasi non finansial yaitu dari 38,7 persen di tahun 2010 menjadi 43,8 persen ditahun 2011. Disamping itu investasi finansial pada tahun 2011 juga mengalami perlambatan pada beberapa instrumen, yaitu: cadangan valas pemerintah, klaim dalam valas lainnya, modal saham dan penyertaan, dan rekening antar bank.

Grafik 4.2 Perkembangan Investasi Indonesia Tahun 2006 – 2011 (Triliun Rupiah)



Berdasarkan grafik 4.2, terlihat bahwa selama periode 2006-2011 nilai investasi Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat, walaupun sempat mengalami penurunan akibat krisis perekonomian yang melanda tahun 2008. Tren nilai yang terus meningkat tersebut ditunjukkan pada investasi non finansial. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhannya yang berkecenderungan meningkat, namun di beberapa periode pertumbuhannya sempat mengalami kontraksi seperti yang terjadi di tahun 2009 dan 2011 (grafik 4.3). Pada tahun 2009 pertumbuhan investasi non finansial ini hanya sebesar 15,1 persen jauh di bawah tahun sebelumnya yang sebesar 53,2 persen. Begitu pula di tahun 2011, pertumbuhannya yang sebesar 16,1 persen mengalami sedikit kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 20,7 persen. Kontraksi pada investasi non finansial tahun 2009 lebih banyak di sebabkan perubahan inventori yang negatif akibat berkurangnya inventori (stok) nasional. Sedangkan penurunan investasi non finansial di tahun 2009 lebih banyak di sebabkan menurunnya investasi dalam bentuk mesin dan perlengkapan dalam negeri, alat angkutan dalam negeri, dan barang lainnya dari dalam negeri.

Grafik 4.3 Perkembangan Pertumbuhan Investasi Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2006 – 2011 (Persen)



Investasi finansial sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian global. Ketika terjadi krisis perekonomian global pada tahun 2008, kondisi pasar modal sempat terpuruk. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan investasi finansial mengalami kontraksi yang cukup dalam dari 110,7 persen di tahun 2007 menjadi minus 71,9 persen di tahun 2008. Kondisi tersebut dapat kembali normal di tahun 2009, bahkan pertumbuhannya di tahun tersebut melesat jauh hingga sebesar 401,6 persen. Namun seiring dengan kondisi

ekonomi global yang kembali mengancam di tahun 2010 serta melanda kawasan Eropa dan Amerika Serikat di tahun 2011, investasi finansial kembali tertekan dimana terjadi kontraksi sampai -5,8 persen di tahun 2011.

4.3.2. Perkembangan Investasi Non Finansial Indonesia Tahun 2006 - 2011

Dalam teori ekonomi makro dijelaskan bahwa tabungan bruto dan investasi non finansial apabila dilihat secara total², akan bernilai sama. Tetapi jika dilihat secara sektoral maka antara tabungan bruto dan investasi non finansial dapat memiliki nilai yang berbeda. Pola perkembangan yang ditunjukkan oleh investasi non finansial secara nasional sama dengan pola perkembangan tabungan bruto.

**Tabel 4.4 Investasi Non Finansial Menurut Sektor
Tahun 2006-2011 (Triliun Rupiah)**

SEKTOR	2006	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
A. BUKAN KEUANGAN	843,47	981,22	1.499,56	1.725,13	2.081,45	2.432,02
1. Pemerintah	113,72	133,69	178,64	186,60	168,11	219,90
2. Perusahaan	698,33	685,75	1.134,40	1.323,23	1.695,55	1.985,10
- Pemerintah	78,01	75,51	114,54	110,37	28,10	130,45
- Swasta +)	620,32	610,25	1.019,85	1.212,86	1.667,45	1.854,65
3. Rumah Tangga	31,42	161,77	186,53	215,30	217,78	227,02
B. KEUANGAN	4,70	3,36	9,27	11,96	15,13	1,85
4. Bank ++)	3,13	3,16	6,33	5,76	1,54	6,13
5. Bukan Bank	1,57	0,20	2,94	6,21	13,59	(4,28)
C. LUAR NEGERI	-	-	-	-	-	-
6. Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	848,17	984,57	1.508,83	1.737,09	2.096,57	2.433,86

*) angka sementara

***) angka sangat sementara

+) terdiri dari perusahaan swasta non finansial

++) termasuk Bank Sentral

Definisi dari investasi non finansial (INF) disajikan secara rinci pada lampiran 2 di halaman belakang buku ini. Tabel 4.4. menyajikan perkembangan INF yang dilakukan masing-masing sektor beserta nilainya selama tahun 2006-2011. Sedangkan Tabel 4.5 menggambarkan kontribusi dari masing-masing sektor dalam menciptakan INF selama tahun 2006 – 2011. Secara sektoral, sektor perusahaan (swasta dan perusahaan pemerintah) mengambil peran yang sangat dominan dalam melakukan INF. Hal ini

² Artinya penjumlahan tabungan bruto dan investasi non finansial dari seluruh sektor

terlihat jelas dari besarnya dana untuk investasi ini yang mencapai Rp 1.873,84 triliun pada tahun 2011. Jumlah tersebut merupakan 76,99 persen dari nilai INF yang dilakukan oleh seluruh sektor. Besarnya nilai INF yang dikeluarkan oleh sektor ini merupakan salah satu ciri khas dari sektor ini, dimana untuk menjamin kegiatan ekonominya dapat berjalan dengan baik, biasanya diperlukan investasi yang cukup besar dalam bentuk investasi non finansial (berupa barang modal dan stok).

Hal sebaliknya terjadi pada sektor keuangan (bank dan bukan bank), dimana INF yang dilakukan sangat tidak berarti. Hal ini disebabkan investasi yang dominan dilakukan di sektor ini sebagian besar dalam bentuk investasi finansial, seperti giro, deposito, surat berharga (saham dan obligasi) swasta, surat utang negara, dan sebagainya.

Selain sektor Perusahaan, sektor-sektor yang juga berperan cukup dominan dalam pembentukan INF adalah Pemerintah dan Rumah Tangga. Selama tahun 2006 – 2011, nilai INF sektor pemerintah berkisar antara Rp 113,72 triliun hingga Rp 219,90 triliun. Sedangkan nilai INF sektor Rumah Tangga berkisar antara Rp 31,32 triliun hingga Rp 338,27 triliun.

**Tabel 4.5 Struktur Investasi Non Finansial Menurut Sektor
Tahun 2006-2011 (persen)**

SEKTOR	2006	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
A. BUKAN KEUANGAN	99,45	99,66	99,39	99,31	99,28	99,92
1. Pemerintah	13,41	13,58	11,84	10,74	8,02	9,04
2. Perusahaan	82,33	69,65	75,18	76,17	80,87	81,56
- Pemerintah	9,20	7,67	7,59	6,35	1,34	5,36
- Swasta +)	73,14	61,98	67,59	69,82	79,53	76,20
3. Rumah Tangga	3,70	16,43	12,36	12,39	10,39	9,33
B. KEUANGAN	0,55	0,34	0,61	0,69	0,72	0,08
4. Bank ++)	0,37	0,32	0,42	0,33	0,07	0,25
5. Bukan Bank	0,18	0,02	0,19	0,36	0,65	(0,18)
C. LUAR NEGERI	-	-	-	-	-	-
6. Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) angka sementara

***) angka sangat sementara

+) terdiri dari perusahaan swasta non finansial

++) termasuk Bank Sentral

Dari tabel 4.5. diatas jelas terlihat bahwa hampir sebagian besar INF dilakukan oleh sektor Perusahaan (Swasta dan Perusahaan Pemerintah). Selama tahun 2006 – 2011, secara rata-rata sektor ini mengambil porsi sebesar 76,87 persen dari total INF seluruh sektor. Nilai INF yang dikeluarkannya pun cukup besar, dimana pada tahun 2011

mencapai Rp1.873,84 triliun. Berdasarkan Tabel 4.5 juga, terlihat bahwa selama periode 2006-2011, kontribusi sektor perusahaan terhadap INF secara umum relatif stabil. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 82,33 persen. Namun pada tahun 2007 kontribusinya mengalami sedikit penurunan yaitu dari 82,33 persen di tahun 2006 menjadi 61,98 persen. Penurunan kontribusi juga terjadi di tahun 2011 yaitu sebesar 67,96 persen dari tahun 2010 yang sebesar 79,53 persen.

Sektor yang juga mempunyai kontribusi nyata terhadap pembentukan INF adalah sektor Pemerintah dan Rumah Tangga. Selama tahun 2006 – 2011 rata-rata kontribusi sektor-sektor ini sebesar 11,10 persen dan 11,53 persen. Namun kontribusi sektor pemerintah dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Seperti terlihat di tahun 2007 yang kontribusinya sebesar 13,58 persen. Setelah mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2006 yang sebesar 13,41 persen, kontribusinya terus mengalami penurunan hingga tahun 2010 sebesar 8,02 persen. Terakhir di tahun 2011 kontribusi tersebut kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 9,04 persen. Sedangkan kontribusi sektor rumahtangga cenderung fluktuatif, bahkan pada tahun 2006 kontribusinya hanya sebesar 3,70 persen jauh dibawah rata-rata kontribusinya yang sebesar 11,53 persen.

Tabel 4.6 Struktur Investasi Non Finansial Menurut Sektor Terhadap PDB Tahun 2006-2011 (persen)

SEKTOR	2006	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
A. BUKAN KEUANGAN	25,26	24,84	30,30	30,77	32,34	32,75
1. Pemerintah	3,41	3,38	3,61	3,33	2,61	2,96
2. Perusahaan	20,91	17,36	22,92	23,60	26,34	26,73
- Pemerintah	2,34	1,91	2,31	1,97	0,44	1,76
- Swasta +)	18,58	15,45	20,61	21,63	25,91	24,97
3. Rumah Tangga	0,94	4,09	3,77	3,84	3,38	3,06
B. KEUANGAN	0,14	0,09	0,19	0,21	0,24	0,02
4. Bank ++)	0,09	0,08	0,13	0,10	0,02	0,08
5. Bukan Bank	0,05	0,01	0,06	0,11	0,21	(0,06)
C. LUAR NEGERI	-	-	-	-	-	-
6. Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	25,40	24,92	30,49	30,99	32,57	32,77
PDB (Triliun Rp)	3.339,22	3.950,89	4.948,69	5.606,20	6.436,27	7.427,09

*) angka sementara

***) angka sangat sementara

+) terdiri dari perusahaan swasta non finansial

++) termasuk Bank Sentral

Kontribusi sektor keuangan (Bank dan Bukan Bank) terhadap keseluruhan investasi non finansial tidak terlalu signifikan. Bahkan selama periode 2006-2011, rata-rata kontribusi sektor tersebut tidak mencapai 1 persen. Minimnya investasi non finansial

yang dilakukan sektor keuangan dikarenakan investasinya sebagian besar dalam bentuk investasi finansial.

Tabel 4.6 memperlihatkan persentase struktur tabungan bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari masing-masing sektor. Secara umum persentase dari seluruh sektor cenderung berfluktuatif. Persentase terbesar dari struktur³ ini masih pada sektor-sektor Perusahaan (swasta dan Perusahaan Pemerintah), Pemerintah, dan Rumah Tangga. Rata-rata kontribusi dari ketiga sektor tersebut masing-masing sebesar 22,73 (sektor Perusahaan), 3,43 (sektor Rumah Tangga), dan 3,22 (sektor Pemerintah).

4.3.3. Perkembangan Investasi Finansial Indonesia Tahun 2011

Tabel 4.7 menggambarkan komposisi jenis-jenis investasi finansial berdasarkan instrumen finansial. Selama tahun 2011 investasi finansial mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2010. Perubahan ini terkait dengan kondisi perekonomian global yang tengah melanda hampir seluruh daratan Eropa serta Amerika Serikat. Hal ini berakibat secara langsung terhadap kinerja pasar keuangan domestik.

Tabel 4.7 Jenis-jenis Investasi Finansial menurut Instrumen Finansial Tahun 2011 (Triliun rupiah)

	Nilai	%
01. Cadangan Valas Pemerintah	113,56	2,82
02. Klaim dalam Valas Lainnya	(2,70)	(0,07)
03. Uang dan Simpanan	519,06	12,90
04. Surat Berharga Jangka Pendek	39,29	0,98
05. Kredit	697,39	17,34
06. Modal Saham dan Penyertaan	1.414,00	35,15
a. Modal Saham	1.227,72	30,52
b. Penyertaan	186,28	4,63
07. Surat Berharga Jangka Panjang	150,38	3,74
a. Surat Berharga Pemerintah	123,81	3,08
b. Surat Berharga Lainnya	26,56	0,66
08. Cadangan Asuransi dan Pensiun	44,04	1,09
09. Kredit Dagang	84,18	2,09
10. Rekening Antar Bank	85,10	2,12
11. Rupa-rupa	878,68	21,84
Jumlah	4.025,68	100,00

³ Untuk mempersingkat, yang dimaksud struktur di sini adalah struktur tabungan bruto terhadap PDB

Investasi finansial yang tercipta pada tahun 2011 sebesar Rp4.022,98 triliun atau turun 5,8 persen dibandingkan tahun 2010. Penurunan ini terjadi pada beberapa instrumen yaitu cadangan valas pemerintah, klaim dalam valas lainnya, modal saham dan penyertaan, serta rekening antar bank. Bahkan instrumen klaim dalam valas lainnya serta modal saham dan penyertaan mengalami penurunan investasi (divestasi) hingga 90,76 persen dan 63,34 persen.

Selama tahun 2011 saham masih menjadi instrumen yang paling menarik untuk berinvestasi, dimana kontribusinya terhadap investasi finansial adalah paling besar yaitu 30,52 persen atau senilai Rp. 1.227,72 triliun. Kemudian diikuti kredit serta uang dan simpanan masing-masing dengan kontribusi 17,34 persen dan 12,90 persen.

Tabel 4.8 menggambarkan perubahan kepemilikan saham masing-masing sektor selama tahun 2011. Sektor Perusahaan Swasta Non Finansial merupakan sektor yang paling dominan dalam menempatkan dananya di instrumen ini yaitu sebesar Rp19,66 triliun atau 66,04 persen dari seluruh penempatan. Diikuti sektor rumah tangga yang menempatkan dananya sebesar Rp61,56 triliun (21,21 persen). Sedangkan sektor Luar Negeri mengurangi investasinya pada instrumen ini (*net selling*), yaitu sebesar Rp3,22 triliun. Sektor lain yang juga melakukan *net selling* pada instrumen ini adalah Pemerintahan Umum walupun perubahannya tidak signifikan.

Tabel 4.8 Komposisi Perubahan Kepemilikan Modal Saham Menurut Sektor, Tahun 2011 (Triliun Rupiah)

SEKTOR	Perubahan	%
1. Bank Indonesia	0,00	0,00
2. Perbankan	0,00	0,00
3. Lembaga Keuangan Bukan Bank	34,54	11,90
4. Rumah Tangga	61,56	21,21
5. Pemerintahan Umum	(0,05)	(0,02)
6. Perusahaan Pemerintah	5,71	1,97
7. Perusahaan Swasta Non Finansial	191,66	66,04
8. Luar Negeri	(3,22)	(1,11)
Jumlah	290,2	100,0

Berkaitan dengan kepemilikan investasi, menarik untuk disimak bagaimana pola kegiatan investasi dari investor asing di pasar keuangan domestik. Tabel 4.9 memperlihatkan perubahan kepemilikan beberapa jenis investasi dari investor asing di

pasar keuangan domestik. Pada tabel tersebut terlihat bahwa investor asing selama tahun 2011 telah menguasai beberapa instrumen finansial, diantaranya dalam surat berharga lainnya (obligasi swasta), penyertaan, kredit dalam valas, dan surat berharga pemerintah. Bahkan dalam surat berharga lainnya, sektor ini juga menampung kepemilikan sektor lain yang dilepas (selain menambah surat berharga dari sektor yang menerbitkannya). Sehingga kepemilikan investor asing untuk instrumen ini mencapai 113,95 persen. Sedangkan pada penyertaan, kredit dalam valas, dan surat berharga pemerintah, penambahan kepemilikan dari investor asing terhadap total penambahannya masing-masing sebesar 56,48 persen (penyertaan), 47,05 persen (kredit dalam valas) dan 46,46 persen (surat berharga pemerintah)

Tabel 4.9 Investasi Luar Negeri di Pasar Keuangan Domestik Menurut Jenis Investasi, Tahun 2011 (Triliun Rupiah)

Jenis Investasi	PERUBAHAN NILAI INVESTASI LN	PERUBAHAN TOTAL INVESTASI	% THD TOTAL INVESTASI
01. Klaim Dalam Valas Lainnya	(2,22)	(2,70)	81,95
02. Uang dan Simpanan			
a. Dalam Valas	3,04	54,08	5,62
b. Dalam Rupiah	(0,79)	463,93	(0,17)
03. Surat Berharga Jangka Pendek & Menengah	12,29	39,29	31,29
04. Kredit			
a. Kredit Institusi Lain Dalam Rupiah	0,10	97,38	0,10
b. Kredit Dalam Valas	108,19	229,98	47,05
05. Modal Saham dan Penyertaan			
a. Modal Saham	(3,22)	290,20	(1,11)
b. Penyertaan	128,84	228,14	56,48
06. Surat Berharga Jangka Panjang			
a. Surat Berharga Pemerintah	57,52	123,81	46,46
b. Surat Berharga Lainnya	30,27	26,56	113,95
07. Kredit Dagang	10,51	84,18	12,49
08. Sertifikat Bank Indonesia	(47,13)	(79,86)	59,02
09. Rupa-rupa	0,47	878,68	0,05

Selain menambah investasi dalam beberapa instrumen, investor asing selama tahun 2011 juga melepas beberapa investasinya, diantaranya Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Modal Saham, Uang dan Simpanan Dalam Rupiah, dan Klaim Dalam Valas Lainnya. Bahkan pada instrumen SBI, investor asing melakukan *net selling* hingga Rp 47,13 triliun yang merupakan 59,02 persen dari seluruh SBI yang ditarik. Sedangkan pengurangan dari instrumen finansial lainnya tidak terlalu signifikan. Hasil dari *net*

selling ini telah ditempatkan pada instrumen-instrumen lainnya, seperti yang telah dijelaskan diatas.

4.4. PERKEMBANGAN CELAH TABUNGAN DAN INVESTASI (*S-I Gap*) TAHUN 2006 - 2011

Tabel 4.10 menggambarkan nilai celah tabungan dan investasi (*S-I Gap*) menurut sektor selama tahun 2006-2011. *S-I Gap* (*Saving Investment Gap*) dapat menggambarkan kemampuan suatu sektor untuk memberikan pinjaman bagi sektor lain (*net lending*) atau memperoleh hutang dari sektor lain (*net borrowing*) dalam membiayai investasi non finansialnya. Dalam kaitan dengan sektor Luar Negeri (LN), jika *S-I Gap* sektor ini negatif ini berarti sektor LN memperoleh pinjaman dari sektor domestik. Dalam hal ini sektor domestik mengalami *net lending*, begitu pula sebaliknya.

Tabel 4.10 *S-I Gap* Menurut Sektor Tahun 2006-2011 (Triliun Rupiah)

SEKTOR	2006	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
A. BUKAN KEUANGAN	(10,52)	(28,07)	(41,43)	(146,09)	(89,24)	(164,56)
1. Pemerintah	67,36	34,97	50,84	(70,63)	5,58	(18,65)
2. Perusahaan	(226,73)	(142,61)	(244,86)	(258,97)	(330,74)	(470,76)
- Pemerintah	(74,30)	(34,91)	(50,07)	(58,01)	(20,31)	(31,61)
- Swasta +)	(152,43)	(107,70)	(194,80)	(200,95)	(310,43)	(439,15)
3. Rumah Tangga	148,85	79,57	152,60	183,51	235,91	324,84
B. KEUANGAN	48,98	25,29	78,11	107,19	16,33	57,75
4. Bank ++)	41,74	6,10	62,44	72,70	7,35	38,06
5. Bukan Bank	7,25	19,19	15,67	34,49	8,98	19,69
C. LUAR NEGERI	(38,46)	2,78	(36,68)	38,90	72,92	106,81
6. Luar Negeri	(38,46)	2,78	(36,68)	38,90	72,92	106,81
JUMLAH	-	-	-	-	-	-

*) angka sementara

***) angka sangat sementara

+) terdiri dari perusahaan swasta non finansial

++) termasuk Bank Sentral

Selama tahun 2006 – 2011, sektor Perusahaan senantiasa mengalami *net borrowing*. Kekurangan dana tersebut dapat disediakan oleh sektor domestik lainnya, terutama sektor Rumah Tangga. Jika sektor domestik lainnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dana tersebut, maka akan dipenuhi dari sektor LN. Dalam hal ini sektor LN mengalami *net lending*, sebaliknya sektor domestik mengalami *net borrowing*. Kondisi

tersebut dapat terlihat pada tahun 2007, 2009, 2010, dan 2011. Namun pada tahun 2006 dan 2008, sektor domestik mengalami *net lending*, sedangkan sektor LN mengalami *net borrowing*. Hal ini berarti pada tahun 2006 misalnya, sektor domestik mampu memberi pinjaman kepada sektor LN sebesar Rp38,46 triliun.

Berbeda dengan sektor Perusahaan yang merupakan sektor defisit, sektor Rumah Tangga dan Keuangan adalah sektor surplus. Sektor-sektor ini memiliki kemampuan untuk memberi pinjaman kepada sektor lain yang kekurangan dana, bahkan ke sektor LN sekalipun, seperti yang terlihat pada tahun 2006 dan 2008. Selama tahun 2006 – 2011 rata-rata surplus sektor Rumah Tangga mencapai Rp169,15 pertahun, dan rata-rata surplus sektor Keuangan hanya sebesar Rp55,61 triliun pertahun. Sedangkan rata-rata defisit pada sektor Perusahaan adalah sebesar Rp260,71 triliun pertahun. Sehingga selama periode tersebut masih diperlukan tambahan dana dari sektor LN untuk menutupi kekurangan dana pada sektor perusahaan.

4.5. TINJAUAN NAD SEKTOR LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), TAHUN 2011

Peran intermediasi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam LKBB cukup strategis dan berpotensi besar dalam mempengaruhi terjadinya transaksi finansial secara keseluruhan. Dengan pertimbangan tersebut maka dalam tulisan ini akan dianalisis tersendiri mengenai arus dana sektor LKBB selama tahun 2011. Sektor-sektor dalam LKBB sebenarnya jumlahnya cukup banyak, namun dalam bab ini hanya akan diuraikan terhadap 4 (empat) sektor LKBB saja. Pertimbangannya adalah ke empat sektor tersebut mempunyai pengaruh yang nyata terhadap kegiatan sektor LKBB secara keseluruhan. Keempat sektor LKBB tersebut adalah : Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Dana Pensiun, dan Perusahaan Pegadaian⁴.

4.5.1. Tabungan Bruto, Investasi Non Finansial, dan S-I Gap LKBB 2011

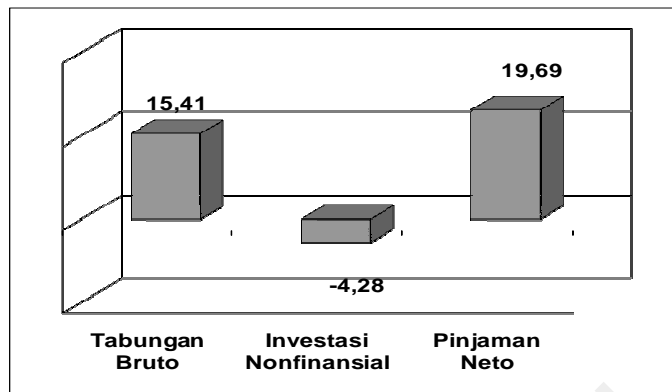
Pada Tabel 15 (yang disajikan pada lampiran) terlihat bahwa selama tahun 2011, tabungan bruto yang tercipta oleh LKBB bertambah sebesar Rp15,41 triliun⁵ atau 0,63 persen dari total tabungan bruto. Penambahan tabungan bruto tersebut masih dibawah penambahan tabungan bruto pada tahun sebelumnya yang meningkat sebesar Rp 22,56

⁴ Untuk selanjutnya LKBB akan diwakili oleh ke empat sektor ini

⁵ turun 31,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

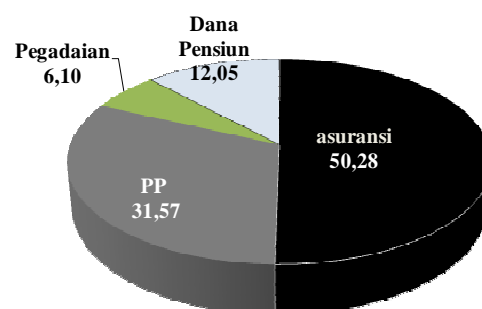
triliun. Pada saat yang sama investasi non finansialnya selama tahun 2011 justru berkurang sebesar Rp4,28 triliun, jauh dibawah tahun sebelumnya yang meningkat sebesar Rp13,58 triliun.

Grafik 4.4 Tabungan Bruto, Investasi Non Finansial, dan Pinjaman Neto LKBB, Tahun 2011 (Triliun Rupiah)



Akibat menurunnya investasi non finansial selama tahun 2011, pinjaman neto (*S-I gap*) sektor LKBB menjadi meningkat sebesar Rp19,69 triliun. Namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, *S-I gap* ini turun sebesar 119,25 persen. Penurunan tabungan bruto dan investasi non finansial LKBB dibandingkan tahun sebelumnya ini secara tidak langsung akibat kondisi perekonomian global yang masih dilanda krisis yang berkepanjangan sepanjang tahun 2011.

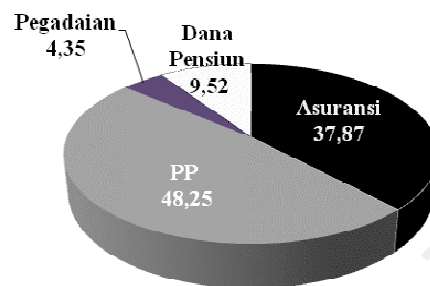
Grafik 4.5 Komposisi Tabungan Bruto Menurut Sektor-sektor LKBB, Tahun 2011 (Persen)



Jika diamati dari kinerja sektoralnya, maka tabungan bruto LKBB sebagian besar berasal dari sektor Asuransi yang porsinya mencapai 50,28 persen dari total tabungan bruto LKBB. Pada tahun sebelumnya porsi tabungan bruto sektor ini hanya sebesar 43,85

persen dari total tabungan bruto LKBB. Namun penambahan tabungan bruto sebesar Rp7,75 triliun rupiah di tahun 2011 ternyata lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp9,87 triliun atau turun sebesar 21,52 persen. Penurunan tabungan bruto dibandingkan tahun sebelumnya juga terjadi pada Perusahaan Pembiayaan dan Dana Pensiun, masing-masing sebesar 34,10 persen dan 58,28 persen.

Grafik 4.6 Proporsi *S - I gap* LKBB menurut sektor, Tahun 2011 (Persen)



S-I gap yang terjadi pada LKBB di tahun 2011 ini lebih banyak disebabkan oleh kenaikan *S-I gap* pada sektor Perusahaan Pembiayaan (PP) sebesar Rp9,50 triliun atau 48,25 persen dari *S-I gap* LKBB. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari semua sektor LKBB, hanya sektor Asuransi yang mengalami penurunan *S-I gap* yaitu sebesar 24,25 persen. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan tabungan bruto di sektor tersebut serta peningkatan investasi non finansialnya yang cukup signifikan selama tahun 2011.

4.5.2. Investasi Finansial LKBB 2011

Sebagai bagian dari upaya ekspansi kegiatan usahanya, maka di samping meningkatkan investasi riil, LKBB utamanya juga melakukan investasi finansial. Hampir sebagian besar aset yang dimiliki LKBB adalah dalam bentuk aset finansial. Selama tahun 2011 LKBB menambah investasi finansialnya dalam berbagai instrumen sebesar Rp174,59 triliun. Selain menambah investasi finansialnya, sektor ini juga mengurangi investasi finansialnya di beberapa instrumen sebesar Rp13,36 triliun. Sehingga secara neto masih terjadi penambahan investasi finansial sebesar Rp161,23 triliun atau meningkat sebesar 7,82 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 4.11 Perubahan Portofolio Investasi Finansial LKBB, Tahun 2011
(Triliun Rupiah)**

Jenis Investasi Finansial	Penambahan	Pengurangan	neto
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Cadangan Valas Pemerintah			
02. Klaim dalam Valas Lainnya	0,79		0,79
03. Uang dan Simpanan	47,95		47,95
04. Surat Berharga Jangka Pendek	7,39		7,39
05. Kredit	62,29		62,29
06. Modal Saham dan Penyertaan	31,07		31,07
07. Surat Berharga Jk Pjg	25,10		25,10
08. Cadangan Asuransi dan Pensiun	0,00		0,00
09. Kredit Dagang			
10. Rekening Antar Bank		5,07	(5,07)
11. Rupa-rupa		8,28	(8,28)
Jumlah	174,59	13,36	161,23

Penambahan aset finansial didominasi oleh instrumen finansial berupa kredit (Rp62,29 triliun), diikuti uang dan simpanan (Rp47,95 triliun), modal saham dan penyertaan (Rp31,07 triliun), dan surat berharga jangka panjang (Rp25,10 triliun). Sedangkan sektor ini mengurangi aset finansialnya pada instrumen rekening antar bank (Rp5,07 triliun) dan rupa-rupa (Rp8,28 triliun).

Dari segi pembiayaan investasi, sektor-sektor LKBB menggunakan berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Sumber pembiayaan internal berupa dari *S-I gap*, sedangkan sumber eksternalnya berasal dari transaksi di pasar keuangan. Sumber pembiayaan eksternal ini akan menjadi kewajiban bagi LKBB. Selama tahun 2011, LKBB mampu mendapatkan sumber dana eksternal sebesar Rp141,71 triliun. Sebagian besar tersebut berupa cadangan asuransi dan pensiun yang bertambah sebesar Rp44,04 triliun. Peningkatan yang terjadi pada instrumen tersebut disebabkan meningkatnya kewajiban tersebut di Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Dana Pensiun masing-masing sebesar Rp33,22 triliun, dan Rp10,82 triliun.

**Tabel 4.12 Sumber Pembiayaan Investasi Finansial LKBB, Tahun 2011
(Triliun Rupiah)**

Jenis Sumber Pembiayaan	Penambahan	Pengurangan	Neto
(1)	(2)	(3)	(4)
SUMBER EKSTERNAL	141,71	0,18	141,54
01. Cadangan Valas Pemerintah			
02. Klaim dalam Valas Lainnya		0,18	(0,18)
03. Uang dan Simpanan			
04. Surat Berharga Jangka Pendek	2,46		2,46
05. Kredit	28,47		28,47
06. Modal Saham dan Penyertaan	25,87		25,87
07. Surat Berharga Jk Pjg	1,98		1,98
08. Cadangan Asuransi dan Pensiun	44,04		44,04
09. Kredit Dagang	0,00		0,00
10. Rekening Antar Bank			
11. Rupa-rupa	38,89		38,89
SUMBER INTERNAL	19,69		19,69
12. <i>S-I Gap</i>	19,69		19,69
Jumlah	161,40	0,18	161,23

Selain menambah kewajiban finansialnya pada beberapa instrumen, selama tahun 2011 LKBB juga mengurangi kewajiban finansialnya yaitu pada instrumen klaim dalam valas lainya sebesar Rp0,18 triliun. Dengan demikian, secara neto kewajiban sektor LKBB masih bertambah sebesar Rp161,23 triliun. Kewajiban (neto) tersebut merupakan dana yang siap digunakan untuk pembiayaan investasi finansial yang dilakukan oleh LKBB.

4.5.3 Gambaran Ringkas Kegiatan Investasi Sektor-Sektor LKBB Tahun 2011

Perusahaan Asuransi

Perusahaan Asuransi merupakan sektor yang paling berpengaruh dalam LKBB. Hal ini disebabkan total aset yang dihasilkan merupakan yang terbesar yaitu mencapai 48,65 persen dari total aset LKBB pada tahun 2011. Selama tahun 2011 juga aset sektor

Perusahaan Asuransi bertambah sebesar Rp76,35 triliun. Sebagian besar berupa aset finansial yang bertambah Rp76,06 triliun atau 99,62 persen dari total aset.

**Tabel 4.13 Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi
Sektor Perusahaan Asuransi, Tahun 2011
(Triliun Rupiah)**

Jenis Portofolio Investasi	Nilai	Sumber Pembiayaan Investasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
INVESTASI NON FINANSIAL	0,29	SUMBER INTERNAL	7,75
		Tabungan Bruto	7,75
INVESTASI FINANSIAL	76,06	SUMBER EKSTERNAL	68,61
01. Uang dan Simpanan	15,55	01. Surat Berharga Jangka Pendek	0,00
02. Surat Berharga Jangka Pendek	1,89	02. Kredit	-3,33
03. Kredit	0,02	03. Modal Saham dan Penyertaan	9,88
04. Modal Saham dan Penyertaan	25,41	04. Surat Berharga Jangka Panjang	-0,01
05. Surat Berharga Jangka Panjang	25,61	05. Cadangan Asuransi dan Pensiun	33,22
06. Rekening Antar Bank	0,16	06. Rupa-rupa	28,85
07. Rupa-rupa	7,42		
Jumlah	76,35		76,35

Penambahan aset finansial sebesar itu sebagian besar berupa surat berharga jangka panjang, modal saham dan penyertaan, serta uang dan simpanan masing-masing sebesar Rp25,61 triliun, Rp25,41, dan Rp15,55triliun.

Untuk membiayai investasinya baik investasi non finansial (fisik) maupun investasi finansial, sektor ini menggunakan sumber dana, baik internal⁶ maupun eksternal⁷. Dana internal selama tahun 2011 meningkat sebesar Rp7,75 triliun, sedangkan dana eksternalnya meningkat sebesar Rp68,61 triliun. Sebagian besar dana eksternal berasal dari cadangan asuransi⁸ yang selama tahun 2011 bertambah sebesar Rp33,22 triliun atau 48,43 persen dari total dana eksternalnya. Sumber pembiayaan eksternal lainnya berasal dari modal saham dan penyertaan, serta rupa-rupa yang masing-masing sebesar Rp9,88 triliun, dan Rp28.85 triliun. Selain digunakan untuk investasi, sumber dana yang diperoleh sebagiannya juga digunakan untuk mengurangi kewajibannya berupa kredit dan surat berharga jangka panjang. Selama tahun 2011 kredit sektor ini telah berkurang sebesar Rp3,33 triliun dan surat berharga jangka panjang sektor ini yang beredar diluar telah ditarik kembali sebesar Rp0,01 triliun.

⁶ Berupa tabungan bruto

⁷ berupa kewajiban finansial

⁸ berupa hutang premi dari Perusahaan dan Rumah Tangga

Perusahaan Pembiayaan (PP)

Kondisi perekonomian makro, terutama perekonomian global yang kurang kondusif secara tidak langsung membawa dampak terhadap kinerja sektor ini. Hal ini tercermin dari penambahan tabungan bruto sektor ini yang hanya sebesar Rp4,86 triliun pada tahun 2011 atau turun sebesar 34,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 4.14 Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Perusahaan Pembiayaan, Tahun 2011 (Triliun Rupiah)

Jenis Portofolio Investasi	Nilai	Sumber Pembiayaan Investasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
INVESTASI NON FINANSIAL	-4,64	SUMBER INTERNAL	4,86
		Tabungan Bruto	4,86
INVESTASI FINANSIAL	66,46	SUMBER EKSTERNAL	56,96
01. Klaim dalam Valas Lainnya	0,79	01. Klaim dalam Valas Lainnya	(0,18)
02. Uang dan Simpanan	24,81	02. Surat Berharga Jangka Pendek	1,80
03. Surat Berharga Jangka Pendek	1,19	03. Kredit	28,78
04. Kredit	56,69	04. Modal Saham dan Penyertaan	15,99
05. Modal Saham dan Penyertaan	0,05	05. Surat Berharga Jangka Panjang	1,33
06. Surat Berharga Jangka Panjang	(0,86)	06. Rupa-rupa	9,24
07. Rekening Antar Bank	(4,84)		
08. Rupa-rupa	(11,37)		
Jumlah	61,82		61,82

Terkait pembiayaan investasi, sektor Perusahaan Pembiayaan sebagai institusi intermediasi tidak memiliki akses sumber dana yang spesifik seperti halnya LKBB lain. Sehingga untuk mendukung kegiatan investasinya, sektor ini sangat tergantung pada perolehan tabungan bruto serta aliran dana eksternal terutama dalam bentuk kredit perbankan. Bila dilihat dari struktur sumber pendanaannya, selama tahun 2011 sumber dana utama sektor ini berasal dari tabungan bruto, kredit, modal saham dan penyertaan, surat berharga jangka pendek, surat berharga jangka panjang dan rupa-rupa.

Namun seperti terlihat pada Tabel 4.14, sumber dana utama Perusahaan Pembiayaan pada tahun 2011 berasal dari kredit serta modal saham dan penyertaan yang bertambah masing-masing sebesar Rp28,78 triliun dan Rp25,99 triliun. Selain menambah kewajibannya, selama tahun 2011 juga sektor Perusahaan Pembiayaan juga mengurangi

kewajibkan finansialnya. Hal ini tercermin dari penurunan kewajiban instrumen tersebut yang sebesar Rp0,18 triliun. Meski demikian, secara neto kewajiban Perusahaan Pembiayaan masih bertambah sebesar Rp61,82 triliun.

Grafik 4.7 Perbandingan Beberapa Aset Perusahaan Pembiayaan, Tahun 2010 dan 2011 (Triliun Rupiah)



Keterangan: 1. Uang dan Simpanan 2. Surat Berharga Jangka Pendek 3. Kredit 4. Modal Saham & Penyertaan

Selain masalah pembiayaan investasi, patut pula disimak perubahan yang terjadi pada portofolio investasi sektor ini. Penambahan total aset (neto) sektor Perusahaan Pembiayaan selama tahun 2011 bertambah Rp 61,82 triliun atau meningkat sebesar 43,94 persen dibandingkan tahun 2010. Hal ini disebabkan terjadinya pertambahan pada beberapa aset finansial (lihat Grafik 4.7), yaitu: Kredit, Uang dan Simpanan, Surat Berharga Jangka Pendek, serta Modal Saham & Penyertaan. Penambahan yang cukup signifikan terjadi pada instrumen Kredit dan Uang dan Simpanan. Kredit selama tahun 2011 bertambah sebesar Rp56,69 triliun atau meningkat sebesar 22,98 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan Uang dan Simpanan meningkat cukup fantastis dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 98,29 persen atau meningkat sebesar Rp24,81 triliun. Selain meningkatkan investasinya pada beberapa aset finansial, sektor ini juga mengurangi beberapa aset finansialnya yaitu berupa Surat Berharga Jangka Panjang, Rekening Antar Bank, dan Rupa-rupa masing-masing sebesar Rp0,86 triliun, Rp4,84 triliun, dan Rp11,37 triliun.

Perusahaan Dana Pensiun

Peranan sektor Perusahaan Dana Pensiun dalam kapasitasnya sebagai institusi intermediasi non bank hingga saat ini masih belum menunjukkan potensinya. Sampai dengan akhir tahun 2010, jumlah Perusahaan Dana Pensiun di Indonesia yang masih aktif tercatat sebanyak 276 perusahaan, terdiri dari 251 perusahaan DPPK dan 25 perusahaan DPLK. Sedangkan jumlah pekerja yang tercatat sebagai peserta dana pensiun baru sebesar 2,68 juta. Menurut data BPS per Agustus 2010 diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja untuk kelompok wiraswasta (*self employed*), berusaha dengan pekerja tetap (*employer with permanent workers*), dan buruh/karyawan (*employee*) ada sebanyak 52,5 juta orang. Data tersebut menunjukkan bahwa masih sangat dimungkinkan untuk sektor ini menjaring peserta yang berasal dari kalangan pekerja lainnya.

Tabel 4.15 Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Perusahaan Dana Pensiun, Tahun 2011 (Triliun Rupiah)

Jenis Portofolio Investasi	Nilai	Sumber Pembiayaan Investasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
INVESTASI NON FINANSIAL	-0,02	SUMBER INTERNAL	1,86
		Tabungan Bruto	1,86
INVESTASI FINANSIAL	12,69	SUMBER EKSTERNAL	10,82
01. Uang dan Simpanan	7,49	01. Kredit	-0,50
02. Surat Berharga Jk. Pendek	4,31	02. Cadangan Asuransi & Pensiun	10,82
03. Modal Saham dan Penyertaan	5,61	03. Rupa-rupa	0,50
04. Surat Berharga Jk. Panjang	0,35		
05. Rekening Antar Bank	-0,39		
06. Rupa-rupa	-4,68		
Jumlah	12,67		12,67

Pada tabel 4.15 terlihat dari seluruh jumlah Perusahaan Dana Pensiun tersebut, nilai kekayaan (aset) yang berhasil dihimpun per akhir tahun 2011 meningkat sebesar Rp12,67 triliun atau turun sebesar 27,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun aset dalam bentuk Investasi Non Finansial (INF) justru menurun sebesar Rp0,02 triliun. Penurunan aset INF tersebut mengakibatkan kenaikan aset dalam bentuk finansial menjadi sebesar Rp12,69 triliun, lebih besar dari total asetnya yang sebesar Rp12,67 triliun.

Aset-aset finansial selama tahun 2011 yang bertambah adalah Uang dan Simpanan, Surat Berharga Jangka Pendek, Modal Saham & Penyertaan, serta Surat Berharga Jangka Panjang. Sedangkan aset finansial yang berkurang adalah Rekening Antar Bank dan Rupa-rupa (lihat tabel 4.15). Jenis investasi yang menjadi pilihan utama dari pengurus dana pensiun dalam menempatkan dana kelolaannya adalah berupa Uang & Simpanan, Surat Berharga Jangka Pendek, serta Modal Saham & Penyertaan. Penambahan Uang & Simpanan mencapai 42,17 persen dari seluruh penambahan aset finansialnya. Sedangkan Surat Berharga Jangka Pendek, serta Modal Saham & Penyertaan penambahannya masing-masing sebesar 24,29 persen dan 31,58 persen dari seluruh penambahan aset finansialnya.

Dari segi pembiayaan investasi, sumber pembiayaan utama selama tahun 2011 berasal dari hutang iuran anggota Perusahaan Dana Pensiun (cadangan pensiun) yang meningkat sebesar Rp10,82 triliun. Sumber pembiayaan ini meningkat sebesar 108,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan merupakan 82,11 persen dari total penambahan pembiayaan investasi. Pada tabel 4.15 terlihat pula bahwa sektor ini selain menambah kewajibannya juga mengurangi kewajibannya berupa kredit sebesar Rp0,50 triliun.

Pegadaian

Gambaran mengenai sektor pegadaian dalam tulisan ini mengacu kepada kinerja dari PT (Pesero) Pegadaian⁹. Walaupun total aset perusahaan ini paling kecil di antara LKBB lainnya (hanya sebesar 2,76 persen aset LKBB), namun selama tahun 2011 perusahaan ini telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini terlihat dari jumlah nasabah sebanyak 32,10 juta nasabah (data tahun 2010) serta besaran kredit yang disalurkan ke nasabah yang meningkat sebesar Rp5,57 triliun selama tahun 2011. Peningkatan besaran kredit yang disalurkan tersebut lebih besar dibandingkan peningkatan yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 3,88 triliun.

Sejalan dengan meningkatnya aktiva maka beberapa sumber eksternal (kewajiban) perusahaan ini juga mengalami peningkatan. Selama tahun 2011, sektor ini memperoleh dana dari perbankan berupa kredit bank sebesar Rp3,52 triliun. Kredit yang diterima tersebut sedikit lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,67 triliun.

⁹ Sebagai institusi yang bergerak dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah

Tabel 4.16 Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Perusahaan Pegadaian, Tahun 2011 (Triliun Rupiah)

Jenis Portofolio Investasi	Nilai	Sumber Pembiayaan Investasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
INVESTASI NON FINANSIAL	0,08	SUMBER INTERNAL	0,94
		Tabungan Bruto	0,94
INVESTASI FINANSIAL	6,01	SUMBER EKSTERNAL	5,16
01. Uang dan Simpanan	0,10	01. Surat Berharga Jangka Pendek	0,67
02. Kredit	5,57	02. Kredit	3,52
03. Cadangan Asuransi dan Pensiun	0,00	03. Surat Berharga Jangka Panjang	0,66
04. Rupa-rupa	0,34	04. Kredit Dagang	0,00
		05. Rupa-rupa	0,30
Jumlah	6,10	Jumlah	6,10

Sumber pendanaan lainnya berupa Surat Berharga Jangka Panjang (obligasi) meningkat sebesar Rp0,66 triliun. Demikian pula dengan sumber pendanaan dari Surat Berharga Jangka Pendek, meningkat sebesar Rp0,67 triliun. Hal ini menunjukkan masih tingginya kepercayaan dari dunia perbankan dan investor pasar modal terhadap kinerja perusahaan ini. Sedangkan sumber dana internal (tabungan bruto) juga meningkat sebesar Rp0,94 triliun.

Informasi sumber dana yang berasal dari saham tidak relevan karena sesuai dengan status hukum perusahaan yang berbentuk Perusahaan Umum. Sehingga, modal perusahaan ini bukan berbentuk saham tetapi berasal dari penyertaan modal Pemerintah. Ini berarti, Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang 100 persen saham Perum Pegadaian

4.6. PERCEPATAN UANG BEREDAR (*VELOCITY OF MONEY*) DAN PENDALAMAN SEKTOR KEUANGAN (*FINANCIAL DEEPENING*)

4.6.1. Percepatan Uang Beredar (*Velocity of Money*)

Velocity of Money (V) merupakan suatu ukuran yang biasanya digunakan untuk melihat kecepatan perputaran uang beredar. Peredaran uang disebabkan adanya transaksi-transaksi ekonomi yang melibatkan berbagai pihak dalam suatu perekonomian. Jika *V* rendah artinya perputaran uang yang beredar lambat atau dengan kata lain masyarakat

memegang uang lebih lama sebelum uang itu akhirnya digunakan untuk transaksi. Sebaliknya, jika V tinggi berarti terjadi perputaran uang yang sangat cepat atau masyarakat tidak berlama-lama untuk menggunakan uang dalam melakukan transaksi.

Sebagai contoh sederhana, pada suatu periode, A menjual barang dagangannya ke B sebesar Rp50 ribu, maka V yang terjadi adalah 1. Selanjutnya jika A menggunakan uang Rp50 ribu tersebut untuk membayar jasa perbaikan barang misalnya, maka terjadi perpindahan uang (V) satu kali lagi. Walaupun secara nominal uangnya masih yang sama yaitu Rp50 ribu namun secara agregat jumlah uang yang beredar adalah Rp100 ribu r, sehingga perpindahan uang yang terjadi ada sebanyak 2 kali atau:

$$V = \frac{100}{50} = 2.$$

Velocity of money dapat juga dipakai sebagai ukuran dalam menentukan inflasi. Di samping itu fluktuasi yang terjadi dalam *velocity of money* biasanya selalu diikuti dengan fluktuasi pada suku bunga (*interest rate*).

Secara umum *Velocity of Money* diukur dengan rumus:

$$V = \frac{PDB}{M_1}$$

Di mana : V = *Velocity of Money*

PDB = Produk Domestik Bruto

M_1 = Uang beredar sempit

4.6.2. Pendalaman Sektor Keuangan (*Financial Deepening*).

Pendalaman sektor Keuangan (*financial deepening*) merupakan salah satu langkah penting dalam upaya mengembangkan pasar keuangan suatu negara. Memperdalam pasar keuangan juga dapat dilakukan sebagai upaya untuk menarik eksese likuiditas di perekonomian dan memperkecil risiko gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan yang berasal dari gejolak nilai tukar maupun fluktuasi di pasar saham atau obligasi.

Pasar keuangan yang dalam mempunyai beberapa efek positif, yaitu:

- (i) Dari sisi dunia usaha, pasar keuangan yang dalam diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan aktivitas ekonomi dengan tersedianya berbagai alternatif pembiayaan.

- (ii) Dari sisi investor, pasar keuangan yang dalam memberikan beragam pilihan instrumen investasi sehingga mereka dapat mengoptimalkan imbal hasil dari investasinya.
- (iii) Dapat mendorong lebih banyak investor untuk menanamkan dananya di pasar keuangan sehingga dapat berdampak positif terhadap pembiayaan ekonomi.

Upaya yang perlu dilakukan untuk menciptakan pasar keuangan yang dalam adalah dengan memperkaya instrumen investasi, seperti instrumen berjangka panjang maupun instrumen *structured product* dan *derivative product* yang dapat digunakan sebagai instrumen *hedging* atau sebagai asuransi transaksi keuangan. Hal ini perlu diupayakan karena keterbatasan instrumen investasi akan mengakibatkan investor menjadi kurang aktif dalam melakukan transaksi sehingga pasar keuangan menjadi tidak likuid.

Indikator yang lazim digunakan untuk melihat kedalaman sektor keuangan adalah rasio kewajiban likuid dari sistem keuangan terhadap Produk Domestik Bruto, dalam hal ini M2/PDB (King dan Levine, 1993).

4.6.3. Uraian Ringkas *Velocity of Money* dan *Financial Deepening* Indonesia Tahun 2006-2011

Pada bagian ini akan diuraikan secara ringkas tentang perkembangan *velocity of money* (*V*) dan *financial deepening* (*FD*) selama periode 2006-2011. Namun sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu secara ringkas mengenai agregat moneter lainnya, yaitu perkembangan uang beredar.

**Tabel 4.17 Uang Beredar dan Produk Domestik Bruto
Tahun 2006-2011**

Tahun	Uang Beredar (Triliun Rp) 1)			M2	PDB 2) (Triliun Rp)	Velocity (PDB/M1)	Rasio (%)	
	M1	Uang Kuasi	Surat Berharga Selain Saham				M1/PDB	M2/PDB
2006	347,01	1.032,87	2,62	1.382,49	3.339,22	9,62	10,39	41,40
2007	450,06	1.196,12	3,49	1.649,66	3.950,89	8,78	11,39	41,75
2008	456,79	1.435,77	3,28	1.895,84	4.948,69	10,83	9,23	38,31
2009	515,82	1.622,06	3,50	2.141,38	5.606,20	10,87	9,20	38,20
2010	605,41	1.856,72	9,08	2.471,21	6.436,27	10,63	9,41	38,39
2011	722,99	2.139,84	14,39	2.877,22	7.427,09	10,27	9,73	38,74

Sumber: 1) Statistik Ekonomi-Kuangan Indonesia, Bank Indonesia

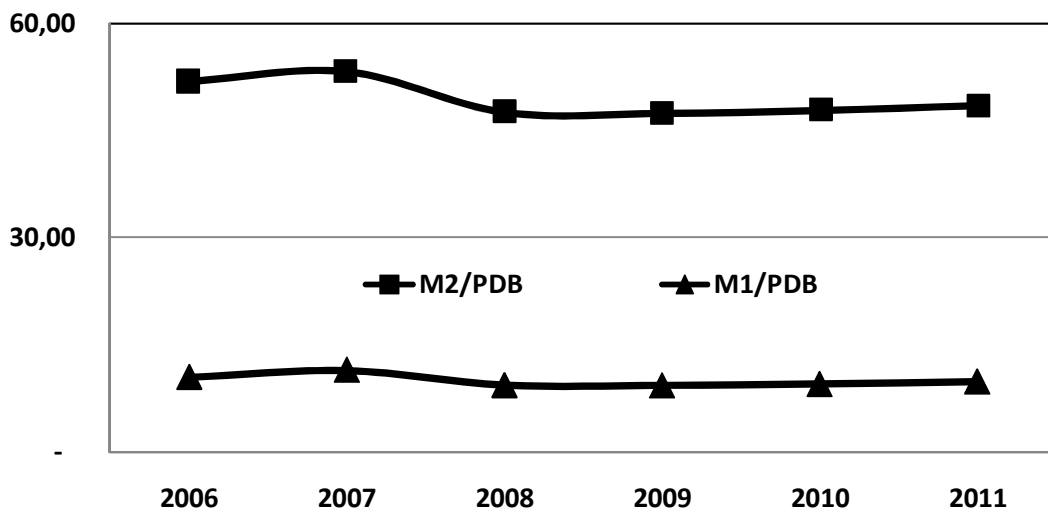
2) Pendapatan Nasional Indonesia, BPS

Perkembangan uang beredar sempit (M1) dan uang beredar luas (M2) serta hubungannya dengan Produk Domestik Bruto (PDB) selama tahun 2006-2011 tercermin pada tabel 4.17. Posisi M2 pada suatu periode sangat dipengaruhi oleh posisi dari uang kuasi. Selama periode 2006-2011 kontribusi uang kuasi terhadap pembentukan M2 rata-rata sebesar 74,70 persen. Kontribusi lainnya ditentukan oleh M1 yang rata-rata kontribusinya terhadap M2 sebesar 25,03 persen, dan sisanya sebesar 0,27 persen berasal dari surat berharga selain saham. Pertumbuhan M1 meningkat lebih pesat dibandingkan pertumbuhan uang kuasi. Selama periode 2006 – 2011 M1 tumbuh rata-rata sebesar 18,15 persen sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan uang kuasi yang rata-rata tumbuh sebesar 14,95 persen. Hal ini mencerminkan bahwa M1¹⁰ lebih diminati untuk dimiliki oleh masyarakat dibandingkan uang kuasi¹¹.

¹⁰ yang terdiri dari uang kartal di luar bank umum dan BPR serta simpanan giro rupiah

¹¹ yang terdiri dari simpanan berjangka, tabungan, dan simpanan giro valas

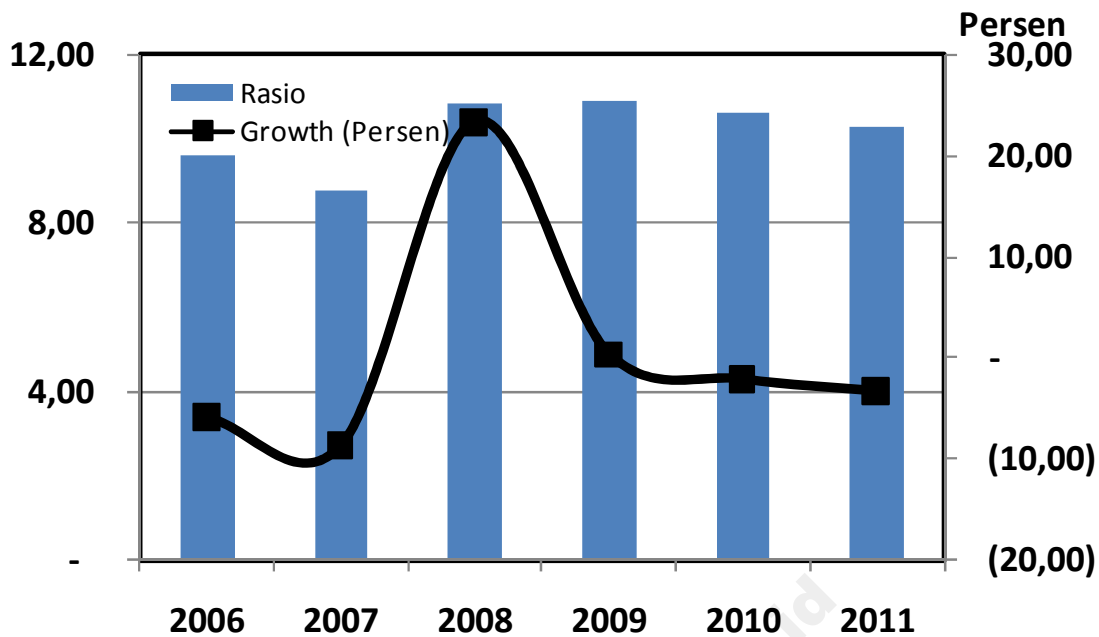
Grafik 4.8 Rasio M1 dan M2 thd PDB



Gambaran lain yang menunjukkan keadaan perekonomian nasional dalam kaitannya dengan uang beredar adalah pendalaman sektor Keuangan (*financial deepening*). Kondisi pendalaman pasar uang Indonesia selama periode 2006 – 2011 dapat dilihat dari Grafik 4.8. Untuk kasus Indonesia, upaya pendalaman sektor Keuangan sedang dilakukan, karena sektor Keuangan Indonesia masih dianggap dangkal (*shallow*) dibanding beberapa negara utama di kawasan Asia. Masih dangkalnya sektor Keuangan Indonesia tercermin dari perkembangan rasio M2/PDB. Kedalaman sektor Keuangan terus menunjukkan penurunan sejak krisis 1997/1998. Krisis keuangan global pada tahun 2008 yang berpengaruh pada sektor Keuangan domestik terlihat semakin menurunkan rasio tersebut. Pada akhir tahun 2008 dan 2009, rasio M2/PDB Indonesia mencapai titik terendah selama periode 2006 – 2011 yaitu sebesar 38,31 persen dan 38,20. Namun seiring dengan berbagai kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah, rasio tersebut sedikit demi sedikit mengalami peningkatan.

Terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan dangkalnya sektor Keuangan Indonesia, yakni (i) rendahnya intermediasi yang dilakukan oleh institusi-institusi di sektor Keuangan, (ii) rendahnya pemanfaatan pasar modal dalam pembiayaan investasi, dan (iii) terbatasnya instrumen investasi di pasar keuangan Indonesia. Namun dangkalnya sektor Keuangan memungkinkan Indonesia dapat meminimalisir dampak krisis keuangan global. Sektor Keuangan Indonesia yang memiliki eksposur terbatas pada *structured products*, termasuk *subprime mortgage*, menjadikan sistem keuangan Indonesia sedikit terpengaruh terhadap dampak krisis keuangan global.

Grafik 4.9 Velocity of Money



Disamping *financial deepening*, masalah percepatan perputaran uang beredar (*velocity of money*) juga merupakan hal penting yang patut diperhatikan untuk melihat gambaran tentang stabilitas keuangan moneter. Kondisi *velocity of money* di Indonesia selama periode 2006 – 2011 menunjukkan angka yang relatif rendah. Hal itu tercermin dari rendahnya rasio antara PDB dengan M1 selama periode tersebut yang hanya berada di kisaran angka 9,20 – 11,39. Perlambatan perputaran uang beredar yang terjadi selama tahun 2006 – 2011 disebabkan pertumbuhan yang terjadi pada kedua variabel tersebut sangat berfluktuasi serta tidak sejalan antara satu dengan lainnya. Pertumbuhan PDB atas dasar harga berlaku cenderung mengalami kontraksi. Sedangkan pertumbuhan M1 cenderung mengalami kenaikan sebelum terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 2008.

Lampiran 1

Definisi Sektor Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia

<http://www.bps.go.id>

DEFINISI SEKTOR NERACA ARUS DANA (NAD) INDONESIA

I. SEKTOR KEUANGAN (*FINANCIAL SECTOR*)

1.1 Bank Sentral (*Central Bank*)

Bank Sentral adalah lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi sbb: (1) mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah, (2) memelihara dan menjaga posisi cadangan devisa, (3) melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keuangan, dan (4) sebagai pemegang kas pemerintah.

Di Indonesia fungsi-fungsi Bank Sentral dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI). Selain memiliki sejumlah fungsi, BI juga memiliki sejumlah kewajiban antara lain kewajiban atas uang kartal (uang logam dan uang kertas) yang berada di luar BI dan Kas Negara, serta simpanan giro BPUG dan sektor swasta pada BI. Kewajiban-kewajiban tersebut seringkali disebut sebagai uang primer.

Oleh karena kewenangan Bank Sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia (BI), maka dalam Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia, neraca Bank Sentral hanya terdiri dari neraca BI.

1.2 Perbankan (*Banks*)

Sektor ini mencakup Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional, dan BPR Syariah, baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta.

1.2.1 Bank Umum Konvensional (*Deposit Money Banks*)

Bank Umum Konvensional adalah bank umum yang mempunyai kedudukan khusus dalam sistem keuangan karena dapat menciptakan uang giral dan uang kuasi. Bank Umum Konvensional terdiri dari Bank Pesero, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) devisa, BUSN non devisa, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Campuran, dan Bank Asing. Secara umum, kegiatan utama bank-bank tersebut (kecuali bank non devisa) adalah menghimpun dana masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito berjangka maupun tabungan. Selain itu bank-bank tersebut juga memberikan atau menyalurkan kredit baik untuk modal kerja maupun untuk investasi, dan melakukan transaksi perdagangan luar negeri.

1.2.2 Bank Perkreditan Rakyat (*Rural Banks*)

Kegiatan utama BPR adalah menerima simpanan dan memberikan kredit untuk skala kecil dalam jangka pendek kepada pedagang-pedagang kecil terutama yang berada di wilayah pedesaan. Sehingga wilayah kerja BPR umumnya lebih bersifat lokal tingkat desa. Dilihat dari jenisnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terdiri dari BPR-BKD dan BPR-Non BKD.

1.2.3 Perbankan Syariah (*Sharia Banks*)

Dimasukkannya konsep perbankan syariah ini sesuai dengan amanat dan semangat UU No.7 tahun 1992 yang telah meletakkan dasar bagi terwujudnya perbankan sistem ganda yaitu sistem perbankan yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil (syariah) dan bank yang beroperasi secara konvensional. Kemudian di dalam UU perbankan yang baru yaitu UU. No.10 tahun 1998 kembali menindaklanjuti dan secara transparan telah menyebutkan tentang latar belakang diperkenalkannya sistem perbankan syariah dalam struktur perbankan di Indonesia. Menurut UU tersebut kegiatan perbankan syariah terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga dan mengembangkan pembiayaan berdasarkan prinsip kemitraan.

UU No. 10 tahun 1998 tersebut juga menjelaskan tiga cara dalam mengembangkan perbankan syariah yaitu (a) pendirian bank baru, (b) konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, dan (c) pembukaan kantor cabang syariah (*full branch*) pada bank umum konvensional.

1.3 Lembaga Keuangan Lainnya (*Other Financial Institutions*)

Sektor ini mencakup semua lembaga keuangan selain bank yang terdiri dari Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, Perusahaan Penunjang Asuransi, Perusahaan Dana Pensiun, Perusahaan Pegadaian, dan Pasar Modal.

1.3.1 Perusahaan Pembiayaan (*Finance Companies*)

Perusahaan Pembiayaan adalah jenis perusahaan finansial yang kegiatan utamanya memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Cakupan kegiatan Perusahaan Pembiayaan adalah Perusahaan Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*), Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) dan Kartu Kredit (*Credit Card*). Perusahaan Pembiayaan secara umum dimaksudkan untuk memberikan penyaluran dana kepada para nasabah dalam bentuk pembiayaan, dan tidak dibenarkan menarik dana secara langsung dari pihak ketiga (*non depositories institution*) sesuai

dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, sebagian besar sumber dana Perusahaan Pembiayaan berasal dari kredit perbankan baik bank dalam negeri maupun bank asing.

1.3.1.1 Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Kegiatan Perusahaan Pembiayaan jenis sewa guna usaha ini adalah memberikan pembiayaan (*lessor*) kepada para penyewa guna usaha (*lease*) untuk penyediaan barang-barang modal baik secara "*finance lease*" maupun "*operating lease*" dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

1.3.1.2 Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*)

Anjak Piutang adalah jenis kegiatan usaha pembiayaan yang bisa dilakukan baik secara individu maupun dalam bentuk badan usaha. Kegiatan usaha Anjak Piutang adalah membeli piutang baik dalam bentuk *account receivable* maupun *promissory notes* atas dasar tingkat diskonto tertentu dari si penjual baik *with recourse* maupun *without recourse*. Anjak Piutang jenis *with recourse* berarti tanggung jawab penagihan piutang selanjutnya akan beralih kepada pihak yang melakukan anjak piutang.

1.3.1.2 Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*)

Pembiayaan Konsumen adalah jenis kegiatan usaha yang memberikan pembiayaan kepada para nasabah terutama untuk pengadaan barang-barang konsumsi dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.

1.3.1.3 Pembiayaan Kartu Kredit (*Credit Card*)

Pembiayaan Kartu Kredit adalah jenis kegiatan usaha yang memberikan pembiayaan kepada para nasabah untuk kepentingan pembelian barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak penerbit kartu kredit. Biasanya pihak bank disebut sebagai *issuer*, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan atau pemegang kartu kreditnya disebut sebagai *card holder*. Pemegang kartu kredit dapat menggunakan untuk berbelanja di tempat-tempat yang sudah terdaftar sebagai penerima kartu kredit (*merchant*).

1.3.2 Modal Ventura (*Venture Capital*)

Modal Ventura adalah kegiatan usaha yang kegiatannya utamanya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dalam jangka waktu tertentu umumnya selama sepuluh tahun, dan dapat diperpanjang

kembali. Selain memberikan bantuan modal kepada PPU, perusahaan modal ventura juga seringkali memberikan bimbingan manajemen kepada PPU. Bentuk usaha modal ventura ini umumnya dikembangkan oleh pihak swasta besar dalam rangka mewujudkan kemitraan usaha dengan perusahaan-perusahaan kecil.

1.3.3 Usaha Perasuransian (*Insurance Business*)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.2 tahun 1992 pasal 3, Usaha Perasuransian dibedakan menjadi dua yaitu (a) Usaha Asuransi, dan (b) Usaha Penunjang Usaha Asuransi.

1.3.3.1 Usaha Asuransi (*Insurance Business*)

Usaha Asuransi terdiri dari Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa dan Reasuransi.

1.3.3.1.1 Usaha Asuransi Kerugian (*Loss Insurance Business*)

Usaha Asuransi Kerugian adalah usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat risiko atas kerugian, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

1.3.3.1.2 Usaha Asuransi Jiwa (*Life Insurance Business*)

Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

1.3.3.1.3 Usaha Reasuransi (*Reinsurance Business*)

Usaha Reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

1.3.3.2 Usaha Jasa Penunjang Usaha Asuransi (*Insurance Supporting Business*)

Usaha Jasa Penunjang Asuransi terdiri dari (i) Usaha Pialang Asuransi, (ii) Usaha Pialang Reasuransi, (iii) Usaha Penilai Kerugian Asuransi, (iv) Usaha Konsultan Aktuaria, dan (v) Usaha Agen Asuransi.

1.3.3.2.1 Usaha Pialang Asuransi (*Insurance Brokerage Business*)

Usaha Pialang Asuransi adalah usaha yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

1.3.3.2.2 Usaha Pialang Reasuransi (*Reinsurance Brokerage Business*)

Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan Perusahaan Asuransi.

1.3.3.2.3 Usaha Penilai Kerugian (*Loss Adjuster Business*)

Usaha Penilai Kerugian adalah usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungjawabkan.

1.3.3.2.4 Usaha Konsultan Aktuaria (*Actuarial Consultant Business*)

Usaha Konsultan Aktuaria adalah usaha yang memberikan jasa konsultasi aktuaria.

1.3.3.2.5 Usaha Agen Asuransi (*Insurance Agency Business*)

Usaha Agen Asuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan di bidang pemasaran asuransi untuk / atas nama penanggung.

1.3.3.3 Program Asuransi Sosial (*Social Insurance Program*)

Sesuai dengan Undang-undang No.2 tahun 1992 tidak dikenal lagi perusahaan Asuransi Sosial seperti sebelumnya. Undang-undang itu mengatur program asuransi sosial yaitu sebagai suatu program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pada pasal 14 ayat (1) dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa program asuransi sosial yang ada diantaranya adalah :

- Program asuransi sosial bidang asuransi kerugian, yaitu asuransi wajib kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh BUMN PT (Pesero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
- Program asuransi sosial bidang asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh PT (Pesero) ASKES

- Program asuransi sosial yang mengelola Tabungan Hari Tua (THT) dan asuransi kesehatan bagi anggota ABRI dan para karyawan sipil ABRI diselenggarakan oleh PT (Pesero) ASABRI.
- Program asuransi sosial yang mengelola THT dan asuransi kematian bagi pegawai negeri sipil, diselenggarakan oleh PT (pesero) TASPEN
- Program asuransi sosial yang mengelola THT, asuransi kematian, asuransi kecelakaan kerja dan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja, diselenggarakan oleh PT (Pesero). Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT. JAMSOSTEK).

1.3.4 Pegadaian (*Pawnshops*)

Mencakup usaha lembaga perkreditan pemerintah yang tugasnya membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai. Besarnya pinjaman disesuaikan dengan nilai barang jaminan yang diserahkan oleh pihak peminjam tanpa syarat apapun mengenai penggunaan dananya.

1.3.5 Dana Pensiun (*Pension Fund*)

Sesuai dengan UU No.11 tahun 1992 tentang perusahaan Dana Pensiun, perusahaan ini adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pension. Dana pensiun bertujuan untuk memelihara kesejahteraan sosial karyawan perusahaan, melalui pemberian santunan hari tua/uang pensiun. Umumnya dana yang terkumpul dari iuran peserta dan pemberi kerja selain digunakan untuk membayar tunjangan hari tua/pensiun karyawan, juga diinvestasikan dalam bentuk aset tetap, saham, maupun disimpan dalam bentuk tabungan atau deposito.

Terdapat tiga pilihan bentuk program pensiun yaitu (i) Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan (PPBK), (ii) Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) dan (iii) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Sedangkan berdasarkan bentuk badan hukumnya, Dana Pensiun dibedakan menjadi dua yaitu (i) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan (ii) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

1.3.5.1. Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan (PPBK)

Pada program pensiun jenis ini, karyawan biasanya tidak perlu ikut membayar iuran, sedangkan perusahaan sebagai pemberi kerja membayar iuran dalam batas persentase tertentu dari keuntungannya dalam tahun tertentu. Dalam hal risiko, kegagalan pengolahan berada pada pihak peserta.

1.3.5.2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Pada program pensiun jenis ini, kewajiban membayar iuran ditanggung oleh pihak pemberi kerja dan peserta yang telah ditetapkan lebih dahulu berdasarkan kemampuan masing-masing pihak. Berdasarkan kesepakatan ini, dalam keadaan bagaimanapun pihak perusahaan sebagai pihak pemberi kerja harus tetap membayar iuran kepada pihak dana pensiun sesuai yang telah disepakati. Dalam hal risiko kegagalan pengolahan risiko berada pada pihak peserta.

1.3.5.3. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Pada jenis program ini manfaat pasti telah ditetapkan sebelumnya. Dalam program ini besarnya iuran yang harus dibayarkan oleh pihak pemberi kerja berubah-ubah sesuai dengan hasil perhitungan aktuarial dan hasil pengelolaan dananya. Sedangkan bagi peserta, besarnya iuran yang harus dibayarkan oleh peserta besarnya tetap. Dalam hal risiko kegagalan pengelolaan berada pada pihak pemberi kerja. Sebaliknya jika pengelolaan dana pensiun berhasil maka akan mengurangi beban iuran pihak pemberi kerjanya.

1.4 Pasar Modal (*Capital Market*)

Pasar Modal adalah sarana yang dapat mempertemukan kepentingan pihak investor dengan pihak emiten. Dalam hal ini, pasar modal menjadi sarana alternatif bagi pihak perusahaan yang menginginkan sumber dana di luar kredit perbankan. Pihak perusahaan yang melakukan penawaran saham (emiten) dapat memperoleh sumber dana melalui penawaran perdana di pasar primer atau *Initial Public Offering* (IPO). Selain terjadi transaksi jual beli saham, di pasar modal juga dilakukan transaksi jual beli obligasi. Sarana untuk melangsungkan transaksi pasar modal di Indonesia dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Seperti halnya pada kegiatan peransuransian, pada kegiatan di pasar modal juga memunculkan kegiatan usaha derivatif seperti Broker Pasar Modal, *Underwriter*, *Adjuster* dan Penjamin Emisi.

II. SEKTOR BUKAN KEUANGAN (*NONFINANCIAL SECTORS*)

Secara umum sektor-sektor yang dicakup di sini merupakan institusi yang memanfaatkan dana dari sektor keuangan untuk memproduksi barang dan jasa. Oleh karena itu, sektor-sektor ini tidak mempunyai wewenang dalam pengumpulan dan

penyaluran dana dari dan ke masyarakat. Sektor bukan keuangan terdiri dari sektor Pemerintah, Perusahaan Pemerintah, Perusahaan Swasta (Bisnis) dan Rumah Tangga.

2.1 Pemerintah (*Government*)

Pengertian sektor Pemerintah adalah sektor yang semata-mata melakukan kegiatan administrasi pemerintah dan melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharap balas jasa. Termasuk dalam kegiatan pemerintah juga meliputi kegiatan lembaga-lembaga pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah, tetapi tidak termasuk badan usaha milik pemerintah (BUMN dan BUMD). Dalam penyusunan NAD Indonesia, kedua sektor tersebut (BUMN dan BUMD) dikategorikan sebagai sektor tersendiri yaitu sektor Perusahaan Pemerintah. Sektor Pemerintah sendiri dibedakan menjadi dua yaitu (i) Pemerintah Pusat dan (ii) Pemerintah Daerah.

2.1.1 Pemerintah Pusat (*Central Government*)

Mencakup semua unit pemerintah baik yang berada di pusat seperti: Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Pemerintah lain, serta semua unit vertikalnya yang berada di daerah. Lembaga ini umumnya melakukan jasa pelayanan umum, seperti administrasi, pertahanan dan keamanan, membuat peraturan-peraturan pemerintah, merencanakan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat, menyelenggarakan jasa pendidikan, kesehatan, kebudayaan, rekreasi dan jasa pelayanan sosial lainnya secara cuma-cuma (di bawah tingkat harga normalnya).

2.1.2 Pemerintah Daerah (*Local Government*)

Mencakup semua unit kegiatan pemerintah yang berada di tingkat propinsi, kabupaten dan desa, kecuali unit vertikal pemerintah pusat di daerah. Lembaga ini mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (hak otonom).

2.2 Perusahaan Pemerintah Non Finansial (*Non Financial Government Enterprises*)

Mencakup semua perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang dan jasa milik pemerintah (BUMN dan BUMD) non finansial. Termasuk juga di sini Badan

Urusan Logistik (BULOG) sebagai "badan pemerintah" yang memiliki peran dan fungsi khusus untuk mengatur kebutuhan logistik nasional.

2.2.1 Badan Usaha Milik Negara (*State Enterprises*)

Mencakup badan usaha milik pemerintah pusat yang bentuk badan hukumnya ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Dasar Pementukan BUMN. Sedangkan tatacara pembinaan dan pengawasan BUMN diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983. Berdasarkan UU No. 9 tahun 1969, bentuk badan hukum perusahaan milik negara dibedakan menjadi: Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Perseroan (PESERO), dan Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk).

Pertamina dan BULOG termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah Kementerian Negara BUMN. Badan hukum Pertamina dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1971, sedangkan BULOG dibentuk berdasarkan Keppres RI No. 11 Tahun 1969.

Selain itu, masih ada BUMN yang disebut, PN atau PT (murni) yang berdiri sebelum lahirnya UU No. 9 tersebut, dan bentuk badan hukumnya diatur berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

BUMN yang dicakup di sini hanya yang bergerak di bidang non finansial, dan jenis usahanya lebih berorientasi pada usaha-usaha yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas, seperti: usaha pengangkutan, pos dan telekomunikasi, listrik dan sebagainya. BUMN-BUMN yang bergerak di bidang finansial seperti perbankan, sudah dikategorikan sebagai sektor tersendiri yaitu sektor Bank.

2.2.2 Badan Usaha Milik Daerah (*Local Government Enterprises*)

Sektor ini mencakup semua badan usaha milik pemerintah daerah, yang pengelolaan dan pembinaannya berada di bawah pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1962. Jenis kegiatannya antara lain meliputi penyediaan air minum, pengelolaan pasar, penyediaan objek wisata/taman hiburan dan sebagainya. Pada umumnya, perusahaan ini berbentuk perusahaan daerah (PD) yang diatur berdasarkan peraturan daerah.

2.3 Bisnis (*Business Enterprises*)

Sektor ini mencakup Koperasi dan Perusahaan Swasta Non Finansial.

2.3.1 Koperasi (*Cooperative*)

Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1967 jo.UU No.25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melakukan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam sektor ini, koperasi dibagi menjadi dua, yaitu Koperasi Perkotaan (non-KUD) dan Koperasi Pedesaan (KUD). Pembagian ini umumnya didasarkan pada wilayah kerjanya.

Koperasi yang berbentuk bank (seperti BUKOPIN) dan asuransi (Koperasi Asuransi Indonesia) berturut-turut masuk ke sektor bank umum dan asuransi. Untuk meningkatkan efisiensi, maka koperasi primer dapat membentuk berbagai jenis koperasi sekunder. Jenis koperasi sekunder dapat berupa pusat (daerah tingkat II), gabungan (propinsi), dan induk (nasional).

2.3.1.1 Koperasi Perkotaan (*Non rural Cooperative*)

Koperasi non-KUD umumnya adalah koperasi yang menghimpun anggota dan warga masyarakat nonpedesaan berdasarkan fungsi atau peran tertentu serta pembagian kerja atau profesi dalam masyarakat. Koperasi tersebut dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

- (i) Koperasi fungsional seperti pegawai negeri, ABRI, karyawan, dan lainnya.
- (ii) Golongan menurut bidang usaha seperti jasa, produksi, industri kecil dan kerajinan rakyat.
- (iii) koperasi serba usaha dan simpan-pinjam.

2.3.1.2 Koperasi Pedesaan (*Rural Cooperative*)

Koperasi Pedesaan (KUD) adalah jenis koperasi yang berkedudukan di desa dan yang menghimpun warga desa untuk menjalankan berbagai fungsi usaha, terutama di sektor pertanian, seperti koperasi pertanian, koperasi kopra, koperasi perikanan/nelayan, koperasi peternak, koperasi pengrajin dan simpan-pinjam.

2.3.2 Perusahaan Swasta Non finansial (*Private Nonfinancial Enterprises*)

Mencakup semua perusahaan nonfinansial yang berbadan hukum milik masyarakat. Kegiatan utamanya adalah memproduksi barang dan jasa dengan tujuan mencari untung. Usaha ini bisa dimiliki oleh perorangan, kelompok, gabungan perusahaan, usaha keluarga, dan sebagainya dengan maksud untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Bentuk badan hukumnya bisa berupa Perseroan Terbatas (PT), Firma (Fa), CV dan NV. Dalam kelompok ini tidak termasuk usaha rumah tangga, karena usaha rumah tangga dimasukkan sebagai bagian dari sektor rumah tangga.

2.4 Rumah Tangga (*Households*)

Mencakup kegiatan rumah tangga biasa, badan-badan nirlaba dan usaha rumah tangga. Rumah tangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang tinggal di suatu bangunan dan biasanya mengurus kebutuhan sehari-harinya secara bersama. Badan yang tidak mencari laba mencakup badan-badan swasta yang menghasilkan jasa pelayanan rumah sakit, sekolah, yayasan, tempat peribadatan dan sebagainya. Usaha rumah tangga adalah kegiatan ekonomi tidak berbentuk badan hukum yang dilakukan oleh rumah tangga, dan risiko usahanya ditanggung seorang atau lebih anggota rumah tangga⁸ dengan tujuan menghasilkan barang dan/atau jasa untuk dijual atau ditukar dengan barang lain, misalnya, usaha pertanian, industri/kerajinan dan sebagainya.

III. SEKTOR LUAR NEGERI (*Rest of the World*)

Mencakup kegiatan antara penduduk Indonesia (residen) baik individu maupun institusi dan bukan penduduk (non residen/luar negeri). Transaksi yang terjadi antara residen dengan non residen ini dicatat di dalam Neraca Pembayaran (*Balance of Payments*).

⁸ Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga baik yang bersifat tetap maupun yang sementara (dalam batas waktu tertentu).

Lampiran 2

Definisi Kategori Transaksi Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia

<http://www.bps.go.id>

DEFINISI KATEGORI TRANSAKSI NERACA ARUS DANA INDONESIA

0100 Tabungan Bruto

Tabungan Bruto merupakan jumlah dari penyusutan barang modal tetap dan tabungan neto.

0110 Penyusutan Barang Modal

Penyusutan Barang Modal (PBM) merupakan biaya penyusutan barang modal tetap (pabrik, mesin dan peralatan) karena aus/rusak dalam proses produksi yang dibebankan pada biaya operasi perusahaan. Biaya penyusutan sesungguhnya bukan merupakan pengeluaran dana. Selain itu, penyusutan barang modal juga meliputi perkiraan penyusutan rumah yang dimiliki perorangan dan barang modal tetap milik perusahaan.

0120 Tabungan Neto

Tabungan Neto merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran dari kegiatan ekonomi suatu sektor setelah dikurangi penyusutan barang modal. Penerimaan disini meliputi: pendapatan dari penjualan barang dan jasa, balas jasa faktor tenaga kerja seperti upah dan gaji, serta pendapatan kepemilikan seperti bunga dan sewa. Penerimaan juga mencakup pendapatan dari transfer (bukan transfer modal), seperti subsidi dari pemerintah yang diterima oleh sektor usaha, bantuan luar negeri yang diterima pemerintah, pensiun yang diterima oleh sektor rumah tangga, dan pajak yang diterima oleh pemerintah. Sedangkan pengeluaran mencakup baik pengeluaran barang dan jasa yang dibayarkan kepada sektor lain, maupun pembayaran transfer (seperti pembayaran pajak) dan dividen. Pengeluaran untuk barang modal tetap dan persediaan dikategorikan sebagai pengeluaran modal.

0200 Investasi Non finansial

Merupakan penjumlahan dari Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori.

0210 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Yang dimaksud dengan PMTB adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan merupakan barang

konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan, dan bandara, serta mesin dan peralatan.

0220 Perubahan Inventori

Perubahan Inventori adalah perubahan nilai persediaan pada akhir tahun dikurangi dengan persediaan pada awal tahun. Persediaan meliputi bahan baku, pekerjaan yang masih dalam proses dan barang jadi yang belum terjual. Termasuk juga persediaan di bidang pertanian seperti ternak dan hasil pertanian. Perubahan persediaan emas yang dikuasai oleh Bank Sentral merupakan bagian dari kategori transaksi Cadangan Valuta Asing Pemerintah (0800).

0300 Pinjaman Neto = 0100 - 0200

Pinjaman Neto merupakan selisih antara Tabungan Bruto dengan Perolehan Harta Non Finansial. Istilah ini disebut juga Celah Tabungan dan Investasi atau *Saving Investment Gap (S-I Gap)*.

0400 Selisih Statistik = 0300 - 0500

Selisih Statistik adalah selisih antara Pinjaman Neto (sisi transaksi riil, bagian atas NAD) dan Investasi Finansial Neto (sisi finansial NAD). Penyebab utama adanya Selisih Statistik di beberapa sektor adalah adanya perbedaan sumber data antara bagian atas NAD dan sisi finansialnya.

Jika dalam persamaan akuntansi total aset sama dengan kewajiban plus kekayaan neto, maka Pinjaman Neto harus sama dengan Investasi Finansial Neto. Tetapi karena data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber yang berbeda cakupannya, maka terjadi ketidakkonsistenan yang menimbulkan selisih tersebut.

0500 Investasi Finansial Neto = 0600 - 0700

Investasi Finansial Neto merupakan selisih antara jumlah penggunaan finansial (kenaikan harta finansial neto) dengan jumlah sumber finansial (kenaikan kewajiban finansial neto).

0600 Jumlah Penggunaan Finansial

Jumlah Penggunaan Finansial merupakan jumlah seluruh perubahan instrumen finansial dari neraca keuangan sisi aktiva. Kenaikan dari penggunaan finansial berarti positif dan penurunannya berarti negatif.

0700 Jumlah Sumber Finansial

Jumlah Sumber Finansial merupakan jumlah seluruh perubahan instrumen finansial dari neraca keuangan sisi pasiva. Kenaikkan sumber finansial berarti positif dan penurunannya berarti negatif.

0800 Cadangan Valuta Asing Pemerintah

Cadangan Valuta Asing (Valas) Pemerintah terdiri dari Emas Moneter, *Special Drawing Rights*, Posisi Cadangan di IMF, Deposito, dan Surat Berharga Dalam Valuta Asing yang dimiliki oleh Otoritas Moneter. Cadangan Valas Pemerintah adalah Aktiva Otoritas Moneter dan merupakan kewajiban sektor Luar Negeri. Dalam penghitungan Pendapatan Nasional, Emas Moneter (dalam bentuk fisik) diperlakukan sebagai hutang luar negeri.

0810 Emas Moneter

Kategori ini mencakup emas yang dimiliki atau disimpan oleh Bank Indonesia. Emas moneter mencakup juga emas yang disimpan pada lembaga keuangan luar negeri. Lawan dari aktiva finansial ini merupakan pasiva di sektor luar negeri.

0820 *Special Drawing Rights (SDR)*

SDR merupakan aktiva cadangan yang diciptakan oleh Dana Moneter Internasional (*IMF*) sebagai pelengkap emas dan mata uang cadangan.

0830 Posisi Cadangan di IMF

Merupakan klaim negara kepada IMF.

0840 Cadangan Valuta Asing

Kategori ini mencakup mata uang asing yang dikuasai dan disimpan oleh Bank Indonesia, Giro dan Deposito Berjangka di bank-bank Luar Negeri, Wesel Ekspor yang didiskontokan lagi oleh bank-bank devisa di Indonesia, investasi dalam surat-surat berharga luar negeri dan klaim atas pemerintah pusat.

0850 Lainnya

Kategori ini mencakup seluruh klaim Luar Negeri Bank Indonesia yang tidak termasuk dalam kategori 0810 sampai dengan 0840.

0900 Klaim Dalam Valuta Asing Lainnya

Kategori ini mencakup semua jenis klaim valas yang tidak termasuk dalam kategori transaksi, seperti Cadangan Valas Pemerintah, Deposito Dalam Valas, Pinjaman Dalam Valas, Tagihan Jangka Pendek dan Tagihan Jangka Panjang Dalam Valas, serta Obligasi.

1000 Uang dan Simpanan (Jumlah)

Uang dan Simpanan terdiri dari seluruh jenis mata uang yang dipegang oleh penduduk, Deposito dan Giro di bank dan giro pos baik dalam rupiah maupun valas, serta Deposito dan simpanan lainnya yang dimiliki penduduk pada bank asing di Luar Negeri. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Uang Kartal dan Uang Logam yang beredar, Giro, Tabungan, Deposito Berjangka dan Tabungan Giro Pos.

1010 Uang Dan Simpanan Dalam Valuta Asing

Kategori ini mencakup semua jenis mata uang asing yang dipegang oleh penduduk dan tabungan dalam valas yang disimpan di Bank Indonesia, bank-bank pencipta uang giral (BPUG), dan bank asing yang dinilai dalam rupiah.

1011 Uang

Kategori ini mencakup semua jenis uang kertas dan uang logam dalam valas.

1012 Giro

Kategori ini merupakan simpanan dalam mata uang asing di bank yang dapat ditarik dengan menggunakan cek.

1013 Tabungan

Kategori ini merupakan tabungan dalam mata uang asing yang dapat ditarik dengan menunjukkan buku tabungan.

1014 Deposito Berjangka

Kategori ini merupakan deposito dalam valas yang dapat ditarik jika telah disimpan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan persetujuan antara penabung dan bank saat perjanjian dibuat.

1019 Tabungan Lainnya

Kategori ini mencakup semua tabungan dalam valas yang tidak termasuk dalam kategori 1011 sampai dengan 1014.

1020 Uang Dan Simpanan dalam Rupiah

Kategori ini mencakup semua jenis mata uang rupiah yang dipegang oleh penduduk dan simpanan pada Bank Indonesia, BPUG dan Bank Asing, Kantor Pos dan Giro dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito Berjangka.

1021 Uang Kertas dan Logam

Kategori ini mencakup uang kertas dan logam yang dipegang oleh masyarakat termasuk Kas Negara dan BPUG. Uang adalah bukti hutang Otoritas Moneter kepada masyarakat umum.

1022 Giro

Kategori ini merupakan tabungan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek. Giro antar bank tidak termasuk dalam kategori ini, tetapi masuk kategori Klaim Antar Bank (2000).

1023 Tabungan

Tabungan merupakan tabungan yang dapat ditarik dengan menggunakan bukti buku tabungannya.

1024 Deposito Berjangka

Deposito Berjangka adalah jenis tabungan yang hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dan depositor pada saat pembukuan tabungan.

1030 Tabungan Giro Pos Dan Koperasi

Tabungan Giro Pos merupakan hutang Kantor Pos dan Giro berupa tabungan dan giro. Sedangkan tabungan Koperasi merupakan tabungan wajib dan sukarela.

1100 Surat Berharga Jangka Pendek

Kategori ini mencakup surat tanda hutang jangka pendek yang dapat diperjual belikan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Surat berharga ini dapat dikeluarkan

oleh perusahaan swasta atau sektor pemerintah baik dalam nilai rupiah maupun mata uang asing lainnya.

1200 Kredit (Jumlah)

Kategori ini menunjukkan jumlah pinjaman bank dan pinjaman dari institusi lainnya baik dalam rupiah maupun valas. Pinjaman merupakan hasil persetujuan antara peminjam dengan si pemberi pinjaman. Pinjaman adalah suatu instrumen finansial yang tidak dapat diperjualbelikan di pasar uang. Ciri terakhir inilah yang membedakan pinjaman dengan surat berharga jangka pendek.

1210 Kredit Bank Dalam Rupiah

Kategori ini mencakup pinjaman (kredit) dan cerukan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, BPUG, dan bank lain di Indonesia. Kredit bank dalam kategori ini biasanya digunakan untuk tujuan bisnis. Kredit bank untuk individu (bukan bisnis) digolongkan pada Kredit Konsumsi; termasuk di dalamnya kredit pemilikan barang tak bergerak. Kategori ini hanya mencakup pinjaman Bank dalam rupiah, sedangkan pinjaman Bank dalam valas dimasukkan dalam kategori Pinjaman Dalam Valas (1230).

1211 Kredit Modal Kerja

Kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari.

1212 Kredit Investasi

Kredit Investasi adalah kredit jangka panjang atau menengah yang tujuannya untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan, proyek penempatan kembali dan/atau pembuatan proyek baru.

1213 Kredit Konsumsi

Kredit Konsumsi adalah kredit perorangan untuk tujuan non bisnis, termasuk kredit pemilikan rumah. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil atau barang-barang tahan lama lainnya untuk keperluan konsumsi. Dalam kategori ini juga termasuk Hutang Hipotek atau persetujuan penjualan yang dijamin oleh harta berwujud seperti tanah dan bangunan tempat tinggal.

1220 Kredit Institusi Lain Dalam Rupiah

Kategori ini dimaksudkan untuk menampung semua jenis pinjaman dalam rupiah yang diberikan oleh berbagai institusi selain bank. Kredit oleh lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan non finansial (Pemerintah dan Swasta) termasuk di sini.

1221 Kredit Modal Kerja

Lihat definisi 1211.

1222 Kredit Investasi

Lihat definisi 1212.

1223 Kredit Konsumsi

Kategori ini mencakup pinjaman dalam rupiah dari Perusahaan Asuransi Jiwa, Koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank lainnya.

1230 Kredit Dalam Valuta Asing

Kategori ini mencakup semua jenis pinjaman dalam valuta asing dari semua sektor ekonomi baik di dalam maupun luar negeri.

1300 Modal Saham Dan Penyertaan

Kategori ini mencakup segala jenis saham baik yang diperjualbelikan maupun tidak. Dalam kategori ini termasuk juga penyertaan modal pemerintah dan penyertaan sektor-sektor lainnya. Dalam NAD yang dicatat adalah saham baru yang diterbitkan, pembelian kembali saham serta jual-beli saham yang beredar berdasarkan harga pasar.

1400 Surat Berharga Jangka Panjang (jumlah)

Kategori ini mencakup Hutang Jangka Panjang dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Kategori ini merupakan jumlah obligasi pemerintah dan surat berharga jangka panjang lainnya baik dalam nilai rupiah maupun valas. Berbeda dengan hutang, Obligasi adalah surat berharga yang dapat dipindahtangankan, tidak seperti hutang. Hutang Obligasi tidak selalu dijamin oleh harta riilnya.

1410 Surat Berharga Pemerintah (Jumlah)

Kategori ini mencakup semua surat berharga jangka panjang Pemerintah yang dijual di dalam maupun luar negeri. Kategori ini meliputi surat berharga jangka panjang

dalam nilai rupiah dan valas. Obligasi yang dikeluarkan oleh BUMN dimasukkan dalam kategori Surat Berharga Jangka Panjang Lainnya (1420).

1420 Surat Berharga Lainnya

Kategori ini mencakup surat berharga jangka panjang dalam pengertian luas, yang dikeluarkan oleh selain pemerintah. Jenis surat berharga ini dapat dikeluarkan oleh sektor dalam negeri maupun luar negeri. Surat berharga hipotek termasuk di sini, tetapi bukan untuk kredit kepemilikan rumah. Surat berharga ini dapat juga diterbitkan oleh Yayasan, Perusahaan Swasta dan BUMN.

1500 Cadangan Asuransi Dan Pensiun

Kategori ini mencakup cadangan asuransi jiwa, asuransi non jiwa, asuransi sosial dan dana pensiun. Bagi perusahaan Asuransi Jiwa dan perusahaan Dana Pensiun, transaksi ini merupakan hutang Perusahaan Asuransi Jiwa kepada pemegang polis dan hutang perusahaan dana pensiun kepada anggotanya. Bagi perusahaan Asuransi Non Jiwa transaksi ini mencakup cadangan perusahaan asuransi non jiwa yang digunakan untuk membiayai klaim yang belum dibayar atau klaim di masa yang akan datang. Cadangan teknis pada perusahaan Asuransi Non Jiwa pada dasarnya adalah harta perorangan, perusahaan dan pemerintah di semua sektor, yang tidak dapat dicatat sebagai harta pada pembukuan pemegang polis.

1800 Kredit Dagang

Kategori ini mencakup mencakup kredit jangka pendek yang terjadi dalam bisnis, berupa hutang-piutang antar penyuplai dan pembeli barang dan jasa. Kredit ini berlangsung sejak barang dan jasa diserahkan sampai dengan pembayaran diterima. Kredit Dagang bukan merupakan instrumen finansial yang dapat diperjualbelikan seperti instrumen pasar uang, maupun dinegosiasikan seperti hutang bank. Kredit Dagang antara perusahaan afiliasi termasuk dalam kategori ini. Karena arus finansial dari perusahaan dalam negeri tidak dicatat atas dasar nilai yang dikonsolidasikan, maka Kredit Dagang dalam NAD merupakan arus intra-sektor.

2000 Rekening Antar Bank

Rekening Antar Bank adalah semua jenis klaim yang terjadi antara bank yang satu dengan bank lainnya. Tidak termasuk rekening antar kantor, antar cabang dan kantor

pusat, atau antar cabang dari bank yang sama. Rekening antar kantor dinetokan (sisi pasiva dikurangi dengan aktivasnya) dan dimasukkan dalam kategori Rupa-rupa (9000).

9000 Rupa-rupa

Kategori ini mencakup berbagai transaksi lainnya yang tidak termasuk di dalam semua kategori yang disebutkan di atas.

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 3

**Matrik NAD Indonesia Tahunan, 2006 - 2011
Menurut Kategori Transaksi dan Sektor**

<http://www.bps.go.id>

TABEL 1. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 1. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KEUANGAN/			
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH	
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GOVERNMENT	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		17.256		27.613		8.815		180.262		181.082
0200	Investasi Nonfinansial	243		2.891		1.567		31.417		113.721	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	17.013		24.722		7.249		148.845		67.361	
0400	Selisih Statistik = 0300-0500			0							
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	17.013		24.722		7.249		148.845		67.361	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	126.964		229.329		30.887		237.046		98.784	
0700	Jumlah Sumber Finansial		109.951		204.607		23.638		88.201		31.423
0800	Cadangan Valas Pemerintah	29.423									
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(729)		(6.295)	(5.711)	(25)	98	(70)	(184)	64	
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	13.228	(76.335)	(14.690)	161.175	12.470		84.189		2.425	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	13.228	(8.458)	(21.812)	(4.746)	(730)		(5.526)		(11.033)	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		(67.876)	7.122	165.921	13.200		80.522		13.458	
1021	Uang Kertas dan Logam		33.703	7.031		1.334		10.669		1.334	
1022	Giro		(101.324)	(1)	57.241	1.016		9.362		1.419	
1023	Tabungan		(256)		52.904	372		43.461		1.508	
1024	Deposito Berjangka				55.261	10.522		17.021		8.931	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			92	515	(43)		9		266	
1030	Tabungan Giro Pos & Koperasi							9.193			
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			2.127	6.282	35	(409)	126			(0)
1200	Kredit (Jumlah)	(156)	(5.834)	99.969	(608)	(123)	6.636	(57)	65.197	506	(67.241)
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(154)		75.599			5.441		64.781		898
1220	Kredit Institusi Lain dlm Rp				(2.550)	(123)	1.321	(57)	(1.547)	321	
1230	Kredit dalam Valas	(2)	(5.834)	24.370	1.942		(126)	(0)	1.963	185	(68.139)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	44	(117)	(106)	8.694	(136)	3.643	34.824	(200)	5.680	
1400	Surat Berharga Jk Panjang	11.810	13.626	(9.721)	1.828	4.689	(8)	1		15.917	32.284
1410	Surat Berharga Pemerintah	11.810	14.349	(11.505)		3.567				14.349	32.284
1420	Surat Berharga Lainnya		(724)	1.784	1.828	1.122	(8)	1		1.568	
1500	Cadangan Asuransi & Pensiun					4.363	20.976	16.813			
1800	Kredit Dagang					29.784	(5.904)	19.259	21.787		
2000	Rekening Antar Bank	167	142.713	156.564	22.045	7.672	13	51			
9000	Rupa-rupa	73.178	35.898	1.481	10.902	(27.841)	(1.406)	81.839	1.487	74.440	66.316
	TOTAL	127.207	127.207	232.220	232.220	32.454	32.454	268.463	268.463	212.505	212.505

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber
angka dalam kurung berarti negatif

INDONESIA, 2006 (Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2006 (IN BILLION RUPIAHS)

NON FINANCIAL SECTORS				LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
PRSH PEMERINTAH		BISNIS		REST OF THE WORLD		TOTAL			
GOVT ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES		REST OF THE WORLD		TOTAL			
P	S	P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S	U	S		
	3.708		467.893		(38.460)		848.168	GROSS SAVING	0100
78.006		620.324				848.168		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(74.298)		(152.431)		(38.460)				NET LENDING/BORROWING	0300
								STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(74.298)		(152.431)		(38.460)				NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
12.952		323.518		44.642		1.104.121		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	87.250		475.949		83.101		1.104.121	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
					29.423	29.423	29.423	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
		(51.331)	(58.753)	(23.089)	(17.280)	(81.653)	(81.653)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
11.642		53.085	9.193	(76.257)	(7.943)	86.091	86.091	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
5.683		(1.514)		466	(8.034)	(21.238)	(21.238)	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
5.959		54.599		(76.724)	91	98.136	98.136	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
2.667		10.669				33.703	33.703	CURRENCY AND COIN	1021
155		20.647		(76.682)	(1)	(44.083)	(44.083)	DEMAND DEPOSITS	1022
1.148		5.643		517		52.648	52.648	SAVING DEPOSITS	1023
2.012		17.327		(551)		55.261	55.261	TIME DEPOSITS	1024
(24)		314		(7)	92	607	607	OTHER RUPIAH DEPOSITS	1025
			9.193			9.193	9.193	POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
49	(275)	(3.110)	(1.205)	2.205	(2.962)	1.431	1.431	SHORT TERM SECURITIES	1100
(59)	10.564	1.441	(94.598)	(185.876)	1.531	(84.355)	(84.353)	CREDIT	1200
	2.876		943		506	75.445	75.445	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
(59)	(30)	456	256	(3.091)		(2.553)	(2.550)	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	7.718	985	(95.797)	(182.786)	1.026	(157.248)	(157.248)	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
7.670	65.774	464.912	519.376	79.044	(5.240)	591.932	591.932	STOCK AND PARTICIPATION	1300
583	40	11.946	16.275	25.991	(2.827)	61.217	61.217	LONG TERM SECURITIES	1400
(472)		17.638		11.246		46.633	46.633	GOVERNMENT BONDS	1410
1.055	40	(5.691)	16.275	14.745	(2.827)	14.584	14.584	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
	600	400				21.576	21.576	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
5.762	8.077	58.352	59.344	2.331	32.183	115.488	115.488	TRADE CREDITS	1800
		(2.978)		3.297		164.772	164.772	INTERBANK CLAIMS	2000
(12.694)	2.469	(209.201)	26.316	216.997	56.215	198.200	198.197	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
90.958	90.958	943.842	943.842	44.642	44.642	1.952.289	1.952.289	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

TABEL 2. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 2. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KEUANGAN/			
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH	
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GOVERNMENT	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
	U	S	U	S	U	S	U	S	U	S	
0100	Tabungan Bruto		(15.432)		24.690		19.386		241.342		168.661
0200	Investasi Nonfinansial	283		2.876		199		161.772		133.690	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(15.715)		21.814		19.187		79.571		34.972	
0400	Selisih Statistik = 0300-0500	0						0			
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(15.715)		21.814		19.187				34.971	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	194.331		298.047		95.082		484.081		(818)	
0700	Jumlah Sumber Finansial		210.046		276.233		75.895		404.510		(35.789)
0800	Cadangan Valas Pemerintah	157.378									
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	121		3.162	637	0	149		108		
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(4.543)	43.289	(9.249)	232.504	4.766		126.026		(8.408)	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(4.543)	(4.626)	(20.110)	35.276	2.475		3.844		(4.788)	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		47.914	10.861	197.229	2.291		122.182		(3.620)	
1021	Uang Kertas dan Logam		42.213	9.900		1.616		12.925		1.616	
1022	Giro		5.698		59.407	2.694		8.679		(7.211)	
1023	Tabungan		3		102.057	(393)		104.291		(773)	
1024	Deposito Berjangka				33.079	(1.625)		(3.892)		2.288	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			960	2.686	(1)		179		461	
1030	Tabungan Giro Pos & Koperasi										
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			1.751	9.861	221	(111)	(571)		14	(0)
1200	Kredit (Jumlah)	(11.518)	(62)	209.819	5.767	17.110	9.658	15.011	96.985	38	20.824
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(11.519)		155.013		14.398	3.389		97.727	371	(6.784)
1220	Kredit Institusi Lain dlm Rp				1.527	2.629	(15)	15.012		(299)	
1230	Kredit dalam Valas	1	(62)	54.806	4.239	83	6.283	(1)	(742)	(34)	27.607
1300	Modal Saham dan Penyertaan		288	(255)	9.746	38.813	5.255	44.806		(169)	
1400	Surat Berharga Jk Panjang	(7.860)	5.061	3.289	3.076	23.739	3.966	10.930		5.020	59.251
1410	Surat Berharga Pemerintah	(7.860)		(464)		13.904					59.251
1420	Surat Berharga Lainnya		5.061	3.753	3.076	9.835	3.966	10.930		5.020	
1500	Cadangan Asuransi & Pensiun					389	47.426	5.747			
1800	Kredit Dagang					1.533	(2)	43.033	45.846		
2000	Rekening Antar Bank	(1.642)	87.668	80.719	4.409	1.192	30	158			
9000	Rupa-rupa	62.395	73.803	8.811	10.234	7.318	9.523	238.941	261.572	2.687	(115.864)
	TOTAL	194.614	194.614	300.924	300.924	95.281	95.281	645.852	645.852	132.872	132.872

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber
angka dalam kurung berarti negatif

INDONESIA, 2007) (Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2007) (IN BILLION RUPIAHS)

NON FINANCIAL SECTORS				LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
PRSH PEMERINTAH		BISNIS		REST OF THE WORLD		TOTAL			
GOVT ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES							
P	S	P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S	U	S		
	40.594		502.550		2.782		984.574	GROSS SAVING	0100
75.508		610.246				984.574		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(34.914)		(107.696)		2.782				NET LENDING/BORROWING	0300
		0						STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(34.914)		(107.696)		2.782				NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
106.512		918.057		230.651		2.325.943		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	141.426		1.025.754		227.869		2.325.943	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
					157.378	157.378	157.378	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
		12.732	16.578	17.315	15.858	33.330	33.330	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
27.513		116.379		6.572	(16.737)	259.056	259.056	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
2.235		30.914		2.924	(17.698)	12.953	12.953	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
25.278		85.464		3.648	960	246.103	246.103	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
3.231		12.925				42.213	42.213	CURRENCY AND COIN	1021
17.849		40.174		2.921		65.105	65.105	DEMAND DEPOSITS	1022
(349)		(91)		(625)		102.060	102.060	SAVING DEPOSITS	1023
4.074		31.117		1.117		33.079	33.079	TIME DEPOSITS	1024
473		1.340		235	960	3.646	3.646	OTHER RUPIAH DEPOSITS	1025
								POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
271	632	2.116	14.410	17.320	(3.670)	21.123	21.123	SHORT TERM SECURITIES	1100
187	12.140	1.793	279.188	193.139	1.079	425.579	425.579	CREDIT	1200
	(488)	148	64.822		(256)	158.411	158.411	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
187	1.396	634	16.848	1.594		19.757	19.757	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	11.232	1.010	197.518	191.544	1.335	247.410	247.410	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
	101.356	542.966	641.936	132.278	(142)	758.438	758.438	STOCK AND PARTICIPATION	1300
2.887	1.960	5.913	5.539	32.180	(2.755)	76.098	76.098	LONG TERM SECURITIES	1400
		15.004		38.666		59.251	59.251	GOVERNMENT BONDS	1410
2.887	1.960	(9.091)	5.539	(6.485)	(2.755)	16.847	16.847	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
	2.688	43.979				50.114	50.114	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
2.830	11.518	82.352	63.083	3.208	12.512	132.956	132.956	TRADE CREDITS	1800
		1.769		9.912		92.107	92.107	INTERBANK CLAIMS	2000
72.824	11.131	108.059	5.019	(181.273)	64.346	319.764	319.764	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
182.020	182.020	1.528.303	1.528.303	230.651	230.651	3.310.517	3.310.517	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

TABEL 3. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 3. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KEUANGAN/			
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH	
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GOVERNMENT	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		18.624		50.149		18.608		325.444		229.473
0200	Investasi Nonfinansial	176		6.154		2.939		186.531		178.635	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	18.448		43.995		15.668		138.913		50.838	
0400	Selisih Statistik = 0300-0500					0					
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	18.448		43.995		15.668		138.913		50.838	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	(104.120)		331.247		60.336		270.482		130.306	
0700	Jumlah Sumber Finansial		(122.568)		287.252		44.668		131.569		79.468
0800	Cadangan Valas Pemerintah	44.180									
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	234		16.651	3.841	10	(191)		130		
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(16.229)	120.450	74.645	267.600	7.829		181.491		115.100	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(16.229)	54.377	57.950	83.132	(1.039)		28.574		54.422	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		66.074	16.694	184.468	8.868		139.751		60.678	
1021	Uang Kertas dan Logam		43.605	16.825		1.339		10.712		1.339	
1022	Giro		22.480		(2.941)	35		(3.852)		45.226	
1023	Tabungan		(12)		43.161	(63)		42.268		88	
1024	Deposito Berjangka				138.247	7.538		90.518		8.755	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			(131)	6.001	18		104		5.270	
1030	Tabungan Giro Pos & Koperasi							13.166			
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			9.334	(9.276)	68	370	(341)		(4)	0
1200	Kredit (Jumlah)	47	713	317.593	13.379	32.385	32.200	14.916	189.139	(100)	142.218
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	42		273.911		29.218	8.479		154.845	(320)	506
1220	Kredit Institusi Lain dlm Rp				(82)	2.834		14.916	34.192	204	
1230	Kredit dalam Valas	4	713	43.682	13.461	332	23.721		102	17	141.712
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(0)	522	1.056	(11.727)	(2.242)	3.118	10.727		(3.559)	
1400	Surat Berharga Jk Panjang	2.471	12.990	(12.493)	(222)	17.989	(1.641)	(36)		12.985	50.225
1410	Surat Berharga Pemerintah	2.471		(12.242)		17.830					50.225
1420	Surat Berharga Lainnya		12.990	(250)	(222)	158	(1.641)	(36)		12.985	
1500	Cadangan Asuransi & Pensiun					532	9.368	10.469			
1800	Kredit Dagang					1.753	3.976	(24.065)	(4.017)		
2000	Rekening Antar Bank	2.234	(124.323)	(88.564)	9.194	(7.084)	26	(154)			
9000	Rupa-rupa	(137.056)	(132.920)	13.024	14.463	9.097	(2.558)	77.475	(53.683)	5.883	(112.975)
	TOTAL	(103.944)	(103.944)	337.401	337.401	63.275	63.275	457.013	457.013	308.941	308.941

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber
angka dalam kurung berarti negatif

INDONESIA, 2008 (Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2008 (IN BILLION RUPIAHS)

NON FINANCIAL SECTORS				LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
PRSH PEMERINTAH		BISNIS		REST OF THE WORLD		TOTAL			
GOVT ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES							
P	S	P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S	U	S		
	64.475		825.057		(36.684)		1.508.831	GROSS SAVING	0100
114.542		1.019.853				1.508.831		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(50.067)		(194.796)		(36.684)				NET LENDING/BORROWING	0300
						0		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(50.067)		(194.796)		(36.684)		(0)		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
31.120		(255.200)		175.048		652.904		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	81.187		(60.404)		211.732		652.904	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
					44.180	44.180	44.180	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
	212	(15.280)	13.439	7.752	(8.063)	9.367	9.367	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
(7.650)		78.439	13.166	12.383	44.792	446.007	446.007	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
(3.631)		45.909		16.475	44.922	182.431	182.431	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
(4.019)		32.530		(4.091)	(131)	250.411	250.411	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
2.678		10.712				43.605	43.605	CURRENCY AND COIN	1021
(16.536)		(871)		(4.462)		19.539	19.539	DEMAND DEPOSITS	1022
(397)		735		516		43.149	43.149	SAVING DEPOSITS	1023
10.576		20.916		(57)		138.247	138.247	TIME DEPOSITS	1024
(340)		1.038		(89)	(131)	5.870	5.870	OTHER RUPIAH DEPOSITS	1025
			13.166			13.166	13.166	POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
(79)	(1.026)	954	12.505	2	7.361	9.934	9.934	SHORT TERM SECURITIES	1100
935	11.766	30.034	358.150	369.071	17.316	764.881	764.881	CREDIT	1200
	12.442	(92)	126.265		222	302.760	302.760	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
935	2.462	14.186	(3.307)	191		33.265	33.265	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	(3.139)	15.941	235.192	368.880	17.094	428.856	428.856	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
	24.679	(672.431)	(782.512)	(58.283)	41.189	(724.731)	(724.731)	STOCK AND PARTICIPATION	1300
7.325	(268)	(58.892)	(25.259)	69.203	2.727	38.551	38.551	LONG TERM SECURITIES	1400
		(21.520)		63.686		50.225	50.225	GOVERNMENT BONDS	1410
7.325	(268)	(37.372)	(25.259)	5.517	2.727	(11.674)	(11.674)	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
	3.899	2.266				13.267	13.267	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
4	18	397.244	380.077	9.169	4.050	384.104	384.104	TRADE CREDITS	1800
		(2.001)		(19.534)		(115.102)	(115.102)	INTERBANK CLAIMS	2000
30.586	41.909	(15.532)	(29.971)	(214.715)	58.181	(217.554)	(217.554)	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
145.662	145.662	764.653	764.653	175.048	175.048	2.161.734	2.161.734	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

TABEL 4. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 4. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KEUANGAN/			
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH	
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GOVERNMENT	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		(5.054)		83.509		40.695		398.812		115.967
0200	Investasi Nonfinansial	302		5.454		6.205		215.304		186.602	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(5.356)		78.055		34.489		183.508		(70.635)	
0400	Selisih Statistik = 0300-0500	(0)									
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(5.356)		78.055		34.489		183.508		(70.635)	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	122.131		255.916		240.469		268.802		(1.454)	
0700	Jumlah Sumber Finansial		127.487		177.861		205.980		85.293		69.180
0800	Cadangan Valas Pemerintah	139.516									
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(751)		(13.156)	(3.518)	4	(2.930)		(239)		
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(9.642)	21.748	50.654	205.476	9.640		177.184		(10.467)	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(9.642)	7.809	52.611	12.092	(14)		10.223		7.963	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		13.939	(1.957)	193.384	9.654		166.656		(18.430)	
1021	Uang Kertas dan Logam		14.638	(1.621)		774		6.504		813	
1022	Giro		(711)	36	30.367	195		23.414		(13.535)	
1023	Tabungan		12		82.898	345		79.970		(193)	
1024	Deposito Berjangka				83.615	8.285		56.441		93	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			(372)	(3.496)	56		328		(5.608)	
1030	Tabungan Giro Pos & Koperasi							305			
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			1.837	1.986	(82)	(184)	219		(5)	(0)
1200	Kredit (Jumlah)	(751)	(1.754)	130.640	(2.807)	9.067	(3.029)	2.017	110.995	(856)	21.024
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(719)		174.728			6.975		106.821		1.343
1220	Kredit Institusi Lain dlm Rp				2.502	5.053	(185)	2.017	1.996	(776)	
1230	Kredit dalam Valas	(32)	(1.754)	(44.088)	(5.309)	4.014	(9.819)		2.178	(80)	19.681
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(50)	25.028	3.287	12.909	66.851	13.964	93.150		1.955	
1400	Surat Berharga Jk Panjang	(626)	(6.866)	(8.779)	2.494	85.729	3.551	19.932		(6.866)	110.679
1410	Surat Berharga Pemerintah	(626)		(9.004)		58.425		7.250			110.679
1420	Surat Berharga Lainnya		(6.866)	225	2.494	27.305	3.551	12.682		(6.866)	
1500	Cadangan Asuransi & Pensiun					797	105.786	6.324			
1800	Kredit Dagang						(1)	(22.046)	(12.289)		
2000	Rekening Antar Bank	(3.419)	105.693	71.206	(3.816)	2.185		74			
9000	Rupa-rupa	(2.144)	(16.363)	20.227	(34.864)	66.277	88.822	(8.053)	(13.173)	14.783	(62.522)
	TOTAL	122.433	122.433	261.369	261.369	246.675	246.675	484.106	484.106	185.147	185.147

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber
angka dalam kurung berarti negatif

INDONESIA, 2009 (Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2009 (IN BILLION RUPIAHS)

NON FINANCIAL SECTORS				LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
PRSH PEMERINTAH		BISNIS		REST OF THE WORLD		TOTAL			
GOVT ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES							
P	S	P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S	U	S		
	52.351		1.011.910		38.903		1.737.093	GROSS SAVING	0100
110.366		1.212.860				1.737.093		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(58.015)		(200.950)		38.903				NET LENDING/BORROWING	0300
		(0)				(0)		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(58.015)		(200.950)		38.903		0		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
242.639		1.867.734		278.527		3.274.763		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	300.654		2.068.683		239.624		3.274.763	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
					139.516	139.516	139.516	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
	(212)	2.182	(3.160)	(528)	(2.191)	(12.249)	(12.249)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
4.314		89.695	305	(10.417)	73.432	300.961	300.961	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
7.466		36.961		(11.899)	73.768	93.670	93.670	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
(3.152)		52.733		1.482	(336)	206.987	206.987	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
1.626		6.543				14.638	14.638	CURRENCY AND COIN	1021
2.070		16.348		1.164	36	29.692	29.692	DEMAND DEPOSITS	1022
5		2.613		171		82.910	82.910	SAVING DEPOSITS	1023
(7.325)		25.993		128		83.615	83.615	TIME DEPOSITS	1024
472		1.237		19	(372)	(3.868)	(3.868)	OTHER RUPIAH DEPOSITS	1025
			305			305	305	POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
235	34	631	5.447	1.394	(3.054)	4.229	4.229	SHORT TERM SECURITIES	1100
(63)	19.040	3.519	114.221	117.570	3.453	261.143	261.143	CREDIT	1200
	13.713		45.252		(95)	174.009	174.009	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
(63)	943	3.519	3.944	(551)		9.200	9.200	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	4.384		65.025	118.121	3.548	77.934	77.934	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
212.688	251.339	433.015	840.879	339.537	6.312	1.150.432	1.150.432	STOCK AND PARTICIPATION	1300
1.087	24.213	(57.076)	(13.793)	92.627	5.750	126.029	126.029	LONG TERM SECURITIES	1400
		(25.109)		79.744		110.679	110.679	GOVERNMENT BONDS	1410
1.087	24.213	(31.966)	(13.793)	12.883	5.750	15.350	15.350	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
78		98.587				105.786	105.786	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
11.178	(28.757)	192.402	202.834	(874)	18.873	180.660	180.660	TRADE CREDITS	1800
		(3.904)		35.734		101.877	101.877	INTERBANK CLAIMS	2000
13.123	34.997	1.108.683	921.950	(296.516)	(2.467)	916.379	916.379	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
353.006	353.006	3.080.594	3.080.594	278.527	278.527	5.011.856	5.011.856	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

TABEL 5. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 5. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KEUANGAN/			
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH	
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GOVERNMENT	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		(27.515)		36.403		22.565		453.696		173.697
0200	Investasi Nonfinansial	350		1.189		13.587		217.781		168.114	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(27.864)		35.214		8.978		235.915		5.583	
0400	Selisih Statistik = 0300-0500										
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(27.864)		35.214		8.978		235.915		5.583	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	260.048		476.601		149.526		373.035		21.132	
0700	Jumlah Sumber Finansial		287.912		441.387		140.548		137.120		15.548
0800	Cadangan Valas Pemerintah	227.485									
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(665)		(37)	(6.294)	(31)	2.819		24		
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	14.344	76.620	(35.494)	388.209	31.302		248.490		13.572	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	14.344	5.353	(41.507)	40.564	1.031		24.720		5.042	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		71.267	6.013	347.646	30.271		222.942		8.531	
1021	Uang Kertas dan Logam		39.547	5.357		2.465		13.676		1.709	
1022	Giro		31.731	17	38.696	4.877		22.152		(41)	
1023	Tabungan		(11)		120.962	944		113.055		228	
1024	Deposito Berjangka				175.476	21.934		66.840		5.919	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			639	12.512	51		7.220		716	
1030	Tabungan Giro Pos & Koperasi							828			
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			23.136	(327)	5.757	1.560	(736)		(6)	81
1200	Kredit (Jumlah)	(247)	(527)	330.185	4.693	49.670	39.392	5.589	92.642	(899)	(10.346)
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(247)		266.714			21.627		75.720		(324)
1220	Kredit Institusi Lain dlm Rp				4.200	47.419	178	5.589	10.978	(877)	
1230	Kredit dalam Valas		(527)	63.471	493	2.251	17.587		5.944	(22)	(10.023)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(224)		2.126	30.068	47.840	9.185	68.883	0	(4.792)	
1400	Surat Berharga Jk Panjang	(4.468)	(3.647)	(28.105)	(1.034)	22.087	(13.598)	846		2.954	87.436
1410	Surat Berharga Pemerintah	(4.468)		(37.092)		3.876		(797)		6.755	87.436
1420	Surat Berharga Lainnya		(3.647)	8.987	(1.034)	18.211	(13.598)	1.644		(3.801)	
1500	Cadangan Asuransi & Pensiun					2	49.419	8.211			
1800	Kredit Dagang						3	(15.627)	(19.114)		
2000	Rekening Antar Bank	(1.709)	196.188	201.849	15.619	1.977		(150)			
9000	Rupa-rupa	25.530	19.278	(17.059)	10.452	(9.078)	51.768	57.529	63.568	10.303	(61.623)
	TOTAL	260.398	260.398	477.790	477.790	163.113	163.113	590.816	590.816	189.245	189.245

Keterangan:

P = Penggunaan, S = Sumber
angka dalam kurung berarti negatif
) Angka Sementara

INDONESIA, 2010 *) (Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2010 *) (IN BILLION RUPIAHS)

NON FINANCIAL SECTORS				LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
PRSH PEMERINTAH		BISNIS		REST OF THE WORLD		TOTAL			
GOVT ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES							
P	S	P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S	U	S		
	7.787		1.357.025		72.915		2.096.575	GROSS SAVING	0100
28.100		1.667.454				2.096.575		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(20.313)		(310.429)		72.915				NET LENDING/BORROWING	0300
								STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(20.313)		(310.429)		72.915				NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
11.129		1.745.793		283.907		3.321.171		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	31.442		2.056.222		210.992		3.321.171	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
					227.485	227.485	227.485	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
	28	(19.530)	(6.089)	(8.996)	(19.749)	(29.260)	(29.260)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
26.173		108.890	828	21.686	(36.694)	428.964	428.964	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
(4.265)		(1.173)		10.376	(37.350)	8.567	8.567	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
30.439		110.063		11.310	656	419.569	419.569	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
3.419		12.920				39.547	39.547	CURRENCY AND COIN	1021
9.528		27.286		6.625	17	70.444	70.444	DEMAND DEPOSITS	1022
261		5.853		611		120.951	120.951	SAVING DEPOSITS	1023
17.474		61.754		1.556		175.476	175.476	TIME DEPOSITS	1024
(244)		2.250		2.518	639	13.151	13.151	OTHER RUPIAH DEPOSITS	1025
			828			828	828	POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
1.115	2.914	(2.630)	22.512	(5.697)	(5.800)	20.939	20.939	SHORT TERM SECURITIES	1100
(6.162)	22.850	69.467	320.580	29.822	8.141	477.425	477.425	CREDIT	1200
	12.178		156.962		304	266.467	266.467	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
(6.162)	(350)	11.986	44.323	1.375		59.330	59.330	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	11.022	57.481	119.295	28.447	7.836	151.628	151.628	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
	5	901.794	1.366.950	398.372	7.792	1.414.000	1.414.000	STOCK AND PARTICIPATION	1300
(2.737)	915	8.165	40.190	115.712	4.192	114.454	114.454	LONG TERM SECURITIES	1400
		10.805		108.357		87.436	87.436	GOVERNMENT BONDS	1410
(2.737)	915	(2.640)	40.190	7.355	4.192	27.018	27.018	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
(140)		41.346				49.419	49.419	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
(751)	5.484	53.618	45.021	1.470	7.316	38.710	38.710	TRADE CREDITS	1800
		(905)		10.744		211.807	211.807	INTERBANK CLAIMS	2000
(6.369)	(754)	585.579	266.229	(279.206)	18.309	367.227	367.227	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
39.229	39.229	3.413.247	3.413.247	283.907	283.907	5.417.745	5.417.745	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative
*) Preliminary Figures

TABEL 6. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 6. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KEUANGAN/			
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH	
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GOVERNMENT	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		(8.231)		52.424		15.406		551.859		201.256
0200	Investasi Nonfinansial	136		5.992		(4.282)		227.017		219.902	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(8.368)		46.432		19.688		324.843		(18.646)	
0400	Selisih Statistik = 0300-0500	(0)		0		0				0	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(8.368)		46.432		19.688		324.843		(18.646)	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	187.972		574.052		161.228		599.781		44.985	
0700	Jumlah Sumber Finansial		196.340		527.620		141.539		274.939		63.632
0800	Cadangan Valas Pemerintah	113.565									
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	1.861		(3.602)	(3.103)	787	(175)		(34)		
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	20.314	52.842	(27.259)	457.123	47.951		241.434		40.217	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	20.314	4.215	(32.872)	40.568	3.984		(5.276)		5.073	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		48.627	5.613	416.555	43.967		245.663		35.144	
1021	Uang Kertas dan Logam		54.397	6.866		2.554		19.013		2.377	
1022	Giro		(5.772)	(29)	86.566	6.368		2.508		23.779	
1023	Tabungan		2		159.337	1.478		152.961		733	
1024	Deposito Berjangka				147.133	29.148		77.130		6.104	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			(1.225)	23.519	4.419		(5.949)		2.152	
1030	Tabungan Giro Pos & Koperasi							1.046			
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			13.430	17.065	7.393	2.460	(2.714)		(0)	(2.063)
1200	Kredit (Jumlah)	(481)	(748)	442.796	26.945	62.287	28.472	45	287.681	873	(15.219)
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(481)		370.521			9.236		243.070		7.528
1220	Kredit Institusi Lain dlm Rp				2.109	64.538	3.087	45	30.468	881	
1230	Kredit dalam Valas		(748)	72.276	24.837	(2.251)	16.149		14.144	(7)	(22.746)
1300	Modal Saham dan Penyertaan			(1.387)	32.070	31.066	25.872	75.913		(53)	
1400	Surat Berharga Jk Panjang	(9.580)	19.233	48.601	1.431	25.100	1.980	66.081		30.230	123.813
1410	Surat Berharga Pemerintah	(9.580)		47.757		19.625		66.055		11.000	123.813
1420	Surat Berharga Lainnya		19.233	844	1.431	5.475	1.980	27		19.230	
1500	Cadangan Asuransi & Pensiun					2	44.041	4.129			
1800	Kredit Dagang						1	(10.342)	(18.727)		
2000	Rekening Antar Bank	(1.256)	56.122	139.361	28.973	(5.073)		(3)			
9000	Rupa-rupa	63.551	68.890	(37.887)	(32.885)	(8.285)	38.888	225.238	6.019	(26.282)	(42.900)
	TOTAL	188.108	188.108	580.044	580.044	156.946	156.946	826.798	826.798	264.888	264.888

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber
angka dalam kurung berarti negatif
**) Angka Sangat Sementara

INDONESIA, 2011 **)(Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2011 **)(IN BILLION RUPIAHS)

NON FINANCIAL SECTORS				LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
PRSH PEMERINTAH		BISNIS		REST OF THE WORLD		TOTAL			
GOV'T ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES		REST OF THE WORLD		TOTAL			
P	S	P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S	U	S		
	98.844		1.415.499		106.807		2.433.864	GROSS SAVING	0100
130.452		1.854.647				2.433.864		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(31.608)		(439.148)		106.807				NET LENDING/BORROWING	0300
		(0)				0		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(31.608)		(439.148)		106.807		(0)		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
143.450		1.117.961		297.883		3.127.313		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	175.058		1.557.109		191.076		3.127.313	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
					113.565	113.565	113.565	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
		467	1.944	(2.216)	(1.336)	(2.704)	(2.704)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
6.041		188.107	1.046	2.251	8.044	519.055	519.055	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
3.987		55.832		3.038	9.298	54.080	54.080	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
2.054		132.276		(787)	(1.253)	463.929	463.929	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
4.753		18.833				54.397	54.397	CURRENCY AND COIN	1021
7.744		39.709		687	(29)	80.765	80.765	DEMAND DEPOSITS	1022
(111)		4.203		75		159.339	159.339	SAVING DEPOSITS	1023
(12.497)		46.186		1.062		147.133	147.133	TIME DEPOSITS	1024
2.165		23.344		(2.612)	(1.225)	22.294	22.294	OTHER RUPIAH DEPOSITS	1025
			1.046			1.046	1.046	POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
(280)	3.524	9.168	13.003	12.292	5.300	39.290	39.290	SHORT TERM SECURITIES	1100
4.283	4.029	79.298	320.263	108.293	45.968	697.393	697.393	CREDIT	1200
	(292)		110.438		61	370.039	370.039	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
4.283	5.731	27.530	55.981	99		97.375	97.375	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	(1.409)	51.767	153.845	108.194	45.907	229.978	229.978	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
5.712	66.226	281.465	377.867	125.617	16.298	518.333	518.333	STOCK AND PARTICIPATION	1300
2.936	821	(100.786)	(1.363)	87.794	4.461	150.377	150.377	LONG TERM SECURITIES	1400
		(68.567)		57.524		123.813	123.813	GOVERNMENT BONDS	1410
2.936	821	(32.219)	(1.363)	30.271	4.461	26.564	26.564	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
31		39.879				44.041	44.041	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
106.251	46.299	(22.236)	56.863	10.512	(250)	84.185	84.185	TRADE CREDITS	1800
		(805)		(47.129)		85.095	85.095	INTERBANK CLAIMS	2000
18.476	54.160	643.403	787.485	469	(974)	878.683	878.683	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
273.902	273.902	2.972.608	2.972.608	297.883	297.883	5.561.176	5.561.176	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative
**) Very Preliminary Figures

Lampiran 4

**Matrik NAD Indonesia Tahunan, 2006 - 2011
Menurut Sektor**

<http://www.bps.go.id>

TABEL 7. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 7. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2006		2007		2008	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		17.256		(15.432)		18.624
0200	Investasi Nonfinansial	243		283		176	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	17.013		(15.715)		18.448	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500			0			
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	17.013		(15.715)		18.448	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	126.964		194.331		(104.120)	
0700	Jumlah Sumber Finansial		109.951		210.046		(122.568)
0800	Cadangan Valas Pemerintah	29.423		157.378		44.180	
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(729)		121		234	
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	13.228	(76.335)	(4.543)	43.289	(16.229)	120.450
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	13.228	(8.458)	(4.543)	(4.626)	(16.229)	54.377
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		(67.876)		47.914		66.074
1021	Uang Kertas dan Logam		33.703		42.213		43.605
1022	Giro		(101.324)		5.698		22.480
1023	Tabungan		(256)		3		(12)
1024	Deposito Berjangka						
1025	Simpanan Rupiah lainnya						
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek						
1200	Kredit (Jumlah)	(156)	(5.834)	(11.518)	(62)	47	713
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(154)		(11.519)		42	
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp						
1230	Kredit dalam Valas	(2)	(5.834)	1	(62)	4	713
1300	Modal Saham dan Penyertaan	44	(117)		288	(0)	522
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	11.810	13.626	(7.860)	5.061	2.471	12.990
1410	Surat Berharga Pemerintah	11.810	14.349	(7.860)		2.471	
1420	Surat Berharga Lainnya		(724)		5.061		12.990
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun						
1800	Kredit Dagang						
2000	Rekening Antar Bank	167	142.713	(1.642)	87.668	2.234	(124.323)
9000	Rupa-rupa	73.178	35.898	62.395	73.803	(137.056)	(132.920)
	JUMLAH	127.207	127.207	194.614	194.614	(103.944)	(103.944)

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber
angka dalam kurung berarti negatif

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

SEKTOR BANK SENTRAL, 2006-2011 (MILIAR RUPIAH)
FOR CENTRAL BANK SECTOR, 2006-2011 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2009		2010 ^{*)}		2011 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	(5.054)		(27.515)		(8.231)	GROSS SAVING	0100
302		350		136		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(5.356)		(27.864)		(8.368)		NET LENDING/BORROWING	0300
(0)				(0)		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(5.356)		(27.864)		(8.368)		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
122.131		260.048		187.972		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	127.487		287.912		196.340	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
139.516		227.485		113.565		OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
(751)		(665)		1.861		OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
(9.642)	21.748	14.344	76.620	20.314	52.842	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
(9.642)	7.809	14.344	5.353	20.314	4.215	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
	13.939		71.267		48.627	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
	14.638		39.547		54.397	CURRENCY AND COIN	1021
	(711)		31.731		(5.772)	DEMAND DEPOSITS	1022
	12		(11)		2	SAVING DEPOSITS	1023
						TIME DEPOSITS	1024
						OTHER RUPIAH DEPOSITS	1025
						POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
						SHORT TERM SECURITIES	1100
(751)	(1.754)	(247)	(527)	(481)	(748)	CREDIT	1200
(719)		(247)		(481)		BANK LOANS IN RUPIAH	1210
						OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
(32)	(1.754)		(527)		(748)	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
(50)	25.028	(224)				STOCK AND PARTICIPATION	1300
(626)	(6.866)	(4.468)	(3.647)	(9.580)	19.233	LONG TERM SECURITIES	1400
(626)		(4.468)		(9.580)		GOVERNMENT BONDS	1410
	(6.866)		(3.647)		19.233	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
						LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
						TRADE CREDITS	1800
(3.419)	105.693	(1.709)	196.188	(1.256)	56.122	INTERBANK CLAIMS	2000
(2.144)	(16.363)	25.530	19.278	63.551	68.890	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
122.433	122.433	260.398	260.398	188.108	188.108	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 8. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 8. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2006		2007		2008	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		27.613		24.690		50.149
0200	Investasi Nonfinansial	2.891		2.876		6.154	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	24.722		21.814		43.995	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	0					
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	24.722		21.814		43.995	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	229.329		298.047		331.247	
0700	Jumlah Sumber Finansial		204.607		276.233		287.252
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(6.295)	(5.711)	3.162	637	16.651	3.841
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(14.690)	161.175	(9.249)	232.504	74.645	267.600
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(21.812)	(4.746)	(20.110)	35.276	57.950	83.132
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	7.122	165.921	10.861	197.229	16.694	184.468
1021	Uang Kertas dan Logam	7.031		9.900		16.825	
1022	Giro	(1)	57.241		59.407		(2.941)
1023	Tabungan		52.904		102.057		43.161
1024	Deposito Berjangka		55.261		33.079		138.247
1025	Simpanan Rupiah lainnya	92	515	960	2.686	(131)	6.001
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	2.127	6.282	1.751	9.861	9.334	(9.276)
1200	Kredit (Jumlah)	99.969	(608)	209.819	5.767	317.593	13.379
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	75.599		155.013		273.911	
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp		(2.550)		1.527		(82)
1230	Kredit dalam Valas	24.370	1.942	54.806	4.239	43.682	13.461
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(106)	8.694	(255)	9.746	1.056	(11.727)
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	(9.721)	1.828	3.289	3.076	(12.493)	(222)
1410	Surat Berharga Pemerintah	(11.505)		(464)		(12.242)	
1420	Surat Berharga Lainnya	1.784	1.828	3.753	3.076	(250)	(222)
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun						
1800	Kredit Dagang						
2000	Rekening Antar Bank	156.564	22.045	80.719	4.409	(88.564)	9.194
9000	Rupa-rupa	1.481	10.902	8.811	10.234	13.024	14.463
	JUMLAH	232.220	232.220	300.924	300.924	337.401	337.401

Keterangan P = Penggunaan, S = Sumber
 angka dalam kurung berarti negatif
 *) Angka sementara
 **) Angka sangat sementara

SEKTOR PERBANKAN, 2006-2011 (MILIAR RUPIAH)
FOR BANKING SECTOR, 2006-2011 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2009		2010 ^{*)}		2011 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	83.509		36.403		52.424	GROSS SAVING	0100
5.454		1.189		5.992		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
78.055		35.214		46.432		NET LENDING/BORROWING	0300
				0		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
78.055		35.214		46.432		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
255.916		476.601		574.052		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	177.861		441.387		527.620	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
						OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
(13.156)	(3.518)	(37)	(6.294)	(3.602)	(3.103)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
50.654	205.476	(35.494)	388.209	(27.259)	457.123	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
52.611	12.092	(41.507)	40.564	(32.872)	40.568	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
(1.957)	193.384	6.013	347.646	5.613	416.555	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
(1.621)		5.357		6.866		CURRENCY AND COIN	1021
36	30.367	17	38.696	(29)	86.566	DEMAND DEPOSITS	1022
	82.898		120.962		159.337	SAVING DEPOSITS	1023
	83.615		175.476		147.133	TIME DEPOSITS	1024
(372)	(3.496)	639	12.512	(1.225)	23.519	OTHER RUPIAH DEPOSITS	1025
						POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
1.837	1.986	23.136	(327)	13.430	17.065	SHORT TERM SECURITIES	1100
130.640	(2.807)	330.185	4.693	442.796	26.945	CREDIT	1200
174.728		266.714		370.521		BANK LOANS IN RUPIAH	1210
	2.502		4.200		2.109	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
(44.088)	(5.309)	63.471	493	72.276	24.837	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
3.287	12.909	2.126	30.068	(1.387)	32.070	STOCK AND PARTICIPATION	1300
(8.779)	2.494	(28.105)	(1.034)	48.601	1.431	LONG TERM SECURITIES	1400
(9.004)		(37.092)		47.757		GOVERNMENT BONDS	1410
225	2.494	8.987	(1.034)	844	1.431	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
						LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
						TRADE CREDITS	1800
71.206	(3.816)	201.849	15.619	139.361	28.973	INTERBANK CLAIMS	2000
20.227	(34.864)	(17.059)	10.452	(37.887)	(32.885)	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
261.369	261.369	477.790	477.790	580.044	580.044	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 9. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 9. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2006		2007		2008	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		8.815		19.386		18.608
0200	Investasi Nonfinansial	1.567		199		2.939	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	7.249		19.187		15.668	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500					0	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	7.249		19.187		15.668	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	30.887		95.082		60.336	
0700	Jumlah Sumber Finansial		23.638		75.895		44.668
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(25)	98	0	149	10	(191)
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	12.470		4.766		7.829	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(730)		2.475		(1.039)	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	13.200		2.291		8.868	
1021	Uang Kertas dan Logam	1.334		1.616		1.339	
1022	Giro	1.016		2.694		35	
1023	Tabungan	372		(393)		(63)	
1024	Deposito Berjangka	10.522		(1.625)		7.538	
1025	Simpanan Rupiah lainnya	(43)		(1)		18	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	35	(409)	221	(111)	68	370
1200	Kredit (Jumlah)	(123)	6.636	17.110	9.658	32.385	32.200
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		5.441	14.398	3.389	29.218	8.479
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	(123)	1.321	2.629	(15)	2.834	
1230	Kredit dalam Valas		(126)	83	6.283	332	23.721
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(136)	3.643	38.813	5.255	(2.242)	3.118
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	4.689	(8)	23.739	3.966	17.989	(1.641)
1410	Surat Berharga Pemerintah	3.567		13.904		17.830	
1420	Surat Berharga Lainnya	1.122	(8)	9.835	3.966	158	(1.641)
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun	4.363	20.976	389	47.426	532	9.368
1800	Kredit Dagang	29.784	(5.904)	1.533	(2)	1.753	3.976
2000	Rekening Antar Bank	7.672	13	1.192	30	(7.084)	26
9000	Rupa-rupa	(27.841)	(1.406)	7.318	9.523	9.097	(2.558)
	JUMLAH	32.454	32.454	95.281	95.281	63.275	63.275

Keterangan P = Penggunaan, S = Sumber
 angka dalam kurung berarti negatif

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

SEKTOR LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK, 2006-2011 (MILIAR RUPIAH)
FOR NON BANK FINANCIAL SECTORS, 2006-2011 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2009		2010 ^{*)}		2011 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	40.695		22.565		15.406	GROSS SAVING	0100
6.205		13.587		(4.282)		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
34.489		8.978		19.688		NET LENDING/BORROWING	0300
34.489		8.978		0		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
				19.688		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
240.469		149.526		161.228		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	205.980		140.548		141.539	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
						OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
4	(2.930)	(31)	2.819	787	(175)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
9.640		31.302		47.951		CURRENCY AND DEPOSITS	1000
(14)		1.031		3.984		FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
9.654		30.271		43.967		RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
774		2.465		2.554		CURRENCY AND COIN	1021
195		4.877		6.368		DEMAND DEPOSITS	1022
345		944		1.478		SAVING DEPOSITS	1023
8.285		21.934		29.148		TIME DEPOSITS	1024
56		51		4.419		OTHER RUPIAH DEPOSITS	1025
						POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
(82)	(184)	5.757	1.560	7.393	2.460	SHORT TERM SECURITIES	1100
9.067	(3.029)	49.670	39.392	62.287	28.472	CREDIT	1200
	6.975		21.627		9.236	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
5.053	(185)	47.419	178	64.538	3.087	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
4.014	(9.819)	2.251	17.587	(2.251)	16.149	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
66.851	13.964	47.840	9.185	31.066	25.872	STOCK AND PARTICIPATION	1300
85.729	3.551	22.087	(13.598)	25.100	1.980	LONG TERM SECURITIES	1400
58.425		3.876		19.625		GOVERNMENT BONDS	1410
27.305	3.551	18.211	(13.598)	5.475	1.980	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
797	105.786	2	49.419	2	44.041	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
	(1)		3		1	TRADE CREDITS	1800
2.185		1.977		(5.073)		INTERBANK CLAIMS	2000
66.277	88.822	(9.078)	51.768	(8.285)	38.888	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
246.675	246.675	163.113	163.113	156.946	156.946	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

*) Preliminary Figures

**) Very Preliminary Figures

TABEL 10. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 10. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2006		2007		2008	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		180.262		241.342		325.444
0200	Investasi Nonfinansial	31.417		161.772		186.531	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	148.845		79.571		138.913	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500			0			
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	148.845				138.913	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	237.046		484.081		270.482	
0700	Jumlah Sumber Finansial		88.201		404.510		131.569
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya		(70)		108		130
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	84.189		126.026		181.491	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(5.526)		3.844		28.574	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	80.522		122.182		139.751	
1021	Uang Kertas dan Logam	10.669		12.925		10.712	
1022	Giro	9.362		8.679		(3.852)	
1023	Tabungan	43.461		104.291		42.268	
1024	Deposito Berjangka	17.021		(3.892)		90.518	
1025	Simpanan Rupiah lainnya	9		179		104	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi	9.193				13.166	
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	126		(571)		(341)	
1200	Kredit (Jumlah)	(57)	65.197	15.011	96.985	14.916	189.139
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		64.781		97.727		154.845
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	(57)	(1.547)	15.012		14.916	34.192
1230	Kredit dalam Valas	(0)	1.963	(1)	(742)		102
1300	Modal Saham dan Penyertaan	34.824	(200)	44.806		10.727	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	1		10.930		(36)	
1410	Surat Berharga Pemerintah						
1420	Surat Berharga Lainnya	1		10.930		(36)	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun	16.813		5.747		10.469	
1800	Kredit Dagang	19.259	21.787	43.033	45.846	(24.065)	(4.017)
2000	Rekening Antar Bank	51		158		(154)	
9000	Rupa-rupa	81.839	1.487	238.941	261.572	77.475	(53.683)
	JUMLAH	268.463	268.463	645.852	645.852	457.013	457.013

Keterangan P = Penggunaan, S = Sumber
 angka dalam kurung berarti negatif

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

SEKTOR RUMAH TANGGA, 2006-2011 (MILIAR RUPIAH)
FOR HOUSEHOLD SECTOR, 2006-2011 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2009		2010 ^{*)}		2011 ^{**)}			
P U	S	P U	S	P U	S		
	398.812		453.696		551.859	GROSS SAVING	0100
215.304		217.781		227.017		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
183.508		235.915		324.843		NET LENDING/BORROWING	0300
183.508		235.915		324.843		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
268.802		373.035		599.781		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
	85.293		137.120		274.939	TOTAL FINANCIAL USES	0600
	(239)		24		(34)	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
						OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
						(34) OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
177.184		248.490		241.434		CURRENCY AND DEPOSITS	1000
10.223		24.720		(5.276)		FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
166.656		222.942		245.663		RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
6.504		13.676		19.013		CURRENCY AND COIN	1021
23.414		22.152		2.508		DEMAND DEPOSITS	1022
79.970		113.055		152.961		SAVING DEPOSITS	1023
56.441		66.840		77.130		TIME DEPOSITS	1024
328		7.220		(5.949)		OTHER RUPIAH DEPOSITS	1025
305		828		1.046		POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
219		(736)		(2.714)		SHORT TERM SECURITIES	1100
2.017	110.995	5.589	92.642	45	287.681	CREDIT	1200
	106.821		75.720		243.070	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
2.017	1.996	5.589	10.978	45	30.468	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	2.178		5.944		14.144	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
93.150		68.883	0	75.913		STOCK AND PARTICIPATION	1300
19.932		846		66.081		LONG TERM SECURITIES	1400
7.250		(797)		66.055		GOVERNMENT BONDS	1410
12.682		1.644		27		OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
6.324		8.211		4.129		LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
(22.046)	(12.289)	(15.627)	(19.114)	(10.342)	(18.727)	TRADE CREDITS	1800
74		(150)		(3)		INTERBANK CLAIMS	2000
(8.053)	(13.173)	57.529	63.568	225.238	6.019	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
484.106	484.106	590.816	590.816	826.798	826.798	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

*) Preliminary Figures

**) Very Preliminary Figures

TABEL 11. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 11. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2006		2007		2008	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		181.082		168.661		229.473
0200	Investasi Nonfinansial	113.721		133.690		178.635	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	67.361		34.972		50.838	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500						
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	67.361		34.971		50.838	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	98.784		(818)		130.306	
0700	Jumlah Sumber Finansial		31.423		(35.789)		79.468
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(184)	64				
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	2.425		(8.408)		115.100	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(11.033)		(4.788)		54.422	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	13.458		(3.620)		60.678	
1021	Uang Kertas dan Logam	1.334		1.616		1.339	
1022	Giro	1.419		(7.211)		45.226	
1023	Tabungan	1.508		(773)		88	
1024	Deposito Berjangka	8.931		2.288		8.755	
1025	Simpanan Rupiah lainnya	266		461		5.270	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek		(0)	14	(0)	(4)	0
1200	Kredit (Jumlah)	506	(67.241)	38	20.824	(100)	142.218
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		898	371	(6.784)	(320)	506
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	321		(299)		204	
1230	Kredit dalam Valas	185	(68.139)	(34)	27.607	17	141.712
1300	Modal Saham dan Penyertaan	5.680		(169)		(3.559)	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	15.917	32.284	5.020	59.251	12.985	50.225
1410	Surat Berharga Pemerintah	14.349	32.284		59.251		50.225
1420	Surat Berharga Lainnya	1.568		5.020		12.985	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun						
1800	Kredit Dagang						
2000	Rekening Antar Bank						
9000	Rupa-rupa	74.440	66.316	2.687	(115.864)	5.883	(112.975)
	JUMLAH	212.505	212.505	132.872	132.872	308.941	308.941

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber
 angka dalam kurung berarti negatif

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

SEKTOR PEMERINTAH, 2006-2011 (MILIAR RUPIAH)
FOR GENERAL GOVERNMENT SECTOR, 2006-2011 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2009		2010 ^{*)}		2011 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
186.602	115.967	168.114	173.697	219.902	201.256	GROSS SAVING	0100
(70.635)		5.583		(18.646)		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(70.635)		5.583		(18.646)		NET LENDING/BORROWING	0300
(1.454)		21.132		44.985		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
	69.180		15.548		63.632	NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
						TOTAL FINANCIAL USES	0600
						TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
						OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
						OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
(10.467)		13.572		40.217		CURRENCY AND DEPOSITS	1000
7.963		5.042		5.073		FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
(18.430)		8.531		35.144		RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
813		1.709		2.377		CURRENCY AND COIN	1021
(13.535)		(41)		23.779		DEMAND DEPOSITS	1022
(193)		228		733		SAVING DEPOSITS	1023
93		5.919		6.104		TIME DEPOSITS	1024
(5.608)		716		2.152		OTHER RUPIAH DEPOSITS	1025
						POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
(5)	(0)	(6)	81	(0)	(2.063)	SHORT TERM SECURITIES	1100
(856)	21.024	(899)	(10.346)	873	(15.219)	CREDIT	1200
	1.343		(324)		7.528	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
(776)		(877)		881		OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
(80)	19.681	(22)	(10.023)	(7)	(22.746)	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
1.955		(4.792)		(53)		STOCK AND PARTICIPATION	1300
(6.866)	110.679	2.954	87.436	30.230	123.813	LONG TERM SECURITIES	1400
	110.679	6.755	87.436	11.000	123.813	GOVERNMENT BONDS	1410
(6.866)		(3.801)		19.230		OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
						LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
						TRADE CREDITS	1800
						INTERBANK CLAIMS	2000
14.783	(62.522)	10.303	(61.623)	(26.282)	(42.900)	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
185.147	185.147	189.245	189.245	264.888	264.888	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 12. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 12. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2006		2007		2008	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		3.708		40.594		64.475
0200	Investasi Nonfinansial	78.006		75.508		114.542	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(74.298)		(34.914)		(50.067)	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500						
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(74.298)		(34.914)		(50.067)	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	12.952		106.512		31.120	
0700	Jumlah Sumber Finansial		87.250		141.426		81.187
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya						212
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	11.642		27.513		(7.650)	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	5.683		2.235		(3.631)	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	5.959		25.278		(4.019)	
1021	Uang Kertas dan Logam	2.667		3.231		2.678	
1022	Giro	155		17.849		(16.536)	
1023	Tabungan	1.148		(349)		(397)	
1024	Deposito Berjangka	2.012		4.074		10.576	
1025	Simpanan Rupiah lainnya	(24)		473		(340)	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	49	(275)	271	632	(79)	(1.026)
1200	Kredit (Jumlah)	(59)	10.564	187	12.140	935	11.766
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		2.876		(488)		12.442
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	(59)	(30)	187	1.396	935	2.462
1230	Kredit dalam Valas		7.718		11.232		(3.139)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	7.670	65.774		101.356		24.679
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	583	40	2.887	1.960	7.325	(268)
1410	Surat Berharga Pemerintah	(472)					
1420	Surat Berharga Lainnya	1.055	40	2.887	1.960	7.325	(268)
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun		600		2.688		3.899
1800	Kredit Dagang	5.762	8.077	2.830	11.518	4	18
2000	Rekening Antar Bank						
9000	Rupa-rupa	(12.694)	2.469	72.824	11.131	30.586	41.909
	JUMLAH	90.958	90.958	182.020	182.020	145.662	145.662

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber
 angka dalam kurung berarti negatif

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

SEKTOR PERUSAHAAN PEMERINTAH, 2006-2011 (MILIAR RUPIAH)
FOR GOVERNMENT ENTERPRISES SECTOR, 2006-2011 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2009		2010 ^{*)}		2011 ^{**)}			
P U	S	P U	S	P U	S		
	52.351		7.787		98.844	GROSS SAVING	0100
110.366		28.100		130.452		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(58.015)		(20.313)		(31.608)		NET LENDING/BORROWING	0300
(58.015)		(20.313)		(31.608)		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
						NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
242.639		11.129		143.450		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	300.654		31.442		175.058	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
	(212)		28			OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
						OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
4.314		26.173		6.041		CURRENCY AND DEPOSITS	1000
7.466		(4.265)		3.987		FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSIT	1010
(3.152)		30.439		2.054		RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
1.626		3.419		4.753		CURRENCY AND COIN	1021
2.070		9.528		7.744		DEMAND DEPOSITS	1022
5		261		(111)		SAVING DEPOSITS	1023
(7.325)		17.474		(12.497)		TIME DEPOSITS	1024
472		(244)		2.165		OTHER RUPIAH DEPOSITS	1025
						POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
235	34	1.115	2.914	(280)	3.524	SHORT TERM SECURITIES	1100
(63)	19.040	(6.162)	22.850	4.283	4.029	CREDIT	1200
	13.713		12.178		(292)	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
(63)	943	(6.162)	(350)	4.283	5.731	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	4.384		11.022		(1.409)	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
212.688	251.339		5	5.712	66.226	STOCK AND PARTICIPATION	1300
1.087	24.213	(2.737)	915	2.936	821	LONG TERM SECURITIES	1400
						GOVERNMENT BONDS	1410
1.087	24.213	(2.737)	915	2.936	821	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
78		(140)		31		LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
11.178	(28.757)	(751)	5.484	106.251	46.299	TRADE CREDITS	1800
						INTERBANK CLAIMS	2000
13.123	34.997	(6.369)	(754)	18.476	54.160	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
353.006	353.006	39.229	39.229	273.902	273.902	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 13. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 13. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2006		2007		2008	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		467.893		502.550		825.057
0200	Investasi Nonfinansial	620.324		610.246		1.019.853	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(152.431)		(107.696)		(194.796)	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500			0			
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(152.431)		(107.696)		(194.796)	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	323.518		918.057		(255.200)	
0700	Jumlah Sumber Finansial		475.949		1.025.754		(60.404)
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(51.331)	(58.753)	12.732	16.578	(15.280)	13.439
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	53.085	9.193	116.379		78.439	13.166
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(1.514)		30.914		45.909	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	54.599		85.464		32.530	
1021	Uang Kertas dan Logam	10.669		12.925		10.712	
1022	Giro	20.647		40.174		(871)	
1023	Tabungan	5.643		(91)		735	
1024	Deposito Berjangka	17.327		31.117		20.916	
1025	Simpanan Rupiah lainnya	314		1.340		1.038	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi		9.193				13.166
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	(3.110)	(1.205)	2.116	14.410	954	12.505
1200	Kredit (Jumlah)	1.441	(94.598)	1.793	279.188	30.034	358.150
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		943	148	64.822	(92)	126.265
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	456	256	634	16.848	14.186	(3.307)
1230	Kredit dalam Valas	985	(95.797)	1.010	197.518	15.941	235.192
1300	Modal Saham dan Penyertaan	464.912	519.376	542.966	641.936	(672.431)	(782.512)
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	11.946	16.275	5.913	5.539	(58.892)	(25.259)
1410	Surat Berharga Pemerintah	17.638		15.004		(21.520)	
1420	Surat Berharga Lainnya	(5.691)	16.275	(9.091)	5.539	(37.372)	(25.259)
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun	400		43.979		2.266	
1800	Kredit Dagang	58.352	59.344	82.352	63.083	397.244	380.077
2000	Rekening Antar Bank	(2.978)		1.769		(2.001)	
9000	Rupa-rupa	(209.201)	26.316	108.059	5.019	(15.532)	(29.971)
	JUMLAH	943.842	943.842	1.528.303	1.528.303	764.653	764.653

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber
angka dalam kurung berarti negatif

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

SEKTOR BISNIS, 2006-2011 (MILIAR RUPIAH)
FOR PRIVATE ENTERPRISES SECTOR, 2006-2011 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2009		2010 ^{*)}		2011 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
1.212.860	1.011.910	1.667.454	1.357.025	1.854.647	1.415.499	GROSS SAVING	0100
						NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(200.950)		(310.429)		(439.148)		NET LENDING/BORROWING	0300
(0)				(0)		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(200.950)		(310.429)		(439.148)		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
1.867.734		1.745.793		1.117.961		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	2.068.683		2.056.222		1.557.109	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
						OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
2.182	(3.160)	(19.530)	(6.089)	467	1.944	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
89.695	305	108.890	828	188.107	1.046	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
36.961		(1.173)		55.832		FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
52.733		110.063		132.276		RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
6.543		12.920		18.833		CURRENCY AND COIN	1021
16.348		27.286		39.709		DEMAND DEPOSITS	1022
2.613		5.853		4.203		SAVING DEPOSITS	1023
25.993		61.754		46.186		TIME DEPOSITS	1024
1.237		2.250		23.344		OTHER RUPIAH DEPOSITS	1025
	305		828		1.046	POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
631	5.447	(2.630)	22.512	9.168	13.003	SHORT TERM SECURITIES	1100
3.519	114.221	69.467	320.580	79.298	320.263	CREDIT	1200
	45.252		156.962		110.438	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
3.519	3.944	11.986	44.323	27.530	55.981	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	65.025	57.481	119.295	51.767	153.845	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
433.015	840.879	901.794	1.366.950	281.465	377.867	STOCK AND PARTICIPATION	1300
(57.076)	(13.793)	8.165	40.190	(100.786)	(1.363)	LONG TERM SECURITIES	1400
(25.109)		10.805		(68.567)		GOVERNMENT BONDS	1410
(31.966)	(13.793)	(2.640)	40.190	(32.219)	(1.363)	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
98.587		41.346		39.879		LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
192.402	202.834	53.618	45.021	(22.236)	56.863	TRADE CREDITS	1800
(3.904)		(905)		(805)		INTERBANK CLAIMS	2000
1.108.683	921.950	585.579	266.229	643.403	787.485	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
3.080.594	3.080.594	3.413.247	3.413.247	2.972.608	2.972.608	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 14. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 14. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2006		2007		2008	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		(38.460)		2.782		(36.684)
0200	Investasi Nonfinansial						
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(38.460)		2.782		(36.684)	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500						
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(38.460)		2.782		(36.684)	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	44.642		230.651		175.048	
0700	Jumlah Sumber Finansial		83.101		227.869		211.732
0800	Cadangan Valas Pemerintah		29.423		157.378		44.180
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(23.089)	(17.280)	17.315	15.858	7.752	(8.063)
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(76.257)	(7.943)	6.572	(16.737)	12.383	44.792
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	466	(8.034)	2.924	(17.698)	16.475	44.922
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	(76.724)	91	3.648	960	(4.091)	(131)
1021	Uang Kertas dan Logam						
1022	Giro	(76.682)	(1)	2.921		(4.462)	
1023	Tabungan	517		(625)		516	
1024	Deposito Berjangka	(551)		1.117		(57)	
1025	Simpanan Rupiah lainnya	(7)	92	235	960	(89)	(131)
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	2.205	(2.962)	17.320	(3.670)	2	7.361
1200	Kredit (Jumlah)	(185.876)	1.531	193.139	1.079	369.071	17.316
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		506		(256)		222
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	(3.091)		1.594		191	
1230	Kredit dalam Valas	(182.786)	1.026	191.544	1.335	368.880	17.094
1300	Modal Saham dan Penyertaan	79.044	(5.240)	132.278	(142)	(58.283)	41.189
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	25.991	(2.827)	32.180	(2.755)	69.203	2.727
1410	Surat Berharga Pemerintah	11.246		38.666		63.686	
1420	Surat Berharga Lainnya	14.745	(2.827)	(6.485)	(2.755)	5.517	2.727
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun						
1800	Kredit Dagang	2.331	32.183	3.208	12.512	9.169	4.050
2000	Rekening Antar Bank	3.297		9.912		(19.534)	
9000	Rupa-rupa	216.997	56.215	(181.273)	64.346	(214.715)	58.181
	JUMLAH	44.642	44.642	230.651	230.651	175.048	175.048

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber
 angka dalam kurung berarti negatif

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

SEKTOR LUAR NEGERI, 2006-2011 (MILIAR RUPIAH)
FOR REST OF THE WORLD SECTOR, 2006-2011 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2009		2010 ^{*)}		2011 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	38.903		72.915		106.807	GROSS SAVING	0100
						NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
38.903		72.915		106.807		NET LENDING/BORROWING	0300
						STATISTICAL DISCREPANCY	0400
38.903		72.915		106.807		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
278.527		283.907		297.883		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	239.624		210.992		191.076	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
	139.516		227.485		113.565	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
(528)	(2.191)	(8.996)	(19.749)	(2.216)	(1.336)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
(10.417)	73.432	21.686	(36.694)	2.251	8.044	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
(11.899)	73.768	10.376	(37.350)	3.038	9.298	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
1.482	(336)	11.310	656	(787)	(1.253)	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
						CURRENCY AND COIN	1021
1.164	36	6.625	17	687	(29)	DEMAND DEPOSITS	1022
171		611		75		SAVING DEPOSITS	1023
128		1.556		1.062		TIME DEPOSITS	1024
19	(372)	2.518	639	(2.612)	(1.225)	OTHER RUPIAH DEPOSITS	1025
						POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
1.394	(3.054)	(5.697)	(5.800)	12.292	5.300	SHORT TERM SECURITIES	1100
117.570	3.453	29.822	8.141	108.293	45.968	CREDIT	1200
	(95)		304		61	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
(551)		1.375		99		OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
118.121	3.548	28.447	7.836	108.194	45.907	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
339.537	6.312	398.372	7.792	125.617	16.298	STOCK AND PARTICIPATION	1300
92.627	5.750	115.712	4.192	87.794	4.461	LONG TERM SECURITIES	1400
79.744		108.357		57.524		GOVERNMENT BONDS	1410
12.883	5.750	7.355	4.192	30.271	4.461	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
						LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
(874)	18.873	1.470	7.316	10.512	(250)	TRADE CREDITS	1800
35.734		10.744		(47.129)		INTERBANK CLAIMS	2000
(296.516)	(2.467)	(279.206)	18.309	469	(974)	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
278.527	278.527	283.907	283.907	297.883	297.883	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 15. NERACA ARUS DANA INDONESIA
TAHUN 2011
TABLE 15. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA FOR

KODE	KATEGORI TRANSAKSI TRANSACTION CATEGORY	ASURANSI		PERUSAHAAN PEMBIAYAAN		PEGADAIAN	
		INSURANCES		FINANCE COMPANIES		PAWNSHOPS	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		7.746		4.863		940
0200	Investasi Nonfinansial	290		(4.637)		84	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	7.456		9.500		857	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	0				0	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	7.456		9.500		857	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	76.062		66.461		6.013	
0700	Jumlah Sumber Finansial		68.606		56.961		5.156
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya			787	(175)		
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	15.551		24.807		102	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	81		3.683		4	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	15.470		21.124		98	
1021	Uang Kertas dan Logam	2.377		126		52	
1022	Giro	522		5.657		58	
1023	Tabungan	11		1.512		0	
1024	Deposito Berjangka	11.574		10.510		(14)	
1025	Simpanan Rupiah lainnya	986		3.318		2	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	1.888	(4)	1.191	1.799		665
1200	Kredit (Jumlah)	21	(3.331)	56.694	28.780	5.571	3.523
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		(2.929)		9.136		3.530
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	21	(225)	58.945	3.311	5.571	(0)
1230	Kredit dalam Valas		(177)	(2.251)	16.333		(7)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	25.407	9.883	49	15.989		
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	25.612	(15)	(859)	1.332		662
1410	Surat Berharga Pemerintah	21.555					
1420	Surat Berharga Lainnya	4.056	(15)	(859)	1.332		662
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun		33.224			2	
1800	Kredit Dagang						1
2000	Rekening Antar Bank	158		(4.839)			
9000	Rupa-rupa	7.424	28.848	(11.369)	9.235	338	304
	TOTAL	76.352	76.352	61.824	61.824	6.096	6.096

Keterangan:

P = Penggunaan, S = Sumber
 angka dalam kurung berarti negatif

SEKTOR LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB)
(DALAM MILIAR RUPIAH)
NON BANKS FINANCIAL SECTORS, 2011 (IN BILLION RUPIAHS)

DANA PENSIUN		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
PENSION FUNDS		TOTAL			
P	S	P	S		
U	S	U	S		
	1.857		15.406	GROSS SAVING	0100
(19)		(4.282)		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
1.875		19.688		NET LENDING/BORROWING	0300
0		0		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
1.875		19.688		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
12.692		161.228		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	10.817		141.539	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
				OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
		787	(175)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
7.491		47.951		CURRENCY AND DEPOSITS	1000
216		3.984		FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
7.275		43.967		RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
		2.554		CURRENCY AND COIN	1021
131		6.368		DEMAND DEPOSITS	1022
(47)		1.478		SAVING DEPOSITS	1023
7.077		29.148		TIME DEPOSITS	1024
113		4.419		OTHER RUPIAH DEPOSITS	1025
				POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
4.315		7.393	2.460	SHORT TERM SECURITIES	1100
	(501)	62.287	28.472	CREDIT	1200
	(501)		9.236	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
		64.538	3.087	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	(0)	(2.251)	16.149	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
5.610		31.066	25.872	STOCK AND PARTICIPATION	1300
347		25.100	1.980	LONG TERM SECURITIES	1400
(1.930)		19.625		GOVERNMENT BONDS	1410
2.278		5.475	1.980	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
	10.817	2	44.041	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
			1	TRADE CREDITS	1800
(393)		(5.073)		INTERBANK CLAIMS	2000
(4.678)	501	(8.285)	38.888	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
12.674	12.674	156.946	156.946	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

Daftar Pustaka

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

Abraham, W.I. National Income and Economic Accounting, Prentise Hall Inc., Englewood, New Jersey, 1969.

Badan Pusat Statistik, Studi Neraca Arus Indonesia 1980, Jakarta, 1987.

_____, Neraca Arus Dana Indonesia Tahunan, berbagai seri, Jakarta.

_____, Pendapatan Nasional Indonesia Triwulanan, Jakarta, berbagai seri.

Bank Indonesia, Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank-Bank, Jakarta, 2000.

_____, Statistik Ekonomi-Kuangan Indonesia, terbit bulanan.

_____, Laporan Perekonomian Indonesia 2011, Jakarta, 2012

Bappepam LK, Kementerian Keuangan RI, Laporan Kegiatan Usaha Peransuransian Indonesia 2011, Jakarta, 2012.

_____, Data Statistik Perusahaan Pembiayaan 2011, Jakarta 2012.

_____, Laporan Tahunan Dana Pensiun 2011, Jakarta, 2012.

_____, Laporan Tahunan Bappepam-LK 2011, Jakarta, 2012.

Board of Governors of the Federal Reserve System, Guide to the Flow of Funds Accounts, Washington, D.C, 2000.

Central Bank of the Philippines, The Flow of Funds of the Philippines 1980 - 1983, Manila, 1985.

_____, Flow of Funds Manual of Accounts, Manila, 1983.

Commission of the European Communities, International Monetary Fund, Organization for Economic Co-operatin and Development, United Nations, and World Bank, System of National Accounts, Brussels/Lexembourg, New York, Paris, Washington, D.C, 1993.

Copeland, M.A., A study of Money of Flows in the United States, New York, 1952.

Dawson, J.C., Furthering the Development of Flow of Funds Analysis for Indonesia, Final Report of a Mission Funded By USAID, Jakarta, 1991.

Geehan, Randy, An Analysis of the Indonesia Flow of Funds, Occasional Paper for the Seminar, Jakarta, Mei, 1990.

Geehan, Saldua, and Balances, The Indonesian Flow of Funds, Manual of Operation, Consultan Report, Jakarta, 1990.

Powelson, J.P., National Income and Flow of Funds Analysis, Mc.Graw Hillbook Company Inc., New York, 1960.

Perusahaan Umum Pegadaian, Laporan Tahunan Pegadaian 2011, Jakarta, 2012.

Ritter, Lawrence S. & Silber, William L., Principles of money Banking and Financial Markets, Harper Collins Publishers, 1991.

Samuelson, Paul A. & William D., Ekonomi (Terjemahan), Edisi Kedua belas, Penerbit Erlangga, 1986.

United Nations , Provisional International Guidelines on the National and Sectoral Balance Sheet and Reconciliation Accounts of the System of National Accounts, Statistical Paper, Series M No. 60, New York, 1977.

_____, Handbook of National Accounting, Public Sector, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 1070
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsdq@bps.go.id